



2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI BESAR POM DI PADANG



BADAN POM
Balai Besar POM di Padang



BALAI BESAR POM DI PADANG
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Jln. Gajah Mada Gunung Pangilun, Padang - Sumatera Barat



padang.pom.go.id



BPOM Mobile



[@bbpom_padang](https://twitter.com/bbpom_padang)



[@bbpomdi Padang](https://www.facebook.com/bbpomdi Padang)



[bbpom_padang](https://www.instagram.com/bbpom_padang)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Padang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja dan target kinerja tertuang dalam revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun selanjutnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada Tahun berikutnya.

Padang, 18 Februari 2022
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si., Apt

TIM PENYUSUN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR OT.02.02.3A.3A5.10.21.175 TANGGAL 04 OKTOBER 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Penanggungjawab : Firdaus Umar, S.Si., Apt.
Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm
Sekretaris : Vera Sribanon, S.Si., Apt.
Koordinator : Dra. Armawati Anwar, Apt
Dra. Hilda Murni, Apt., MM
Dra. Fifiyani
Dra. Patria Dehelen, Apt.
Drs. Asrianto, Apt., M.M.
Iswadi, S.Farm., Apt.

ANGGOTA :

1. Dra. Ernanetti, Apt
2. Feri Jonius.S.Si.,M.Si
3. Mutiara Yulanda, S.Farm., Apt.
4. Ardoni, S. Sos
5. Aria Bogorianti Asgul, S. Si, Apt
6. Yelvina, S.Si, Apt
7. Linda Gusrini Fadri, S. Si, Apt, M. Farm
8. Airin Muchlis, S.E.
9. Ray Nando, S.E.
10. Nery Revisa, S.E.
11. Dilla Shavera, S.Si., Apt., M.Biomed.
12. Fitria, S.Si., Apt.
13. Doni Pratama, S.Farm., Apt.
14. Leli Oktavia, S.Farm., Apt
15. Novita Normasari, S.Si., Apt., M.P.H.
16. Rio Mardion, S.H.
17. Hilda Novita, S.H.

ANGGOTA :

18. Nurita Dahlia, S.H.
19. Nining Tridilla Swesty, S.Farm, Apt
20. ThuDessy Cameryta, Apt., M.Farm
21. Mega Asriati Putri, S.Farm., Apt
22. Elza Frasi Yuni, S.Farm., Apt.
23. Hilda, S.Farm, Apt

EDITOR :

1. Yuni Tri Wahyuni, S.Kom., M.Eng.
2. Billy Yunarto, S.Kom.
3. Ade Restu Pahlawan, S.Kom.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	iii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xv
Ringkasan Eksekutif	xii
Highlight	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS	6
1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	18
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021	33
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	32
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	38
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	41

BAB III CAPAIAN KINERJA	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I	48
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II	74
3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III	79
3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV	89
3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V	121
3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI	135
3.1.7 Pencapaian Sasaran Kegiatan VII	143
3.1.8 Pencapaian Sasaran Kegiatan VIII	150
3.1.9 Pencapaian Sasaran Kegiatan IX	158
3.1.10 Pencapaian Sasaran Kegiatan X	163
3.1.11 Pencapaian Sasaran Kegiatan XI	169
3.2 REALISASI ANGGARAN	176
3.3 ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SD DALAM MENCAPAI KINERJA	182
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	118
4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan	6
Gambar 1.3	Peta Wilayah Sumatera Barat	15
Gambar 2.1	Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI	19
Gambar 2.2	Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	19
Gambar 2.3	Peta Strategi Level 2 Loka POM	20
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	43
Gambar 3.2	Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Tahun 2021	50
Gambar 3.3	Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Tahun 2021	51
Gambar 3.4	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Tahun 2021	51
Gambar 3.5	Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Tahun 2021	52
Gambar 3.6	Jumlah Sampel Obat Acak (Terapeutik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Tahun 2021	52
Gambar 3.7	Perbandingan target, realisasi dan capaian presentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan tahun 2020	54
Gambar 3.8	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase obat memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	49
Gambar 3.9	Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun 2021	61
Gambar 3.9	Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Tahun 2021	62
Gambar 3.10	Perbandingan target, realisasi dan capaian presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan tahun 2020	62
Gambar 3.11	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Makanan memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	63
Gambar 3.12	Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Tahun 2021	63
Gambar 3.13	Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Tahun 2021	65
Gambar 3.14	Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Tahun 2021	57
Gambar 3.15	Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Tahun 2021	58

Gambar 3.16	Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapeutik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Tahun 2021	68
Gambar 3.17	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2021 dengan tahun 2020	69
Gambar 3.18	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase obat memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	72
Gambar 3.19	Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Tahun 2021	73
Gambar 3.20	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2021 dengan tahun 2020	76
Gambar 3.21	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase obat memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	77
Gambar 3.22	Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi Tahun 2021	81
Gambar 3.23	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pangan fortifikasi tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	82
Gambar 3.24	Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks kesadaran masyarakat tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019	84
Gambar 3.25	Perbandingan target, realisasi dan indeks kesadaran masyarakat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	85
Gambar 3.26	Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks kepuasan pelaku usaha tahun 2021 dengan tahun 2020	87
Gambar 3.27	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	91
Gambar 3.28	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan tahun 2020	91
Gambar 3.29	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	91
Gambar 3.30	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik tahun 2021 dengan tahun 2020	92
Gambar 3.31	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	93

Gambar 3.32	Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	94
Gambar 3.33	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	69
Gambar 3.34	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Tahun 2021	69
Gambar 3.35	Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	
Gambar 3.36	Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan Gabungan Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	100
Gambar 3.37	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang tahun 2021 dengan tahun 2020	103
Gambar 3.38	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	104
Gambar 3.39	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Tahun 2021	105
Gambar 3.40	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2021	109
Gambar 3.41	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dan Lintas Sektor Tahun 2021	110
Gambar 3.42	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan tahun 2020	111
Gambar 3.43	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	114
Gambar 3.44	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021	115
Gambar 3.45	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi tahun 2021 dengan tahun 2020	102

Gambar 3.46	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	114
Gambar 3.47	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021	115
Gambar 3.48	Perbandingan target, realisasi dan capaian Saranan Produksi tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020	116
Gambar 3.49	Perbandingan target, realisasi dan capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	120
Gambar 3.50	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021	123
Gambar 3.51	Perbandingan target, realisasi dan capaian Sarana Distribusi tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020	124
Gambar 3.52	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	127
Gambar 3.53	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	130
Gambar 3.54	Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dhamasraya	133
Gambar 3.55	Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan tahun 2020	136
Gambar 3.56	Perbandingan target, realisasi dan capaian Ptingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	138
Gambar 3.57	Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 dengan tahun 2020	140
Gambar 3.58	Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	142
Gambar 3.59	Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan tahun 2020	146
Gambar 3.60	Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	153
Gambar 3.61	Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah pasar aman dari bahan	156

berbahaya tahun 2021 dengan tahun 2020

Gambar 3.62	Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	157
Gambar 3.63	Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar Tahun 2021	159
Gambar 3.64	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan tahun 2020	161
Gambar 3.65	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	165
Gambar 3.66	Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Tahun 2021	168
Gambar 3.67	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan tahun 2020	172
Gambar 3.68	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	175
Gambar 3.69	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2021 dengan tahun 2020	178
Gambar 3.70	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	180
Gambar 3.71	Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks RB BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020	183
Gambar 3.72	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	184
Gambar 3.73	Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai AKIP tahun 2021 dengan tahun 2020, 2019 dan 2018	193
Gambar 3.74	Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang tahun 2020 dengan target nasional dan balai setara	194
Gambar 3.75	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dhamasraya	195
Gambar 3.76	Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020	196
Gambar 3.77	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai	197

	setara	
Gambar 3.78	Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan tahun 2020	198
Gambar 3.79	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	199
Gambar 3.80	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Padang yang optimal tahun 2021 dengan tahun 2020	200
Gambar 3.81	Perbandingan target, realisasi dan capaian pemenuhan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	201
Gambar 3.82	Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020	202
Gambar 3.83	Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang tahun 2020 dengan target nasional dan balai setara	203
Gambar 3.84	Perbandingan target, realisasi dan capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020	210
Gambar 3.85	Perbandingan target, realisasi dan capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara	212



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur	11
Tabel 1.2	Profil SDM Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.4	Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16
Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	31
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran. 2021	34
Tabel 2.3	Perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021	
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM Di Padang	42
Tabel 2.5	Kriteria Pencapaian Indikator	41
Tabel 3.1	Nilai Pencapaian Sasaran Balai Besar POM di Padang	42
Tabel 3.2	Perbandingan pencapaian Sasaran Balai yang setara	43
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2021	40
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Balai Besar POM yang Setara	41
Tabel 3.5	Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama	43
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.	44
Tabel 3.7	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021	45
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021	49
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021	45
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021	56
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021	60
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar	67

POM di Padang Tahun 2021

Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III	71
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021	75
Tabel.3.15	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020	79
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021	79
Tabel 3.17	Capaian Sasaran Kegiatan ke IV	83
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021	89
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021	90
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021	97
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021	102
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021	108
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021	113
Tabel 3.24	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V	118
Tabel 3.25	Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021	122
Tabel 3.26	Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021	122
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021	126
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2021	128
Tabel 3.29	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	131
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021	135
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021	136
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di	140

Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021

Tabel 3.33	Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020	143
Tabel 3.34	Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Balai Besar POM di Padang.	151
Tabel 3.35	Capaian Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021	151
Tabel 3.36	Hasil Penilaian AKIP 2021	154
Tabel 3.37	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021	155
Tabel 3.38	Capaian Peresentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Tahun 2020	158
Tabel 3.39	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal Tahun 2021	164
Tabel 3.40	Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Padang	167
Tabel 3.41	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI	170
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021	170
Tabel 3.43	Rincian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang	170
Tabel 3.44	Nilai EKA Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	191
Tabel 3.45	Nilai IKPA Balai Besar POM di Padang Tahun 2021	191
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021	194
Tabel 3.47	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	198
Tabel 3.48	Realisasi Anggaran per Output Tahun 2021	199
Tabel 3.49	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021	200
Tabel 3.50	Nilai efisiensi sasaran kegiatan Tahun 2021	205



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan 2021
2. Perjanjian Kinerja 2021
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
4. Nilai Pencapaian Sasaran Tahun 2021
5. Capaian RAPK Balai Besar POM di Padang Tahun 2021
6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2021
7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Balai Setara

RINGKASAN EKSEKUTIF



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi BPOM. Hasil kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021 diwujudkan dalam 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sesuai dengan revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh 9 sasaran strategis memperoleh capaian “baik”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “tidak dapat disimpulkan” dan 1 sasaran strategis mendapat nilai cukup. Kesebelas sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 103,49% (Baik).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan capaian (NPS) 88,43% (Cukup).
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan capaian (NPS) 99,57% (Baik).
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 104,59% (Baik)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 99,51% (Baik)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 96,88% (Baik).

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan capaian (NPS) 134,41% (Tidak dapat disimpulkan) setelah penyesuaian nilai NPS menjadi 120%
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal Indikator Kinerja nilai Indeks RB dengan capaian 100,04 (Baik)
9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal, dengan capaian (NPS) 102,39(Baik).
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian (NPS) 104,74(Baik).
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel dengan capaian (NPS) 103,23% (Baik). Pada Tahun 2021, Balai Besar POM di Padang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,51 dengan kriteria Baik dibuktikan dengan nilai IKPA 97.25 dan nilai EKA sebesar 87.68.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Padang pada tahun 2021 antara 88,43% sampai dengan 134,41%. Capaian indikator kinerja terendah adalah Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sebesar 88,43% disebabkan belum meratanya masyarakat yang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai obat dan makanan yang aman.

Capaian indikator kinerja tertinggi adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 134,41% disebabkan karena berkas perkara yang diselesaikan melebihi jumlah perkara yang ditargetkan termasuk perkara carry over.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyerap anggaran DIPA Balai Besar POM di Padang sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.41.168.302.154 (empat puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau 99,32% dari total pagu anggaran sebesar Rp.41.448.152.000(empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dari perhitungan efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian target *output*, kegiatan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sudah efisien dengan nilai efisiensi 100%.

BBPOM DI PADANG RAIH PREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DARI KEMENPAN RB



BBPOM di Padang meraih predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB yang diberikan secara daring melalui zoom meeting (20/12/21), diikuti oleh Kepala BBPOM di Padang, Firdaus Umar beserta seluruh pegawai.

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang bertemakan "Making Change, Making History" oleh Kemenpan-RB ini dilaksanakan hybrid, secara luring di Ballroom Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta dan secara daring via Zoom meeting dengan total 558 Satuan Kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Penyerahan apresiasi dan penganugerahan secara simbolis diserahkan oleh Menteri PAN dan RB bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Wakil Ketua OMBUDSMAN RI.

Sebelumnya, BBPOM di Padang telah mendapatkan penghargaan WBK pada tahun 2019 dan selama tahun 2020 hingga 2021 BBPOM di Padang terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Tentunya penghargaan ini diraih tidak lepas dari kerjasama tim dan semangat yang tinggi dari BBPOM di Padang dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan ikhlas sesuai dengan maskotnya yaitu SIYANTI (Siap Melayani Sepenuh Hati) dan SIYANDI (Siap Melayani Dengan Ikhlas). Semoga dengan diraihnya predikat menuju WBBM ini, BBPOM di Padang dapat mempertahankan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kedepannya dapat meraih predikat Pelayanan Prima dari Kemenpan RB.

BBPOM DI PADANG RAIH PENGHARGAAN SATKER TERBAIK TAHUN 2020 DARI KPPN PADANG



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Partisipasi Terbaik Tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang (Selasa, 16/02/21). Kepala BBPOM di Padang, Firdaus Umar menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala Kantor KPPN Padang, Tisari Yona Geumila.

Selain BBPOM di Padang, beberapa satker lingkup kerja KPPN Padang juga menerima penghargaan tersebut baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi dan peningkatan pemahaman mengenai isu-isu terkini pelaksanaan anggaran Tahun 2021.

PENCANANGAN MITRA INTEGRITAS BBPOM DI PADANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT



Balai Besar POM di Padang melaksanakan kegiatan Pencanangan Mitra Integritas BPOM, Kamis (27/5) di The Premiere by Grand Zuri Hotel Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Mitra BPOM di Sumatera Barat yang mana merupakan rekan, stakeholder, pelaku usaha, maupun pengguna jasa layanan di Balai Besar POM di Padang.

Diharapkan dapat membuat hubungan antara BPOM dengan instansi/stakeholder, pelaku usaha maupun masyarakat menjadi semakin dekat dan lebih memahami Standar Pelayanan Publik yang diberikan. Balai Besar POM di Padang sangat membutuhkan masukan, kritikan dan saran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.



Sebagai bentuk apresiasi kepada Mitra BPOM, Kepala Balai Besar POM di Padang Bapak Firdaus Umar S.Si. Apt. memberikan penghargaan "Customer Loyalty" kepada Dir. Reserse Narkoba Polda Sumbar yang secara langsung diterima oleh Wadirnarkoba Polda Bapak Fery Herlambang.

Diharapkan setelah pencanangan ini semua Mitra Integritas BPOM di Sumatera Barat dapat mendukung pelayanan Balai Besar POM di Padang menuju yang lebih baik lagi.



Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Kepala BBPOM di Padang, Firdaus Umar dan Bupati Tanah Datar, Eka Putra di Indo Jolito Batusangkar (10/12/21).

Kesepakatan Bersama ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

PENANDATANGANAN MOU BBPOM DI PADANG DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR



Sesuai Inpres tersebut diinstruksikan kepada pemangku kepentingan baik pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan.

Selain itu juga tertuang di dalam Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang memiliki ruang lingkup berupa koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan



WUJUDKAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN APRINDO SUMATERA BARAT

Kepala BBPOM di Padang, Firdaus Umar, menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Ketua dewan Pimpinan daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sumatera, Rinaldi pada kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Kepada Pedagang dan Ritel Modern di Sumatera Barat yang diadakan di Lhoebuak Cafe Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi pada Selasa (07/12)

MoU tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan dan pembinaan dalam rangka peredaran obat dan makanan di ritel modern di wilayah Sumatera Barat.

TINGKATKAN CAPAIAN VAKSINASI, BBPOM DI PADANG BERSAMA TOKOH MASYARAKAT KOMISI IX DPR RI GANDENG TIM VAKSINASI DALAM KEGIATAN KIE



Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan capaian vaksin cukup rendah. Untuk itu, Balai Besar POM di Padang bersama tokoh masyarakat, Darul Siska, Komisi IX DPR RI gandeng Tim Vaksinasi Batipuh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kabupaten Tanah Datar, Sabtu (07/08).

Kegiatan KIE dan vaksinasi untuk masyarakat ini diadakan di Aula dan ruang kelas SMAN 1 Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.



Dari 393 orang peserta yang hadir pada kegiatan ini, yang berhasil divaksin adalah 311 orang (183 orang di pos Puskesmas Batipuh I dan 128 orang di pos Puskesmas Batipuh II), dan 78 orang tidak dapat divaksin dikarenakan faktor kesehatan yang kurang memadai.

Diharapkan dengan adanya kegiatan KIE sekaligus vaksinasi ini dapat membantu Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan capaian vaksinasi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi sehingga bisa mengajak saudara dan keluarganya untuk segera melakukan vaksinasi.



UMKM BINAAN BBPOM DI PADANG RAIH JUARA 2 "UMKM PANGAN OLAHAHAN TERBAIK TINGKAT NASIONAL"



Pendampingan dan Pembinaan BBPOM Padang menghantarkan UMK pangan Nak Taraso meraih Piagam Penghargaan Juara II UMKM Pangan Olahan Terbaik Tingkat Nasional.

Nak Taraso merupakan perusahaan makanan olahan dengan produk utama yang inovatif yaitu Rendang *for kids* untuk anak dan Rendang *Easy* yang mudah dibawa kemana saja.

PEMUSNAHAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR (TIE) DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL



Substansi Penindakan BBPOM di Padang melakukan pemusnahan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Kota Pariaman pada tanggal 21 Desember 2021 yang dipimpin oleh Koordinator Substansi Penindakan, Dra Patria Dehelen, Apt.

Pemusnahan Obat Tradisional TIE dilakukan oleh pemilik barang disaksikan oleh petugas BBPOM di Padang dan petugas Dinas Kesehatan Kota Pariaman bertempat di Sarana penyimpanan Jamu Pegel Linu Cap Akar Daun milik OS di Kota Pariaman.

Obat Tradisional TIE yang dimusnahkan terdiri dari Jamu Pegel Linu Cap Akar Daun kemasan Botol 600 ml sebanyak 32 dus/@12 btl dan Jamu Pegel Linu Cap Akar Daun kemasan botol 150 ml sebanyak 126 dus/@50 btl. Jamu Pegel Linu Akar Daun berdasarkan Publik Warning Badan POM HM.01.1.2.10.21.45. tanggal 13 Oktober 2021 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Hasil pengawasan Badan POM Juli 2020- September 2021 dengan keterangan Nomor Izin Edar dibatalkan.

Pemusnahan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap peredaran produk obat dan makanan di masa pandemi dimana BPOM mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).



OPERASI PENINDAKAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA PADANG

BBPOM di Padang melakukan operasi penindakan di Kota Padang pada bulan Juni 2021 bersama tim Polda Sumbar dan berhasil menghentikan produksi serta peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar yang beredar di wilayah Sumatera Barat.

Diketahui bahwa produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan dan label sendiri.

Produk kosmetik Tanpa Izin edar ini telah diedarkan hingga keluar provinsi Sumatera Barat. Produk kosmetik tanpa Izin edar telah diamankan oleh petugas di kantor BBPOM di Padang sehingga produk tersebut tidak beredar lagi dan terhadap pelaku usaha, telah dilakukan upaya berupa pemanggilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Tahun 2022 Laboratorium BB/BPOM di seluruh Indonesia akan menerapkan sistem Regionalisasi Laboratorium. Untuk itu perlu dilakukan persiapan baik dari segi Juknis, sampling dan pengujian, pelaporan dan sarana seperti reagensia, suku cadang, alat Laboratorium yang harus memadai.

KOORDINASI DENGAN BBPOM DI PEKANBARU TERKAIT LABORATORIUM REGIONAL



Substansi Pengujian BBPOM di Padang melakukan koordinasi dengan Substansi Pengujian BBPOM di Pekanbaru (28-29/10/21). Pada kunjungan koordinasi dipimpin oleh Koordinator Substansi Pengujian dan beserta staf diterima langsung oleh Kepala BBPOM di Pekanbaru yang menyambut baik kunjungan dan menyampaikan hal hal terkait pelaksanaan Regionalisasi Lab karena BBPOM di Pekanbaru sebagai Pilot Project pada tahun 2021 ini.

BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Padang merupakan Balai Koordinator di Region Sumatera.

Selanjutnya koordinasi dilanjutkan berupa diskusi dengan substansi pengujian di ruang rapat membahas banyak hal terkait alur sampel pengujian dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya Regionalisasi Laboratorium ini akan meningkatkan kinerja dan memingkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan Badan POM

PELATIHAN UJI SAMPEL COVID-19 MENGGUNAKAN PCR DI BBPOM PADANG



Balai Besar POM di Padang tengah mempersiapkan laboratoriumnya agar mampu melakukan uji Covid 19 dengan menggunakan alat Polymerase Chain Reaction (PCR), untuk berperan serta pada penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam uji sampel hasil swab dengan PCR ini dibutuhkan keahlian khusus dari penguji dikarenakan sampel uji adalah sampel yang diduga mengandung virus aktif sebelum dimasukkan ke PCR. Untuk itu BBPOM di Padang menyelenggarakan Pelatihan Uji Sampel Covid-19 menggunakan PCR pada tanggal 24-27 Agustus 2021.

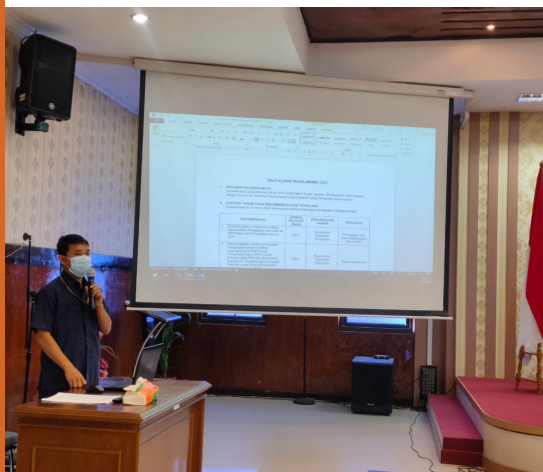


Narasumber pelatihan yaitu Personil Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN), yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menguji sampel swab Covid19.

Pelatihan diikuti oleh tenaga penguji BBPOM di Padang yang berjumlah 15 orang.

Materi yang disampaikan antara lain: Good Laboratory Practice in Covid 19 Detection Laboratory, Prinsip PCR, Alur Pengujian sampel swab covid 19 , observasi laboratorium uji covid dan praktek uji sampel covid 19.

KAJI ULANG MANAJEMEN ISO 17025:2017 BALAI BESAR POM DI PADANG



Pada tanggal 27 Desember 2021 dilaksanakan Kaji Ulang Manajemen (KUM), dihadiri langsung oleh Kepala BBPOM di Padang, Koordinator Substansi Pengujian beserta seluruh personil, Kepala Bagian Tata Usaha beserta perwakilan dari Bagian TU yang terkait lainnya.

16 agenda pokok bahasan pada KUM yaitu di antaranya adalah evaluasi capaian sasaran mutu, realisasi rekomendasi dari KUM yang dilaksanakan tahun 2020, hasil audit internal dan eksternal, bahasan atas isu eksternal dan internal termasuk perubahan kebijakan yang ada, identifikasi resiko, dan topik lainnya. Serta penetapan target capaian untuk tahun 2022 serta rekomendasi untuk peningkatan penerapan SMM pada tahun yang akan datang

KUM Laboratorium merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan. Sistem Manajemen Mutu (SMM) Lab berdasarkan standar ISO 17025:2017 yang dikelola dan diterapkan dengan baik akan menjamin kegiatan pengujian di laboratorium memberikan hasil sesuai kriteria yang ditetapkan. Namun Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala tetap diperlukan untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan, serta mencari solusi atas setiap permasalahan dan menetapkan peluang untuk peningkatannya.

Kepala BBPOM di Padang berpesan, agar seluruh komponen pengujian dan personil dari fungsi lain terkait pengujian, bekerja dengan solid agar tercipta lingkungan pengujian yang tangguh dalam menghadapi tantangan pengujian di tahun yang akan datang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua Renstra Balai Besar POM di Padang 2020-2024 dan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam rnencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/ Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja performance (GAP) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip- prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk Implementasi Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP

diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada level instansi/ Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja harus melaporkan kinerjanya. Hal ini mengingat tujuan Pelaporan Kinerja adalah .

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Manfaat dari Laporan Kinerja adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, BPOM dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk membantu pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.

Wilayah pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota dengan pembagian wilayah kerja pengawasan obat dan

makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok.

Untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya menjadi wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh**, dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya**, dengan wilayah kerja Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

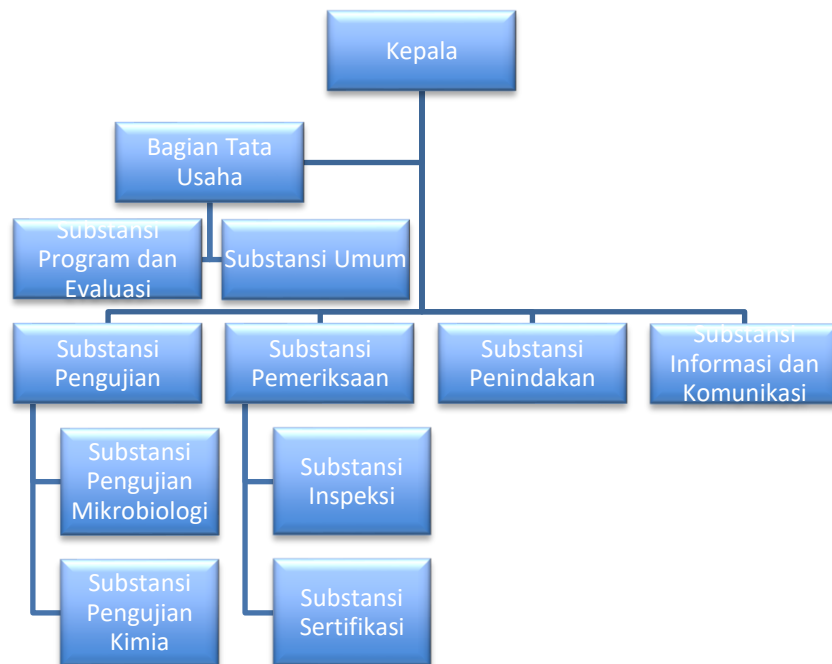
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

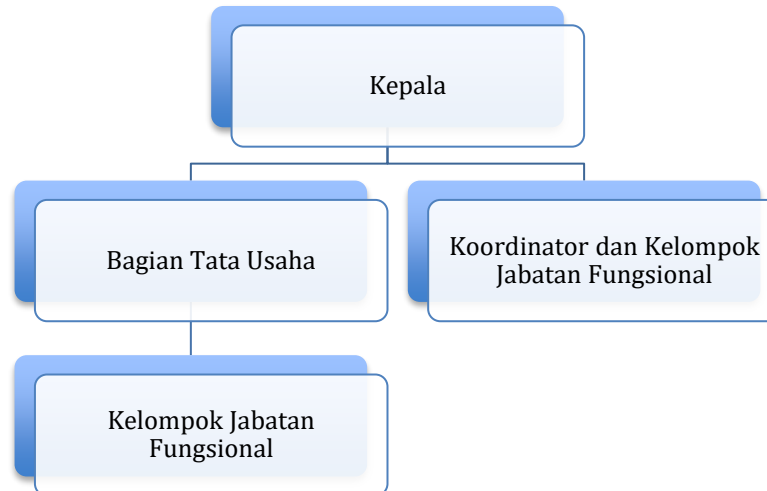
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan, kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi Pratama, jabatan Administrator dan jabatan

pengawas masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan

Tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan adalah Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Regionalisasi Laboratorium

Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrumen dengan teknologi tinggi seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Laboratorium BPOM harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efisiensi dan efektivitas” laboratorium pengujian baik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional (PPPOMN) maupun BB/Balai POM dan Loka POM. Oleh karena itu, mulai tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru, yaitu “Regionalisasi Laboratorium” dengan mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh region yaitu berdasarkan kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet.

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem manajemen yang baru, maka sebelum diterapkan untuk seluruh Balai Besar/Balai POM, tahun 2021 dilakukan *Pilot Project* pada salah satu Region. Evaluasi pelaksanaan *Pilot Project* diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam pengiriman dan penerimaan sampel, pengujian dan pelaporan hasil serta koordinasi; mencari/mendapatkan solusi atas permasalahan atau kendala tersebut dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan penerapan sistem regionalisasi laboratorium secara menyeluruh, sehingga kendala yang terjadi tidak berdampak pada kinerja secara nasional dan tetap dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2022 Regionalisasi Laboratorium akan dilaksanakan, Balai Besar POM di Padang ditetapkan sebagai Balai koordinator pada *region* Padang. Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium akan dilaksanakan secara berkala, agar efektifitas dan efisiensi yang menjadi tujuan dapat tercapai.

2. Pembangunan Laboratorium Mikrobiologi Biomolekuler BSL-2

Suatu organisasi yang baik adalah yang selalu berkembang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan serta kondisi/tuntutan zaman. Demikian pula halnya Laboratorium Balai Besar POM di Padang karena tuntutan terhadap Badan POM yang sangat tinggi untuk dapat berperan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium, termasuk Laboratorium BSL-2 untuk pengujian biomolekuler yaitu pengujian Covid-19 dan pengujian DNA Porcine. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang telah membangun Laboratorium BSL-2 untuk pengujian Covid-19. Laboratorium BSL-2 ini sangatlah diperlukan karena Covid-19 adalah virus yang dapat terkontaminasi dengan penguji. Untuk itu perlu dilakukan analisa risiko dalam melakukan pengujiannya. Dengan adanya Laboratorium BSL-2 maka risiko terkontaminasi oleh virus Covid-19 dapat diminimalisir, dan tentunya dengan bantuan pendukung lainnya. Diharapkan laboratorium BSL-2 ini dapat dimanfaatkan pada tahun 2022.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan.

Pada Tahun 2021 BBPOM di Padang melakukan pengawalan dana DAK Non Fisik Badan POM yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat . Dana DAK Non Fisik Badan POM ini bertujuan agar daerah melaksanakan tugas dan fungsikan dalam pengawasan obat dan makanan hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam kegiatan pengawalan ini melalui kegiatan pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sesuai UU APBN dan Nota Keuangan 2021, terdapat kebijakan baru alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu penambahan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik TA 2021 Bidang Kesehatan.

Pengawalan terhadap pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengawasan fasilitas kefarmasian dan pengawasan makanan minuman industri rumah tangga. BBPOM di Padang sebagai salah satu UPT Badan POM telah melaksanakan koordinasi dengan 19 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk mengawal pengelolaan DAK Nonfisik POM. BBPOM di Padang terlibat langsung sebagai narasumber Bimtek tenaga kefarmasian, Pelatihan Keamanan Pangan IRTP, dan DFI, program KIE masyarakat maupun dukungan informasi dan konsultasi melalui whatsapp grup di media .

4. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Padang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) berpedoman pada SK Menpan RB nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran RB 2020-2024 yaitu adalah Birokrasi yang bersih, akuntabel, capable dan pelayanan publik. Pada tahun 2019 BBPOM di Padang meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada tanggal 20 Desember 2021 meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Implementasi RB yang dilakukan Balai Besar POM dalam rangka mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Padang terhadap 6 faktor pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Padang menuju WBBM.

5. Pendampingan UMKM di Sumatera Barat

Povinsi Sumatera Barat menyatakan komitmen untuk mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ikut terdampak oleh pandemi Covid-19. Meskipun demikian sektor UMKM tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM di Sumbar yang saat ini terdata hingga 590 ribu unit dengan berbagai macam jenis usaha.

BBPOM di Padang turut serta melaksanakan sejumlah program strategis dalam pengembangan UMKM di Sumbar berupa pendampingan izin edar produk obat dan makanan. Pendampingan dimulai dari penyiapan denah bangunan ruang produksi, bimbingan terhadap penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB hingga proses pendaftaran produk UMKM di aplikasi. Pendampingan ini dilaksanakan dengan menerapkan program si jempol (siap jemput bola) sehingga layanan dapat dipercepat dan pelaku usaha merasa puas karena petugas akan langsung melakukan pembinaan ke sarana produksi.

BBPOM di Padang juga melakukan kegiatan pendampingan UMKM yang bersinergi dengan pemda dan instansi terkait, seperti pembinaan pelaku usaha pangan dengan Dinas Perindustrian Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi, Dinaskerin Kota Padang, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang serta dinas lainnya. Dengan dilaksanakannya bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha maka akan dapat menaikkan daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

6. Kandungan Bisfenol A (BPA) dalam Air Minum dalam Kemasan (AMDK)

Adanya Isu yang beredar tentang Bisfenol A (BPA) dalam kemasan galon Polikarbonat (PC) bahwa Bisfenol A (BPA) adalah senyawa kimia pembentuk plastik jenis Polikarbonat (PC). BPA berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi melebihi batas maksimal yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Batas migrasi maksimal BPA adalah sebesar 0,6 bagian per juta (bpj, mg/kg) sesuai ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Pengawasan yang dilakukan meliputi penilaian terhadap sarana produksi, evaluasi terhadap produk, label dan kemasan, konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan *sampling* serta pengujian laboratorium.

Hasil *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap kemasan galon AMDK jenis polikarbonat yang dilakukan pada Tahun 2021, menunjukkan adanya migrasi BPA dari kemasan galon sebesar rata-rata 0,033 bpj. Nilai ini jauh di bawah batas maksimal migrasi yang telah ditetapkan Badan POM, yaitu sebesar 0,6 bpj. Selain itu, Badan POM juga melakukan pengujian cemaran BPA dalam produk AMDK. Hasil uji laboratorium (dengan batas deteksi pengujian sebesar 0,01 bpj) menunjukkan cemaran BPA dalam AMDK tidak

terdeteksi. Berdasarkan hasil pengujian baik migrasi maupun cemaran BPA dalam AMDK, serta kajian dari pakar, dapat disimpulkan bahwa penggunaan plastik jenis PC sebagai kemasan galon AMDK masih aman digunakan oleh masyarakat.

Kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat dapat mempengaruhi keamanan pangan. Untuk itu Pemerintah telah mewajibkan industri Kemasan menerapkan peraturan terkait Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang yang ditetapkan dan diawasi oleh Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik. Hasil pengujian terhadap BPA dari penggunaan plastik jenis PC sebagai kemasan galon masih dinyatakan aman.

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target *output* yang akan dicapai.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adalah perubahan Organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka telah dilakukan review terhadap Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi sesuai Surat keputusan Kepala balai besar POM di padang Nomor PR.04.01.3A.3A5.12.21.278 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024

1.6 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.6.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang di dukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang per 31 Desember 2021 adalah 110 orang dengan rincian Jumlah Pegawai berdasarkan umur, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Umur

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Umur

Umur	Jumlah
20 - 24 Th	1
25 - 29 Th	13
30 - 34 Th	20
35 - 39 Th	20
40 - 44 Th	14
45- 49 Th	16
50 - 60 Th	26
Total	110

b. Golongan

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan I d	1
2.	Golongan II a	2
3.	Golongan II b	4
4.	Golongan II c	1
5.	Golongan II d	2
6.	Golongan III a	18
7.	Golongan III b	20
8.	Golongan III c	12
9.	Golongan III d	26
10.	Golongan IV a	14
11	Golongan IV b	8
12.	Golongan IV c	2
	Total	110

Tabel 1.3. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	11
2.	Apoteker	36
3.	S1 Biologi	2
4.	S1 lain	31
5.	D3	16
6.	SMF	6
7.	SMAK	1
8.	SLTA Umum	6
9.	SLTA Kejuruan	0
10	SLTP	1
Total		110

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2021, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNPN Sebanyak 38 Orang. Terdiri atas Kelompok Substansi Pengujian 8 (Sembilan) Orang , Kelompok Substansi Pemeriksaan 2 (dua) Orang , Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi 3 (Tiga) Orang, Bagian Tata Usaha 23(Dua Puluh Tiga) Orang dan Kelompok Substansi Penindakan 1 (satu) Orang.

2. Sarana Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seluas 3167 m2 sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Salah satu solusi pengembangan bangunan Balai Besar POM di Padang adalah dengan renovasi bangunan menjadi bertingkat atau pindah lokasi. Saat ini bangunan kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang digunakan seluas 3186 m2.

Rumah dinas Kepala Balai Besar POM di Padang terletak tidak jauh dari lokasi kantor dengan luas 147,1 m². Tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas tersebut sejak tahun 2018 juga telah bersertifikat atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Untuk 2 (dua) UPT yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya yang sejak dibentuk pada bulan September tahun 2018 yang lalu masih menggunakan sarana bangunan dengan status sewa. Sarana dan prasarana Loka POM di Payakumbuh menggunakan gedung kantor pinjaman dari Pemda setempat. Sejak tanggal 4 November 2019 Loka POM di Payakumbuh telah pindah ke lokasi kantor lebih luas yaitu menggunakan bangunan Universitas Andalas dengan status pinjam pakai selama 2 tahun, sedangkan Loka POM di Dharmasraya menggunakan gedung kantor rumah toko dengan status sewa pakai.

3. Sarana Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2011 Balai Besar POM di Padang mendapatkan bantuan infrastruktur TIK dari Pusdatin BPOM salah satunya adalah seperangkat alat *Video Conference* yang digunakan untuk melakukan *Video Call* dengan BPOM dan Balai Besar POM/Balai POM di seluruh Indonesia sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Setiap tahunnya dilakukan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK di Balai Besar POM di Padang. Peningkatan *e-government* setiap tahun menuntut pekerjaan berbasis teknologi informasi menggunakan beberapa aplikasi/sistem informasi yang dibangun baik oleh internal Balai Besar POM di Padang sendiri ataupun dari eksternal, dan terus di *update*. Hal ini menyebabkan kebutuhan internet pun makin tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2017, Balai Besar POM di Padang menambah jaringan internet menggunakan ISP (*Internet Service Provider*) *Speedy Indihome* 100 Mbps.

Pada Tahun 2019, Pusdatin memutus langganan VPN untuk semua BB/BPOM, dan menyerahkan kepada masing-masing BB/BPOM untuk berlangganan internet ke ISP yang tersedia di daerah masing-masing. BBPOM di Padang sendiri memutuskan berlangganan dengan ASTINET (telkom) berkapasitas 10 Mbps dan 1 IP publik. Selain itu Balai Besar POM di Padang juga memiliki beberapa server diantaranya *Proxy Server*, *Storage Server*, *Network Management Sistem (NMS) Server* dan *MRTG Web Server* yang berada di ruang server dan dikelola oleh tim TI Balai Besar POM di Padang.

Selama pandemi, BBPOM di Padang lebih banyak menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk berkomunikasi atau pertemuan dengan BPOM pusat, ataupun stakeholder terkait. Selain itu

BBPOM di Padang juga mempunyai media sosial seperti Instagram, twitter, Facebook dan Youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan pada Tahun 2021 BBPOM di Padang membangun aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi) untuk kebutuhan layanan publik agar bisa diakses oleh customer BBPOM di Padang dimana saja dan kapan saja.

4. Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Balai Besar POM di Padang senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid. Pada tahun 2021 untuk pemenuhan standar laboratorium pengadaan peralatan laboratorium di Balai Besar POM di Padang sebanyak 1 (satu) unit alat pendukung dan 8 (delapan) unit alat utama melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

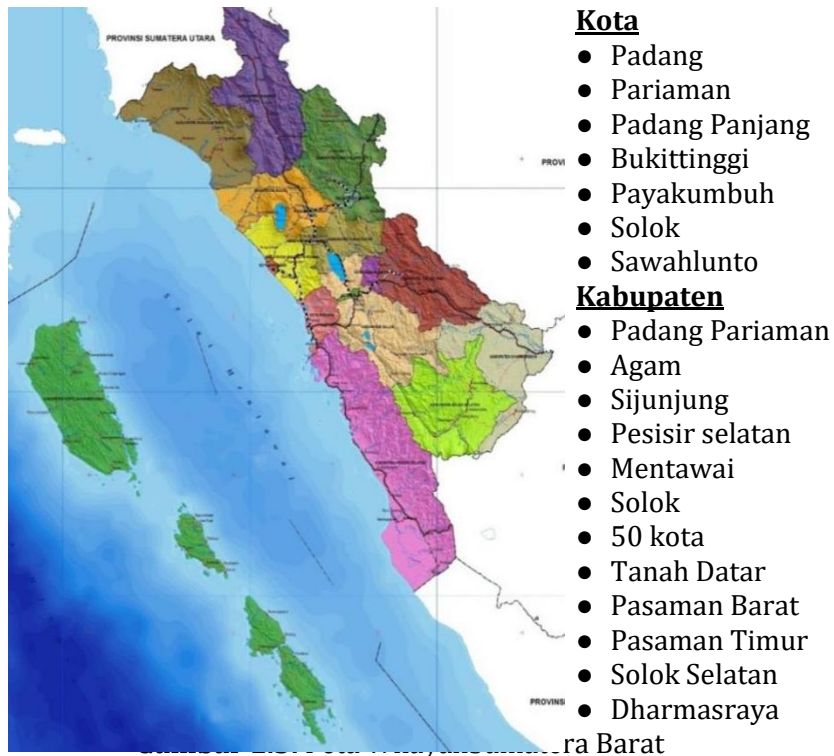
6. Pagu Anggaran Tahun 2021

Anggaran pada awal tahun yang disediakan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 No SP DIPA-063.01.2.432810/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.45.920.455.000. Selama tahun 2021 telah dilakukan beberapa kali revisi DIPA sehingga anggaran menjadi Rp.41.448.152.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.18.400.491.000,- Belanja Barang Rp.18.923.701.000,- dan Belanja Modal Rp.4.123,960,000,- dengan realisasi anggaran Rp.41.168.302.154,- atau 99.32%.

1.6.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat
 - A. Wilayah Kerja

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.252,24 km², yang merupakan *catchment area* dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Dharmasraya.



Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

B. Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kab / Kota

Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Loka POM di Payakumbuh serta Loka POM di Dharmasraya meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota.

Tabel 1.4. Tabel Jumlah Sarana Distribusi dan Sarana Produksi Obat dan Makanan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA		
		Padang	Payakumbuh	Dharmasraya
Sarana Distribusi		Padang	Payakumbuh	Dharmasraya
1.	PBF	38	4	0
2.	Apotek	461	170	47
3.	Toko Obat	195	98	72
4.	Klinik	108	24	19
5.	Rumah Sakit	53	12	5
6.	Puskesmas	192	60	27
7.	GFK	14	4	2
8.	Distribusi Makanan	1449	501	222
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	506	274	127
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	424	80	195
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3932	1227	718
Sarana Produksi		Padang	Payakumbuh	Dharmasraya
1.	Industri Farmasi	1	0	0
2.	Unit Transfusi Darah	1	0	0
3.	Industri Obat Tradisional	1	0	0
4.	UMOT	1	1	1
5.	UKOT	1	0	0
6.	Industri Kosmetik	4	2	0
7.	Industri Makanan (MD)	38	22	3
8.	PIRT	2323	1428	154
TOTAL SARANA PRODUKSI		2370	1454	159

BAB II

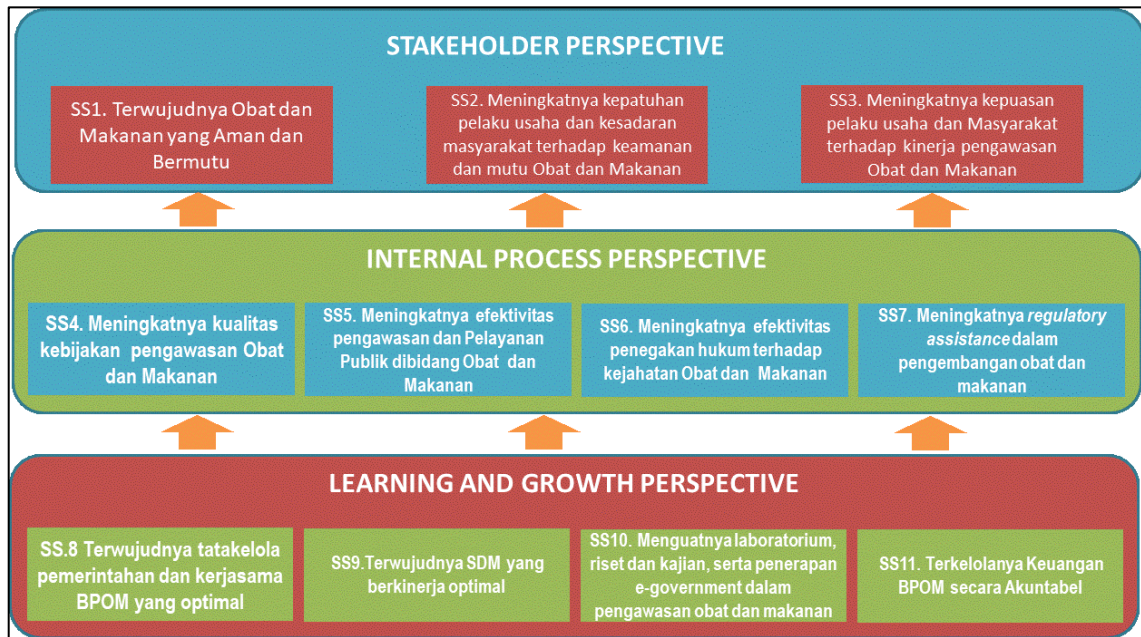
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

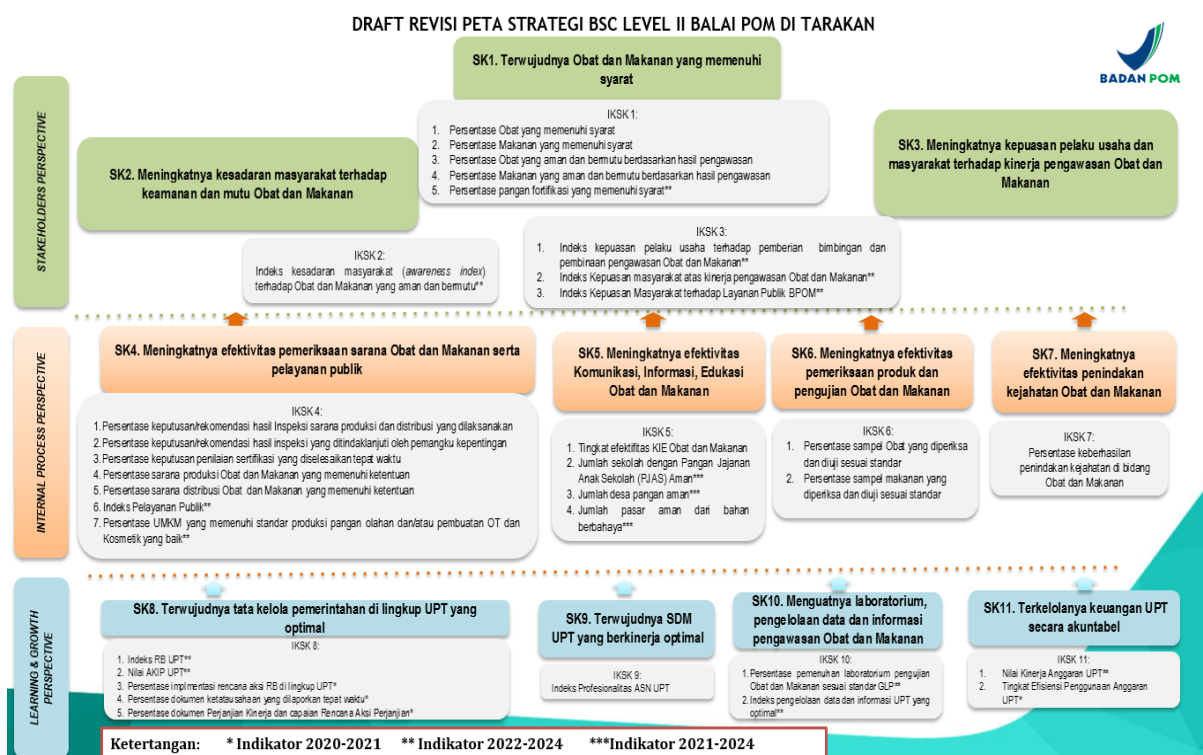
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategi yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Sumatera Barat. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

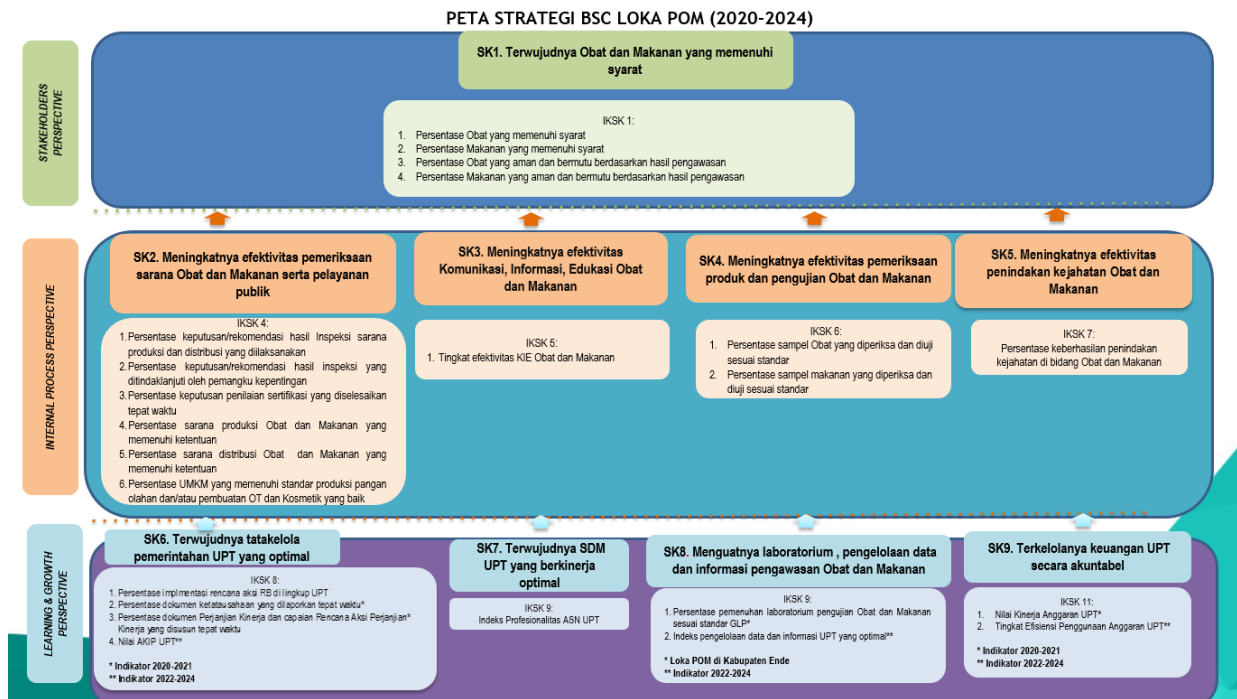
Renstra 2020-2024 Balain Besar POM di Padang telah dilakukan revisi sesuai sesuai Surat keputusan Kepala balai besar POM di padang Nomor PR.04.01.3A.3A5.12.21.278 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024.



Gambar 2.1. Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan keamanan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokras / BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Rincian Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat keputusan Kepala balai besar POM di padang Nomor PR.04.01.3A.3A5.12.21.278 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Peta Strategi Balai Besar POM di Padang sebagai berikut :

A. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Padang tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk

diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 91,5% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 91,5% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan dengan target 90% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan,

khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Padang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Padang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan dengan target sebesar 85,9 pada akhir tahun 2024.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 80,01 pada akhir tahun 2024.
3. Indeks kepuasan, masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target sebesar 92 pada akhir tahun 2024.

B. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu,

diharapkan Balai Besar POM di Padang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Padang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Padang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Padang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 99% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 75 % pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 99,5% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 75% pada akhir tahun 2024.
6. Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 pada akhir tahun 2024.
7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan kosmetik yang Baik dengan target sebesar 81 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu

melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah :

1. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dengan target sebesar 98,3% pada akhir tahun 2024.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebanyak 125 sekolah pada akhir tahun 2024.
3. Jumlah desa pangan aman dengan target sebanyak 46 desa pada akhir tahun 2024.
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 15 pasar pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk.

Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil

pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembandingan yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Padang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Padang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU)nya :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 96% pada akhir tahun 2024.

C. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Padang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar POM di Padang. Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Padang berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai Besar POM di Padang agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Padang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Padang diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 86,2 pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 84,3 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang dengan target sebesar 84,6 di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Padang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik,

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat

dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Padang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Padang

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP sebesar 92% pada akhir tahun 2024.
2. Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal dengan target sebesar 3 pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga menjadi salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Padang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

Nilai kinerja anggaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan target sebesar 95,5% pada akhir tahun anggaran 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal 9. Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel
-------------------	--

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai Besar POM di Padang untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Padang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang No. PR.04.01.3A.3A.512.21.278 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Padang yang merupakan revisi dari RKT sebelumnya. RKT revisi ini menyesuaikan dengan target revisi Renstra 2020-2024. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai Besar POM di Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 telah dilakukan revisi sesuai dengan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020-2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI PADANG

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	84

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	dan bermutu	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67
		Indeks Pelayanan Publik	4,35
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,2
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	79,8
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,7
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengawasan Obat dan Makanan	standar GLP	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93

Adapun perbedaan antara PK periode Januari sd Oktober 2021 dengan PK revisi November sd Desember 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3 Perubahan target kinerja pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	INDIKATOR AWAL	TARGET AWAL	INDIKATOR REVISI	TARGET REVISI	KETERANGAN
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,5	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,5	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	Penurunan target disebabkan realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	95	Target baru ditetapkan di tahun 2021
6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
7	Indeks kepuasan pelaku	87	Indeks kepuasan pelaku	82,7	Penurunan target disebabkan

NO	INDIKATOR AWAL	TARGET AWAL	INDIKATOR REVISI	TARGET REVISI	KETERANGAN
	usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,87	Penurunan target disebabkan realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	Adanya sedikit perubahan target, sesuai exercise pusat
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	Tidak ada perubahan target
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	Indeks Pelayanan Publik	4,35	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
16	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,54	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	Tidak ada perubahan target
18	Jumlah desa pangan aman	18	Jumlah desa pangan aman	18	Tidak ada perubahan target

NO	INDIKATOR AWAL	TARGET AWAL	INDIKATOR REVISI	TARGET REVISI	KETERANGAN
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	Tidak ada perubahan target
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Target ditetapkan 100 sesuai arahan MenPan RB
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Target ditetapkan 100 sesuai arahan MenPan RB
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
23	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,2	Penurunan target disebabkan realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
24	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	79,8	Penurunan target disebabkan realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,7	Peningkatan target disebabkan realisasi 2020 melebihi target yang ditetapkan
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	Penurunan target disebabkan realisasi 2020 dibawah target yang ditetapkan
27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	Tidak ada perubahan target
28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92,5	Penurunan target sesuai dengan exercise pusat
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	Tidak ada perubahan target

Evaluasi Kinerja pada bulan Januari sd Oktober menggunakan target awal, pada bulan November sd Desember 2021 evaluasi kinerja sudah sesuai dengan target IKU pada reuiu Renstra 2020-2024, dimana terjadi penyesuaian target dengan baseline realisasi kinerja Tahun 2020.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk memantau pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala maka telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Padang. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK juga telah dilakukan revisi sesuai revisi Perjanjian Kinerja dan reuiu Renstra 2020-2024.

Tabel.2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM Di Padang

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,5	85,5	85,5	85,5	Rp 227.472.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,5	85,5	85,5	85,5	Rp 12.985.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	Rp 227.472.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	Rp 12.985.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	95	95	95	95	Rp.30.678.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	84	84	84	Rp.444.161.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	82,7	82,7	82,7	82,7	Rp.96.126.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,87	73,87	73,87	73,87	Rp.1.967.250.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90	90	90	90	Rp.1.434.080.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98	98	98	Rp.360.653.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	Rp.364.805.250
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	Rp.96.126.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	56	56	56	Rp.51.008.750
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	Rp.690.345.000
		Indeks Pelayanan Publik				4,35	Rp.314.131.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
		Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang					
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94	94	94	Rp.1.885.580.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	40	70	40	Rp.603.883.000
		Jumlah desa pangan aman	10	40	75	18	Rp.360.390.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	40	70	6	Rp.229.590.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	40	75	100	Rp.1.609.760.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	35	70	100	Rp.1.617.229.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	30	50	93	Rp.509.950.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				83,2	Rp.500.053.000
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				79,8	Rp.144.956.300
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				83,7	Rp.280.723.400
10	Menguatnya	Persentase pemenuhan				77	Rp3.473.758.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
	laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP					
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2	2	2	Rp.126.860.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	45	50	60	92,5	Rp.22.541.345.500
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Efisien (93 %)	Rp.1.233.793.500

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk:

- 1) Sebagai *review* dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) sebagai berikut :

- a. NPS per Sasaran = $\{ \% \text{capaian indikator}_1 + \% \text{capaian indikator}_2 + \dots \% \text{capaian indikator}_n \} / n$
 1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran maka NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
 2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indicator NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
 3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%
- b. NPS per Perspektif = $\{ \% \text{capaian sasaran}_1 + \% \text{capaian sasaran}_2 + \dots \% \text{capaian sasaran}_n \} / n$
 Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.
- c. NPS Total = $\{ \text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3 \} / 3$

NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021, No. PR.04.01.93.931.12.20.189 tanggal 14 Desember 2020 dan revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang tanggal 8 November 2021, Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 telah direalisasikan dengan baik yang terdiri dari Stakeholder perspective, Internal Process perspective dan Learning and grow perspective dengan 11 (sebelas) sasaran kegiatan.

Kinerja Balai Besar POM di Padang mengacu kepada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC). Hasil perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. Pembahasan dan analisis capaian kinerja mengacu pada PK revisi Balai Besar POM di Padang yang mengacu dengan Revisi Renstra Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Padang 2020-2024.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total Balai Besar POM di Padang adalah 101,67% mendapatkan kriteria Baik dengan rincian NPS setiap perspective sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Balai Besar POM di Padang

NO	PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS	NSP	NSP PENYESUAIAN	KRITERIA
1	Stakeholder Perspective	97,16	97,16	Baik
2	Internal Process Perspective	108,85	105,24	Baik
3	Learning and Growth Perspective	102,60	102,60	Baik
	Total	102,87	101,67	Baik

Bila dibandingkan dengan Balai lain yang sejenis yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka Nilai Pencapaian Sasaran yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang(103,78) diikuti oleh Balai Besar POM di Samarinda(102,47), Balai Besar POM di Padang(101,67) dan Balai Besar POM di Yogyakarta (94,24). Rincian perspective sasaran strategis masing-masing Balai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan pencapaian Sasaran Balai yang setara

NO	PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM DI PADANG	CAPAIAN BBPOM DI YOKYAKARTA A	CAPAIAN BBPOM DI SEMARANG	CAPAIAN BBPOM DI SAMARINDA A
1	Stakeholder Perspective	97,16	97,81	104,12	103,27
2	Internal Process Perspective	105,24	89,35	104,53	100,62
3	Learning and Growth Perspective	102,60	95,56	102,70	99,79
	Total	101,67	94,24	103,78	102,47

Untuk meningkatkan pencapaian nilai NPS ini perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang optimal dan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan kinerja dalam rangka evaluasi kinerja. Upaya perbaikan perlu dilaksanakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dan peningkatan data kinerja yang mampu terukur dan andal juga harus dilakukan serta dilengkapi data dukung yang akurat.

Pencapaian perspective sasaran strategis diperoleh dari capaian sebelas sasaran kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	NILAI CAPAIAN SASARAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA
	Stakeholder Perspective	97,16	97,16	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	103,49	103,49	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	88,43	88,43	Cukup
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	99,57	99,57	Baik
	Internal Process Perspective	97,16	97,16	

4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	104,59	104,59	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	99,51	99,51	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	96,88	96,88	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	134,41	120,00	Tidak dapat disimpulkan
Learning and Growth Perspective		108,85	105,24	
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	100,04	100,04	Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	102,39	102,39	Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	104,74	104,74	Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	103,23	103,23	Baik

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja Balai Besar POM yang setara, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda, diperoleh hasil seperti tabel berikut :

Tabel. 3.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM yang Setara

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN BBPOM DI PADANG	CAPAIAN BBPOM DI YOKYAKARTA	CAPAIAN BBPOM DI SEMARANG	CAPAIAN BBPOM DI SAMARINDA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	103,50	91,01	92,83	107,04
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	88,43	106,21	116,07	99,13
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	99,57	96,21	103,46	103,63

	Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang				
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	104,59	101,80	103,13	100,62
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	99,51	100,26	102,71	104,84
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	96,88	97,16	100	96,04
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	134,41	58,17	112,28	115,98
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	100,04	99,26	100,41	98,05
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	102,39	98,96	95,29	100,28
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	104,74	95,39	111,38	100,22
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	103,23	88,62	103,72	100,61

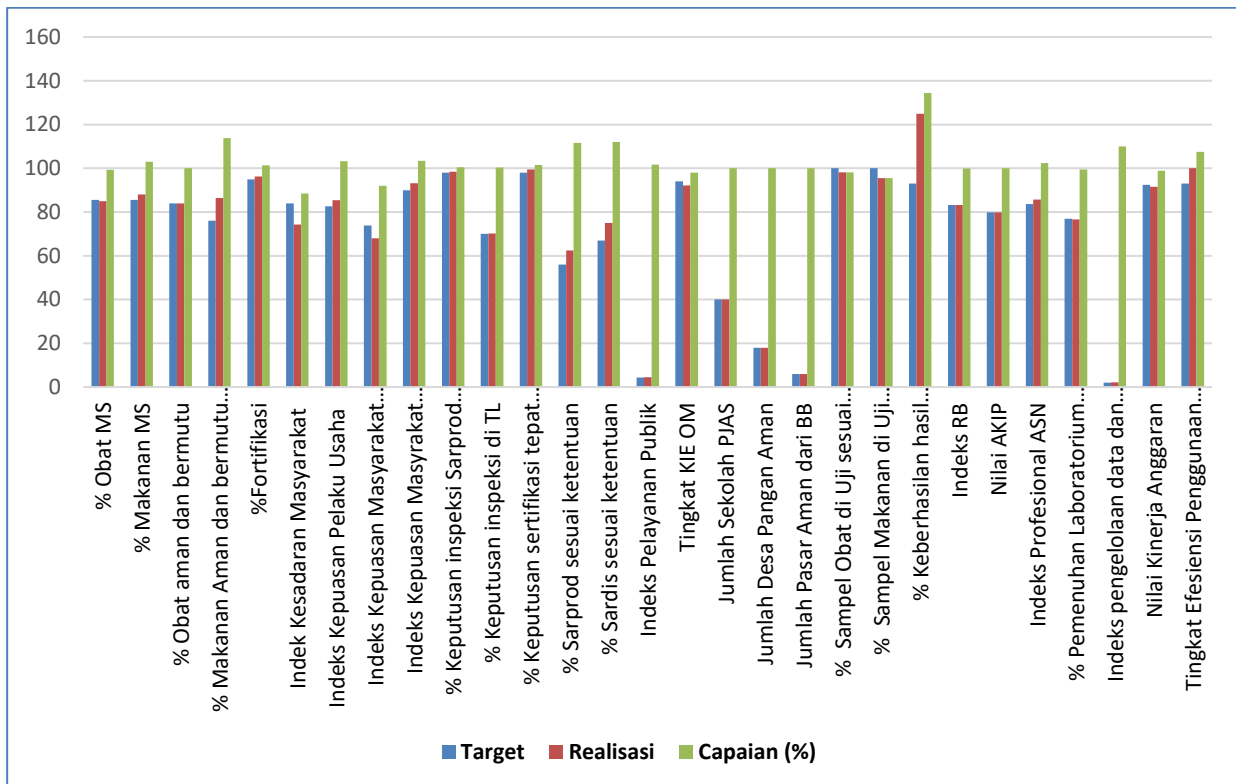
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 3.5. di bawah ini:

Tabel 3.5. Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,50	84,94	99,35
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,50	88,03	102,96
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84,01	100,02
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	86,51	113,83
		5.	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95	96,25	101,32
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	84	74,28	88,43
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,70	85,40	103,26
		8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,87	67,93	91,96
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	93,13	103,48
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98,42	100,43
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70,21	100,30
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,51	101,54

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	62,50	111,61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	75,07	112,05
		15. Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,42	101,61
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	92,15	98,03
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100
		18. Jumlah desa pangan aman	18	18	100
		19. Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	6	6	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,18	98,18
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95,58	95,58
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93	125	134,41
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	23. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,2	83,17	99,96
		24. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	79,80	79,90	100,13
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,70	85,70	102,39
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	76,60	99,48

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2,2	110,00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92,5	91,51	98,93
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	100	107,53



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 4 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 23 indikator dengan kriteria baik, 1 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta 1 indikator dengan kriteria cukup. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut.

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG**

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,49% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,50	84,94	99,35	Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,50	88,03	102,96	Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84,01	100,02	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	86,51	113,83	Sangat Baik
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95	96,25	101,32	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji.

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk (Obat / Makanan) beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Tabel 3.7 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021

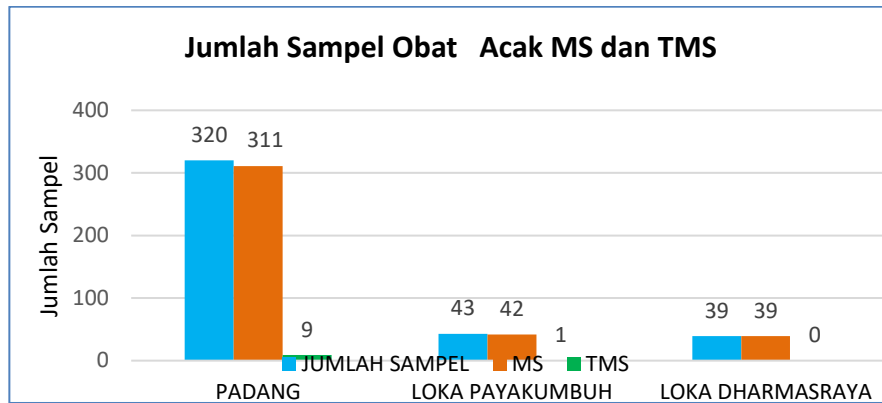
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	85,50	84,94	99,35	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

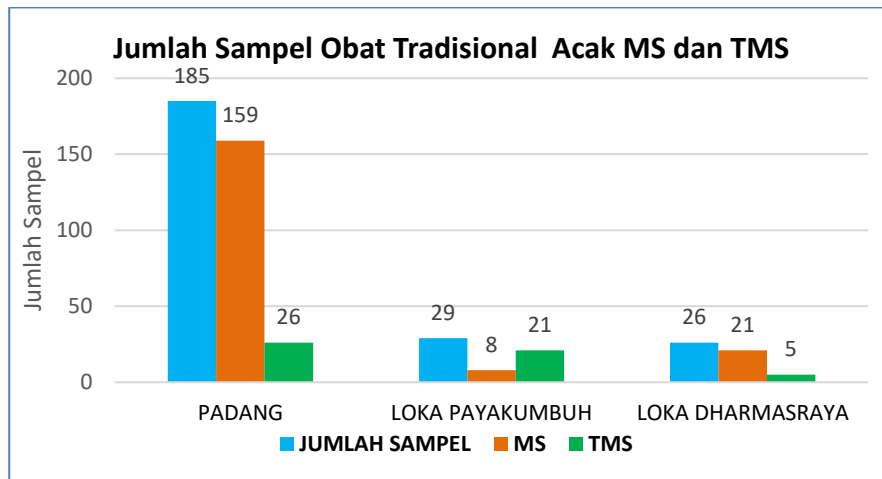
Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 84,94% bila dibandingkan dengan target 85,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 99,35% dan mendapatkan kriteria baik dengan rincian 184 sampel tidak memenuhi syarat (15,06%) dari 1222 sampel yang selesai diuji pada tahun 2021.

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 184 sampel terdiri dari sampel Obat sebanyak 10 sampel, Obat Tradisional sebanyak 52 sampel, Suplemen Kesehatan sebanyak 18 sampel dan Kosmetik sebanyak 104 sampel.

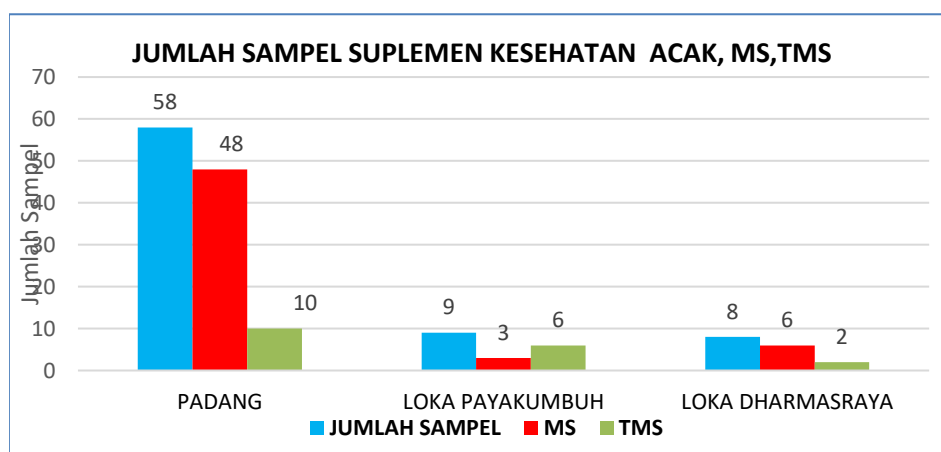
Rincian Sampel Obat acak yaitu komoditi Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



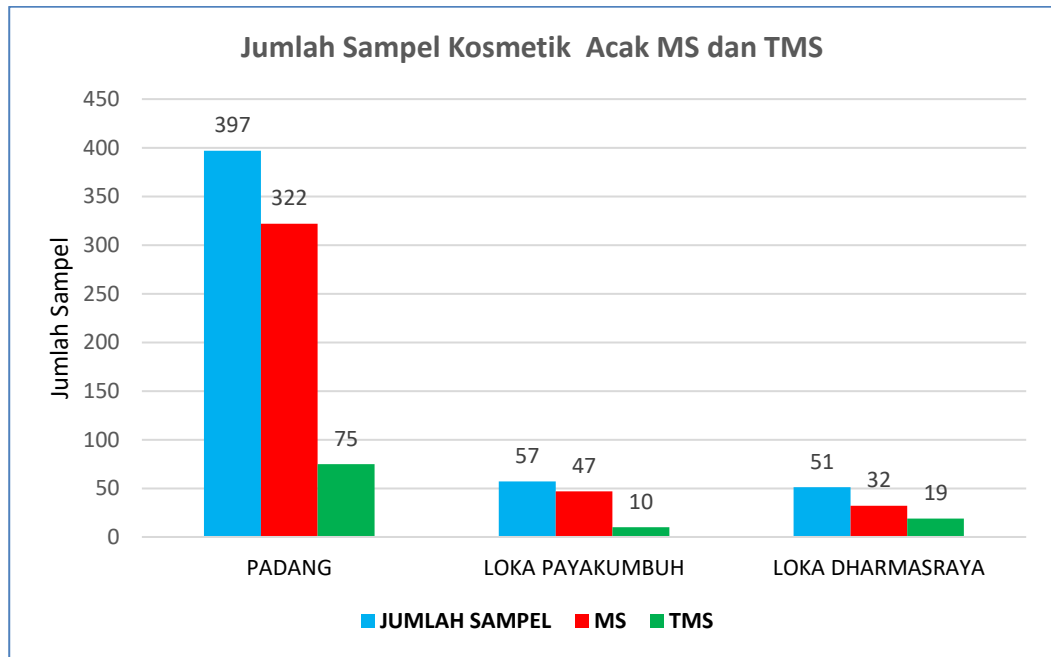
Gambar 3.2. Jumlah Sampel Obat Acak MS dan TMS Tahun 2021



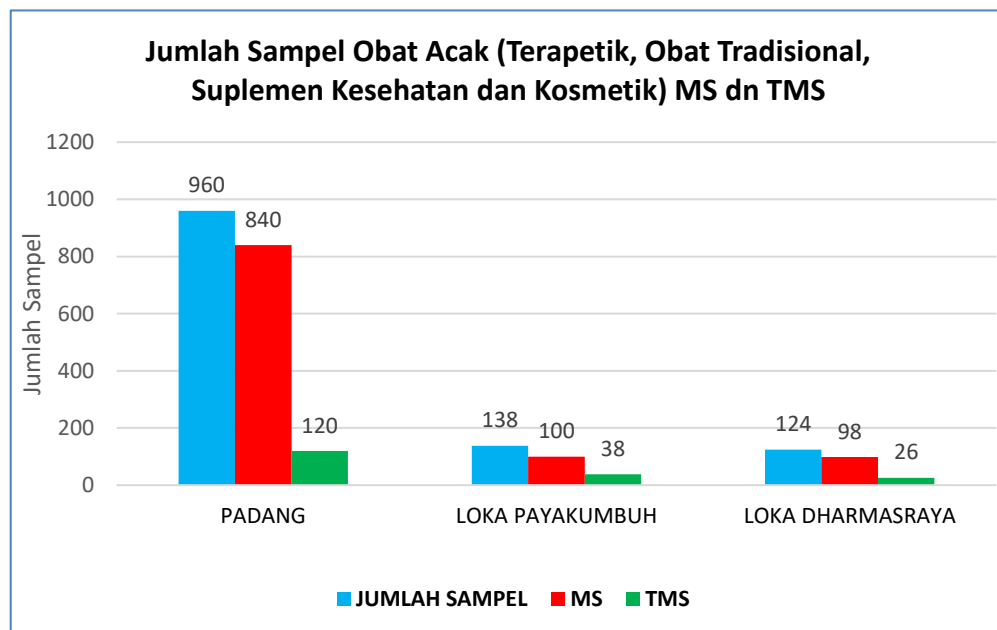
Gambar 3.3 Jumlah Sampel Obat Tradisional Acak MS dan TMS Tahun 2021



Gambar 3.4 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Acak MS dan TMS Tahun 2021



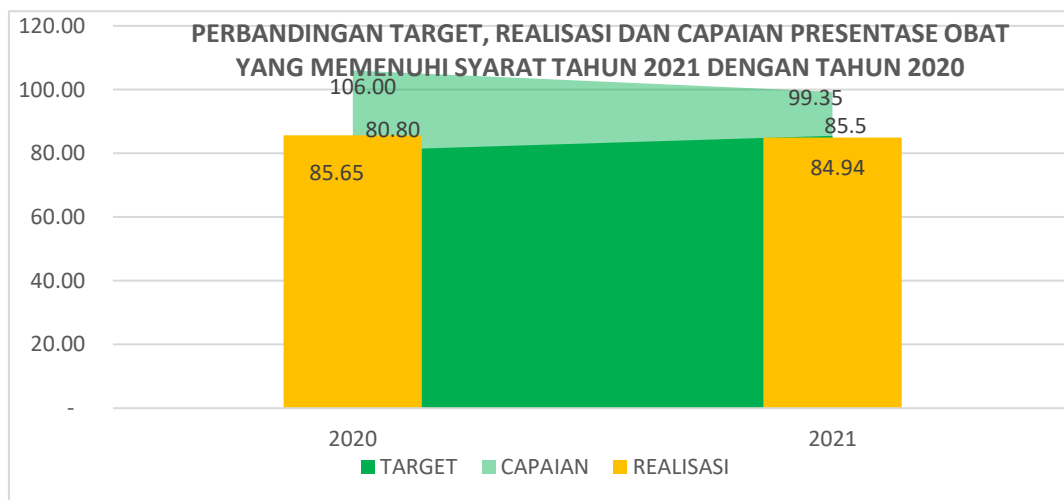
Gambar 3.5 Jumlah Sampel Kosmetik Acak MS dan TMS Tahun 2021



Gambar 3.6 Jumlah Sampel Obat Acak (Terapeutik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) MS dan TMS Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,65 maka terjadi penurunan yang tidak significant sebesar 0,71% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 yaitu sebesar 106,00% maka terjadi penurunan 6,65% . Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari tahun 2020 yang nilainya 80,8 % menjadi 85,5 % pada tahun 2021.



Gambar 3.7 Perbandingan target, realisasi dan capaian presentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan tahun 2020

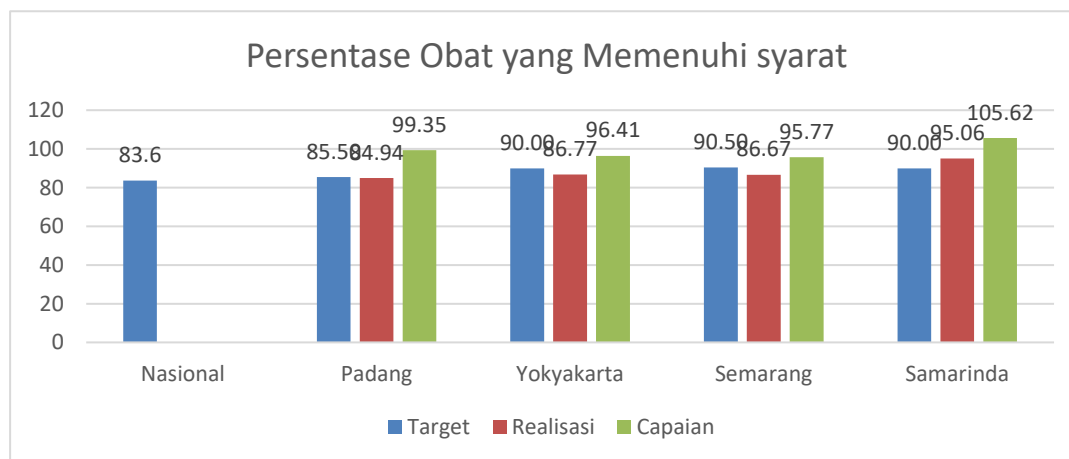
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase Obat yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,5%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian yang diperoleh adalah 92,83%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase Obat yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 83,6, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 101,61 (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda dengan realisasi 95,06% diikuti oleh Balai Yokyakarta (86,77%), Semarang (86,67%) dan Padang (84,94%). semua Balai yang berada dalam 1 kluster telah mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.8 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase obat memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Kurang konsistennya pelaku usaha produksi dalam menerapkan cara produksi yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan/penandaan kemasan produk yang telah ditetapkan.
- Kurang konsistennya pelaku usaha distribusi dalam menerapkan cara distribusi yang baik
- Pengawasan terhadap peredaran produk-produk Tanpa Izin Edar dan penarikan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat kurang optimal

- d. Pengetahuan Masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi belum merata

Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan BBPOM di Padang untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat :

- a. Melakukan Sampling dan pengujian obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan
- b. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian penandaan secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang secara berkesinambungan
- d. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Melakukan penelusuran terhadap produk-produk Tanpa Izin Edar dan produk -produk yang tidak memenuhi syarat yang ditemukan beredar di wilayah kerja BBPOM di Padang
- f. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2021 yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan sampling dilakukan di Kabupaten/Kota terpilih yang telah dilakukan pengacakan termasuk sarana yang terpilih.
- c. Penilaian penandaan / label mempengaruhi kesimpulan akhir dari hasil pengujian sampel. Penilaian penandaan / label dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label pada masing-masing komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Kegiatan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan dengan metode sampling secara acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Untuk Variasi/ jenis produk dan jumlah produk yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk

produk obat dan kosmetik masih dapat terpenuhi namun untuk sampel obat tradisional dan suplemen kesehatan jenis dan jumlahnya masih terbatas.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan tahun 2021
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan kemasan secara rutin setiap bulan
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan evaluasi sampling setiap bulan terhadap sampling yang dilakukan dan juga kendala dalam pelaksanaan sampling yang dihadapi
- b. Melakukan sampling sesuai dengan SOP sampling yang telah ditetapkan
- c. Memberikan pemahaman yang sama terhadap petugas sampling yang melakukan sampling.

Loka POM di Dharmasraya :

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi agar dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan

- d. Meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk Tanpa Izin Edar dan produk -produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran
- e. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu
- f. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
- g. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang mempengaruhi hasil pengujian sampel yang telah dilakukan tahun ini, sehingga selanjutnya kendala ini dapat dihindari.
- b. Melakukan penilaian penandaan / label sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi serta bimtek yang diberikan oleh pusat.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM dan fungsi pengujian Balai Besar POM di Padang
- b. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan melakukan kegiatan KIE untuk masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Dharmasraya

B. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.
- Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

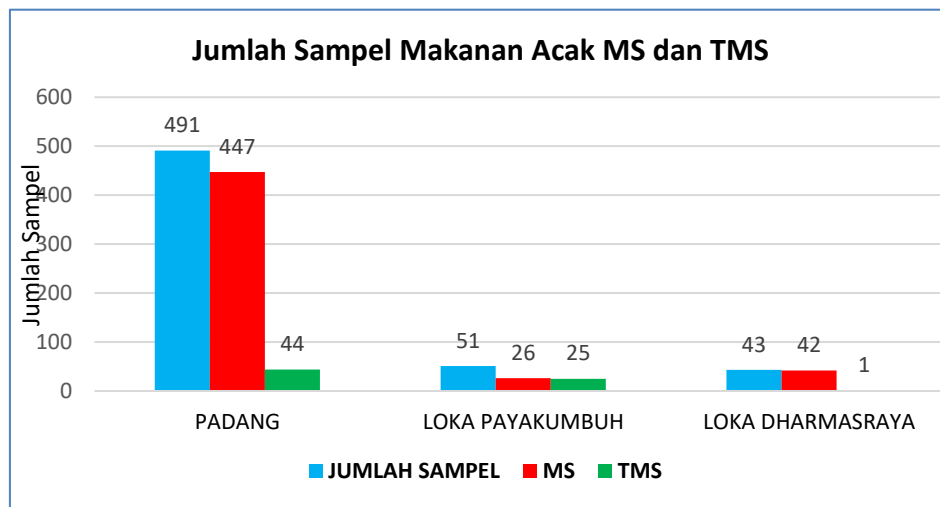
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,50	88,03	102,96%	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan tahun 2021 adalah 88,03%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 85,5%, maka capaian Balai Besar POM di Padang adalah 102,96% dengan kriteria baik. Rincian jumlah yang memenuhi syarat adalah 515 sampel dan tidak memenuhi syarat sebanyak 70 sampel dari 585 sampel yang selesai uji pada tahun 2021

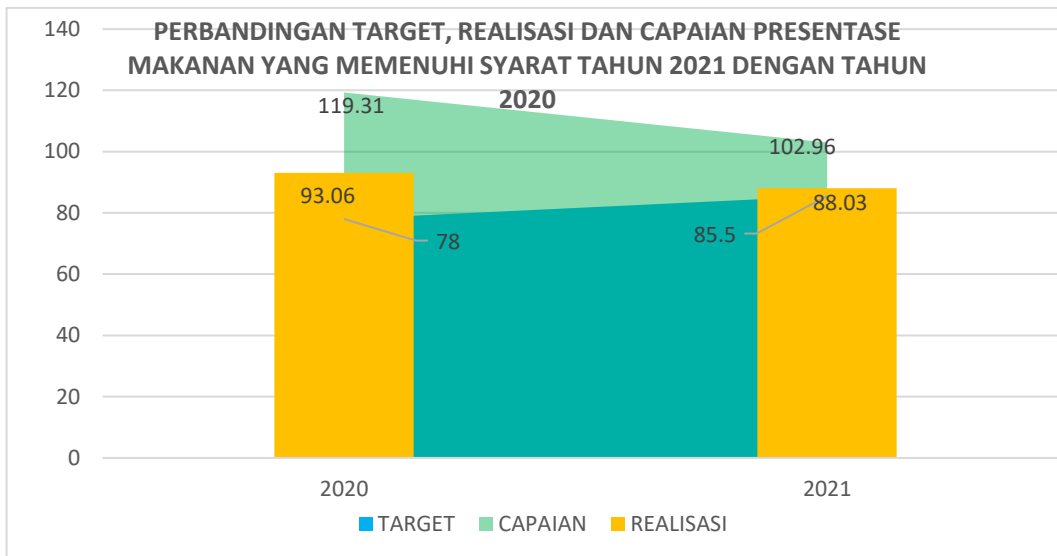
Rincian Sampel pangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.9 Sampel Makanan Acak MS dan TMS Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 yaitu sebesar 93,06% maka terjadi penurunan 5,03% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 yaitu sebesar 119,33% maka terjadi penurunan sebesar 16,35% . Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan target pada tahun 2021 ini yaitu 85,5 % dan kenaikan jumlah sampel yang tidak memenuhi persyaratan



Gambar 3.10 Perbandingan target, realisasi dan capaian presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan tahun 2020

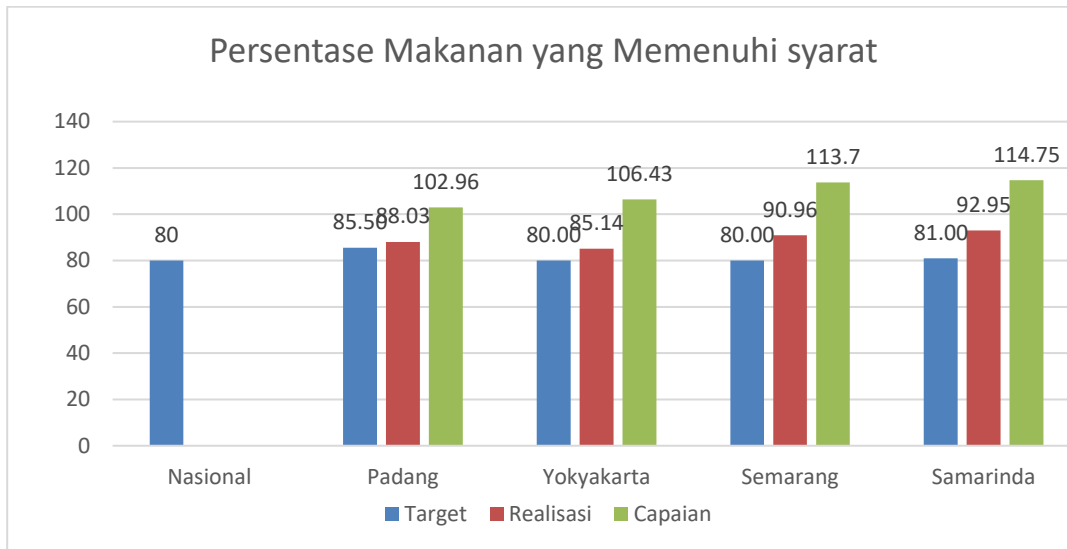
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 91,5%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 96,21%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 80 maka bila dibandingkan dengan target nasional capaian yang diperoleh 110,04 (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda dengan realisasi 92,95% diikuti oleh Balai Besar POM di Semarang(90,96%), Padang (88,03%) dan Yokyakarta(85,14%). Semua Balai yang berada dalam 1 kluster telah mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.11 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Makanan memenuhi syarat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kurang konsistennya pelaku usaha produksi dalam menerapkan cara produksi yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan/penandaan kemasan produk yang telah ditetapkan.
- b. Kurang konsistennya pelaku usaha distribusi dalam menerapkan cara distribusi yang baik

Upaya - upaya nyata yang telah dilakukan BBPOM di Padang untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat :

- a. Melakukan Sampling dan pengujian produk pangan olahan dan kemasan pangan sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan
- b. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian penandaan secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang berada diwilayah kerja BBPOM di Padang secara berkesinambungan
- d. Kegiatan e registrasi pangan olahan untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha
- e. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang

- f. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan Tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas produk pangan olahan yang aman dan bermutu

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pelaksanaan sampling makanan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling Tahun 2021 yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian penandaan / label yang tidak memenuhi ketentuan mempengaruhi kesimpulan akhir dari hasil pengujian sampel.
- c. Penilaian penandaan / label dilakukan sesuai dengan juknis penilaian label Pangan.
- d. Penanganan sampel telah dilakukan dengan baik, terutama untuk sampel yang memerlukan penanganan khusus, seperti produk beku yang akan mempengaruhi hasil uji.

Loka POM di Dharmasraya :

Kegiatan sampling makanan secara acak dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, keterbatasan variasi/jenis dan jumlah produk di sarana memungkinkan untuk disampling produk yang sama di tiap tahunnya.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan tahun 2021
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan kemasan secara rutin setiap bulan
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan sampling sesuai SOP sampling yang sudah ditetapkan

- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sampling yang telah dilakukan

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Koordinasi yang dilakukan dengan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang secara rutin tiap bulannya.
- b. Kegiatan sampling mengikuti kaidah pada prioritas pedoman sampling

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi untuk dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk Tanpa Izin Edar dan produk -produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran
- e. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu
- f. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
- g. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan koordinasi dengan pusat dan Balai Besar POM di Padang terkait kendala sampling.
- b. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sampling yang telah dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Meningkatkan koordinasi antar Loka POM dan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang
- b. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan melakukan kegiatan KIE untuk masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Dharmasraya
- c. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**
Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted obat MS}}{\text{Total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji.
- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Obat beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan
- Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021

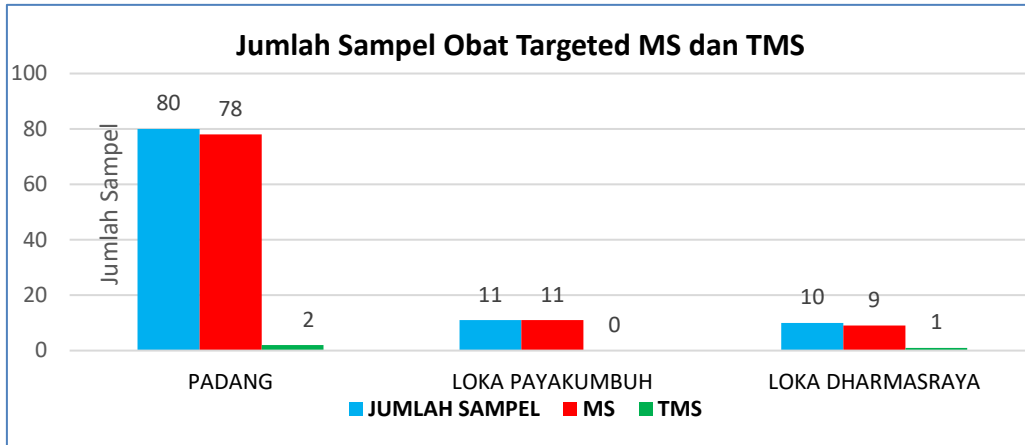
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84.01	100,02	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

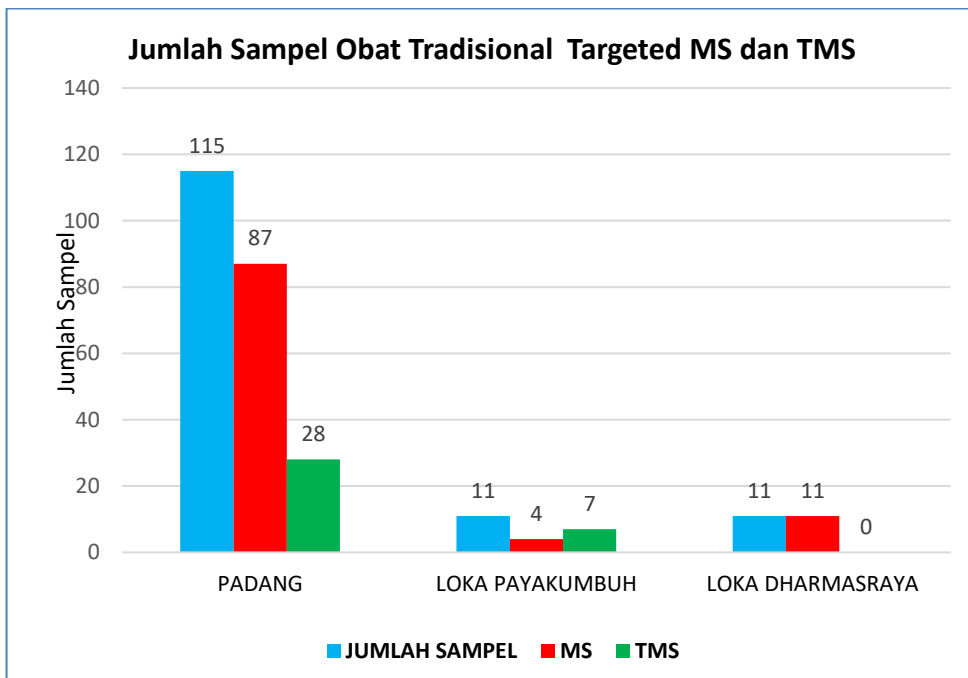
Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 adalah 84,01% , bila dibandingkan dengan target 84%, maka capaian tahun 2021 adalah 100,02% dengan kriteria baik. Dari sebanyak 538 sampel yang diuji pada tahun 2021 sebanyak 452 sampel memenuhi syarat dan 86 sampel tidak memenuhi syarat.

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 86 sampel terdiri dari sampel Obat sebanyak 3 sampel, Obat Tradisional sebanyak 35 sampel, Suplemen Kesehatan sebanyak 6 sampel dan Kosmetik sebanyak 42 sampel.

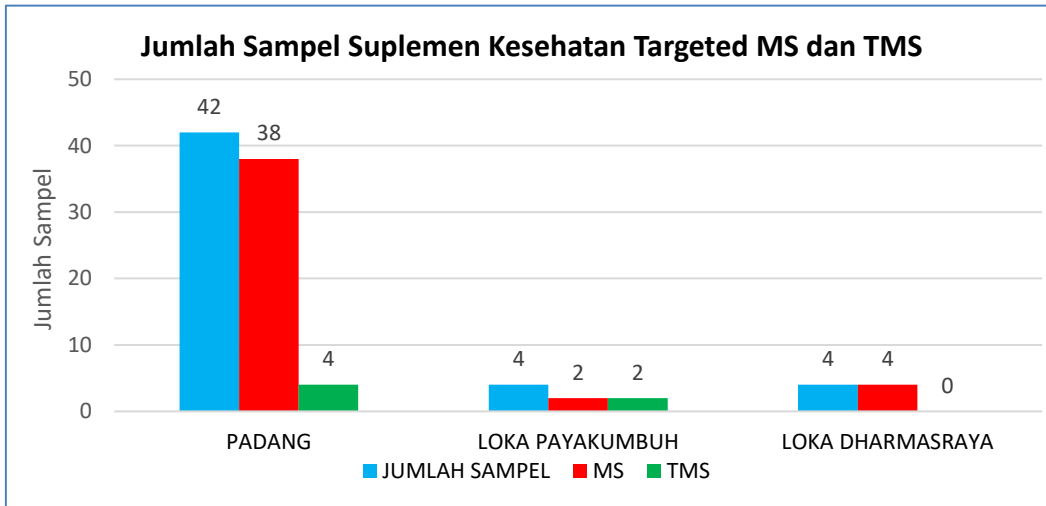
Rincian Sampel targeted Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



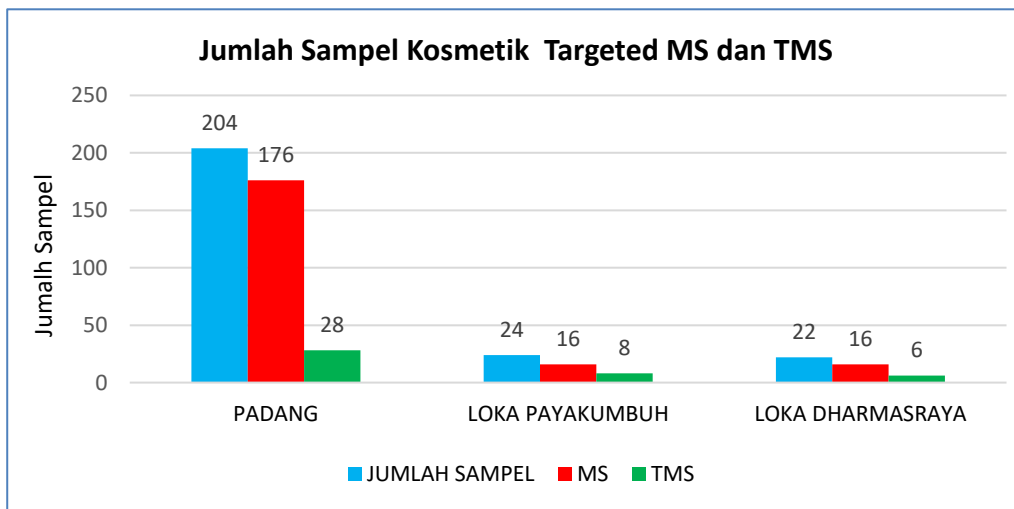
Gambar 3.12 Jumlah Sampel Obat Targeted MS dan TMS Tahun 2021



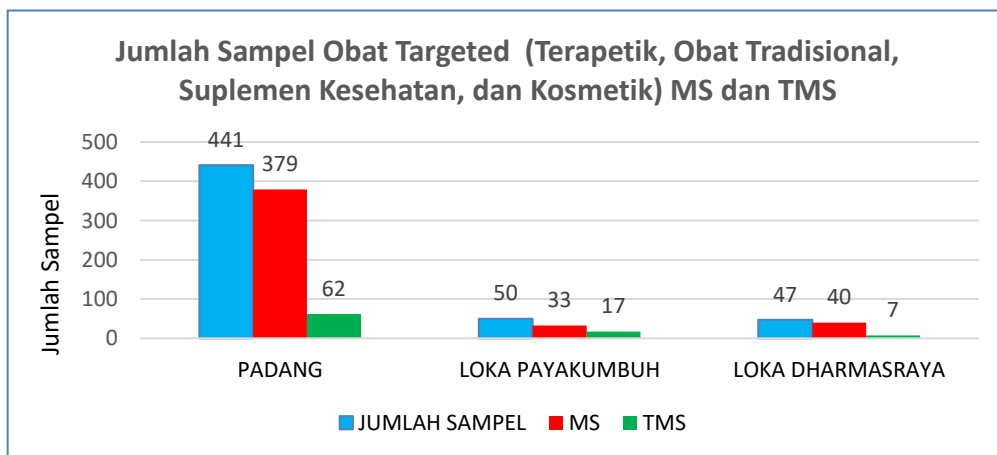
Gambar 3.13 Jumlah Sampel Obat Tradisional Targeted MS dan TMS Tahun 2021

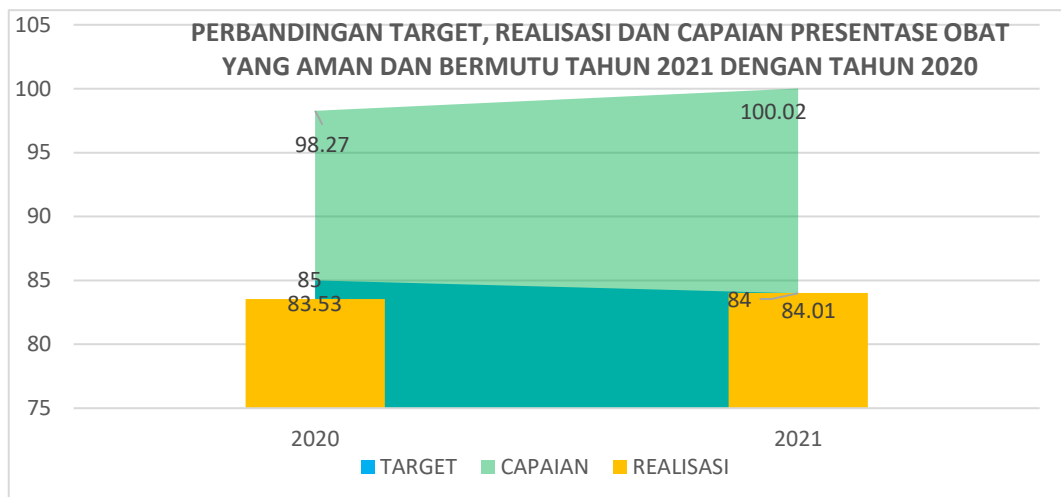


Gambar 3.14 Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan Targeted MS dan TMS Tahun 2021



Gambar 3.15 Jumlah Sampel Kosmetik Targeted MS dan TMS Tahun 2021





Gambar 3.16 Jumlah Sampel Obat Targeted (Terapeutik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) MS dan TMS Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 yaitu sebesar 83,53% maka terjadi kenaikan 0,48% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 yaitu sebesar 98,27% maka terjadi kenaikan 1,75%. Hal ini disebabkan karena menurunnya target dari tahun 2020 sebesar 85 % dan semakin sedikit sampel yang tidak memenuhi syarat.

Gambar 3.17 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

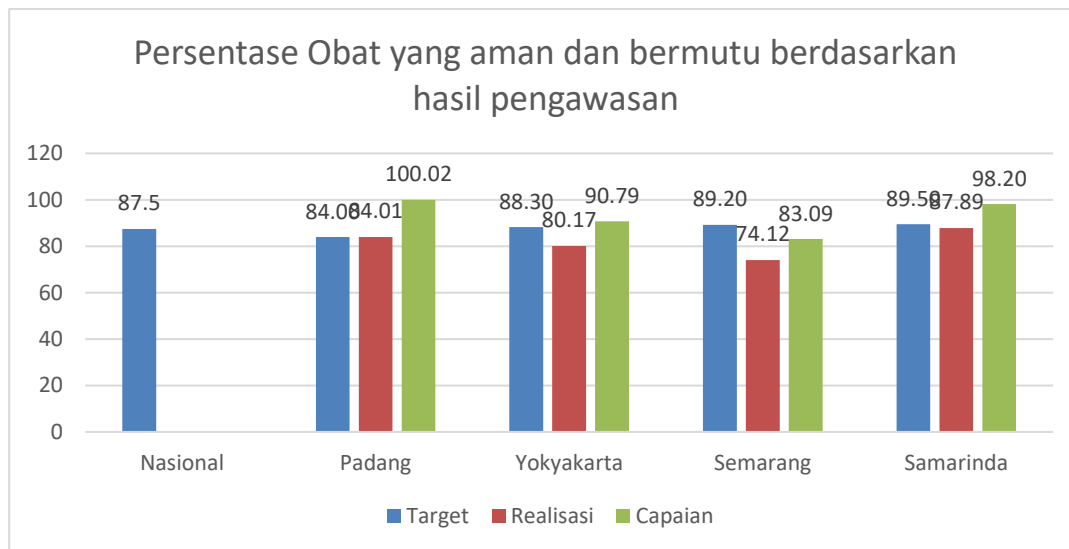
Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 90%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 93,35%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase Obat yang memenuhi syarat adalah 87,5, maka realisasi Balai Besar POM di Padang belum mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 96,02(baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda (87,89%) diikuti oleh Balai Padang (84,01%), Yokyakarta (80,17%) dan

Semarang(74,12%). Balai Besar POM di Samarinda telah mencapai IKU BPOM, sedangkan BBPOM di Padang, BBPOM di Yokyakarta dan BBPOM di Semarang belum mencapai target IKU BPOM



Gambar 3.18 Perbandingan target, realisasi dan capaian erbandingan target, realisasi dan capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Kurang konsistennya pelaku usaha produksi dalam menerapkan cara produksi yang baik serta masih adanya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan/penandaan kemasan produk yang telah ditetapkan.
- Kurang konsistennya pelaku usaha distribusi dalam menerapkan cara distribusi yang baik
- Pengetahuan Masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi belum merata

Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan BBPOM di Padang untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu :

- Melakukan Sampling dan pengujian obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan
- Melaporkan hasil sampling, pengujian dan penilaian penandaan secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang berada diwilayah kerja BBPOM di Padang secara berkesinambungan

- d. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi
- f. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021 pada sarana yang ditetapkan.
- b. Penilaian penandaan / label produk dilakukan sesuai dengan pedoman atau juknis dari pusat.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Pengawasan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan dengan metode targeted dimana kegiatan sampling yang dilakuakn terhadap produk berdasarkan analisa risiko. Dari total sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang di sampling secara targeted terdapat 7 sampel yang tidak memenuhi syarat, dimana didominasi oleh sampel kosmetik, selain hasil uji evaluasi penandan juga mempengaruhi hasil pengujian akhir dari sampel tersebut.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan tahun 2021
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penadaan kemasan secara rutin setiap bulan
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan sampling sesuai dengan SOP sampling yang sudah ada.

- b. Melakukan evaluasi sampel secara rutin dan mengidentifikasi kendala dalam sampling.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. koordinasi yang dilakukan dengan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang secara rutin tiap bulannya.
- b. Kegiatan sampling mengikuti kaidah sesuai prioritas pedoman sampling

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi untuk dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan
- d. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu
- e. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
- f. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Petugas sampling diberikan pemahaman yang sama terkait sampling yang dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2021.
- b. Melakukan evaluasi dan identifikasi kendala dalam pelaksanaan sampling
- c. Petugas yang melakukan evaluasi penandaan /label mengikuti Bimtek dan Sosialisasi dari pusat terkait penilaian label produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan suplemen Kesehatan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang

D. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menggunakan rumus sbb :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted makanan MS}}{\text{Total sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji}}$$

- Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel makanan targeted yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.
- Sampel targeted adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survey produk beredar berdasarkan kerangka sampling targeted/purpose di tahun berjalan.
- Kriteria Makanan tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

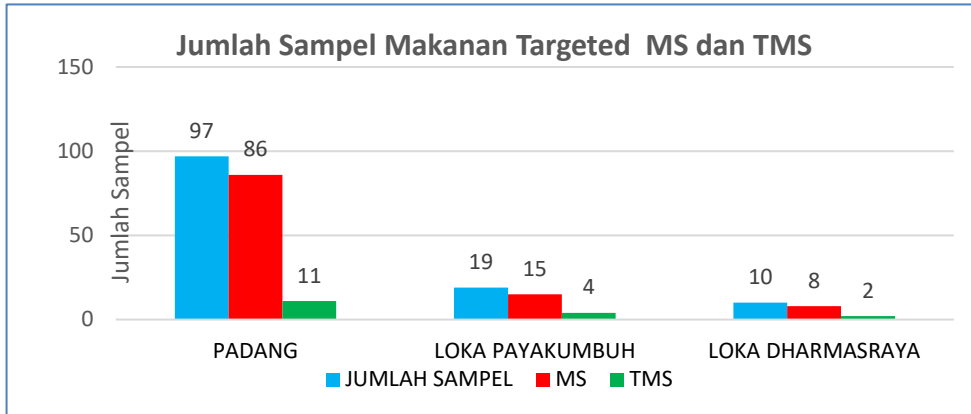
Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	86,51	113,83	Sangat baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 adalah 86,51%. Apabila dibandingkan dengan target 76% maka persentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 86,51% dengan kriteria sangat baik. Rincian hasil uji adalah 17 sampel tidak memenuhi syarat dan 109 sampel memenuhi syarat dari total 126 sampel yang selesai diuji pada tahun 2021.

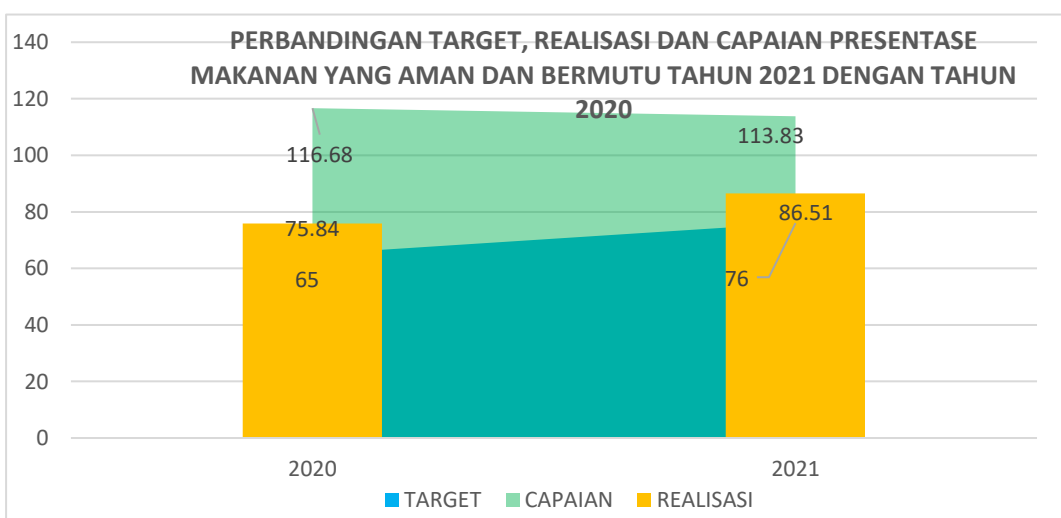
Rincian Sampel makanan acak yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk sampling yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.19 Jumlah Sampel Makanan Targeted MS dan TMS Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realiasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,84 maka terjadi kenaikan 10,67% dan bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020 yaitu sebesar 116,68% maka terjadi penurunan 2,85%. Kenaikan realisasi yang diikuti dengan turunnya persentase capaian karena terjadinya kenaikan target 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM di Padang 2020-2024. Target pada tahun 2020 adalah 65 % dan target pada tahun 2021 adalah 76 %



Gambar 3.20 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2021 dengan tahun 2020

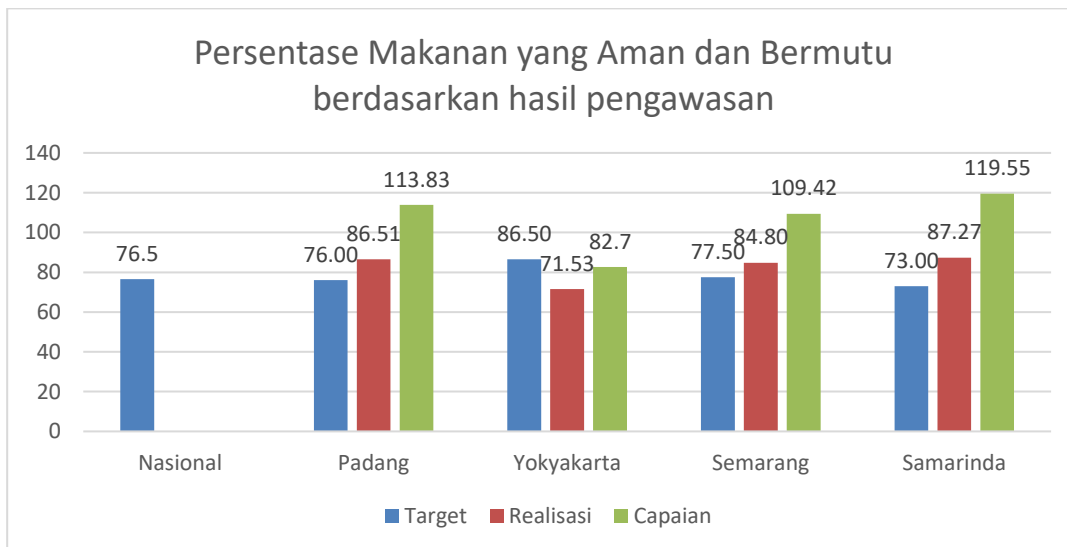
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 81%, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target akhir Resntra 2020-2024, dengan nilai capaian 106,80 dengan kriteria baik dan diharapkan dapat dipertahankan pada tahun tahun berikutnya

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 76,5, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 113,08(baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda (87,27%) diikuti oleh Balai Besar POM di Padang (86,51%), Semarang (84,80%) dan paling rendah BBPOM di Yokyakarta (71,53%). Balai Besar POM di Samarinda, BBPOM di Padang dan BBPOM di Semarang telah mencapai IKU BPOM, hanya BBPOM Yokyakarta yang belum mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.21 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan € tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan Kinerja atas indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Yang Mana disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kurang konsistennya pelaku usaha produksi dalam menerapkan cara produksi yang baik.
 - b. Kurang konsistennya pelaku usaha distribusi dalam menerapkan cara distribusi yang baik
- Upaya -upaya nyata yang telah dilakukan BBPOM di Padang untuk mencapai target kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan :

- a. Melakukan Sampling dan pengujian produk pangan olahan dan kemasan pangan sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan
- b. Melaporkan hasil pengujian secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang secara berkesinambungan
- d. Kegiatan e registrasi pangan olahan untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha
- e. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- f. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan Tindak lanjut pengawasan terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas produk tentang pangan olahan yang aman dan bermutu

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh yang akan melakukan pendaftaran produk terkait aspek CPPOB sehingga produk yang dihasilkan Memenuhi Syarat.
- b. Melakukan penanganan sampel sesuai dengan penyimpanan sampel yang direkomendasikan.
- c. Memberikan penyuluhan kepada pedagang PJAS agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi syarat.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Kegiatan sampling Makanan dengan metode targeted sampling di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya di lakukan sesuai dngan pedoman prioritas sampling pangan. Pengawasan produk pangan sampling targeted tahun 2021 terdapat sebanyak 2 item sampel dengan kategori Sampel UMKM tidak terpenuhi. Sampel UMKM merupakan kategori sampel pangan tertentu dalam rangka pendampingan UMKM dimana yang menjadi kriteria sampling adalah sarana produksi yang memenuhi ketentuan CPPOB (mendapat rekomendasi dengan nilai minimal B) namun pada tahun 2021 belum ada sarana produksi pangan di wilayah kerja loka POM di Kabupaten Dharmasraya yang memenuhi kriteria tersebut.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Kegiatan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan tahun 2021
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan kemasan secara rutin setiap bulan
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan sampling sesuai dengan SOP Sampling yang sudah ditetapkan.
- b. Petugas sampling diberikan pemahaman yang sama terkait dengan sampling yang dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Koordinasi yang dilakukan dengan fungsi pengujian di Balai Besar POM di Padang secara rutin tiap bulannya.
- b. Kegiatan sampling mengikuti kaidah sesuai dengan prioritas pedoman sampling

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi untuk dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan

- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan
- d. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu
- e. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
- f. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya

Loka POM di Payakumbuh :

Melakukan evaluasi terhadap sampling yang dilakukan secara rutin dan identifikasi terhadap kendala yang ada

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan kordinasi dengan Deputi III terkait pengawasan produk pangan yang tidak dapat terpenuhi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Balai koordinator dalam pelaksanaan sampling.

E. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sbb :

$$\% P_{Fortifikasi MS} = \frac{Pangan\ Fortifikasi\ yang\ MS}{Total\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}$$

- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

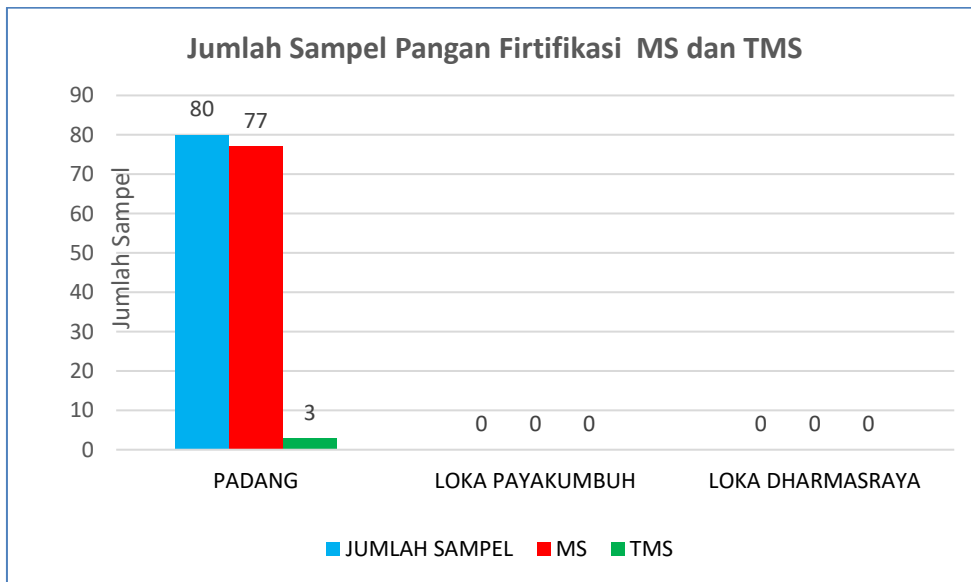
Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat	95	96,25	101,32	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2021

Realisasi Pangan Fortifikasi pada tahun 2021 adalah 96,25%. Apabila dibandingkan dengan target 95% maka persentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 101,32% dengan kriteria baik. Rincian hasil uji adalah 3 sampel tidak memenuhi syarat dan 77 sampel memenuhi syarat dari total 80 sampel yang selesai uji pada tahun 2021.

Untuk Sampel pangan fortifikasi hanya dilakukan sampling oleh Balai Besar POM di Padang. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel yaitu sampel Garam KGS dari PT Kurnia Garam Sejahtera, Garam G.Y.U.R.I yang berasal dari PT Guruh Mitra Perkasa Jakarta dan Garam Konsumsi Beriodium Bintang Tiga Sejahtera.



Gambar 3.22 Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

- Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat merupakan indikator baru sehingga untuk capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun bila dihitung realisasi Pangan fortifikasi Tahun 2020 adalah 95,59%, sehingga terjadi kenaikan realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 sebanyak 0,66%, karena Tahun 2021 pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi tanpa memperhitungkan hasil uji Parameter Uji Kritis yang lain ataupun penandaanya .

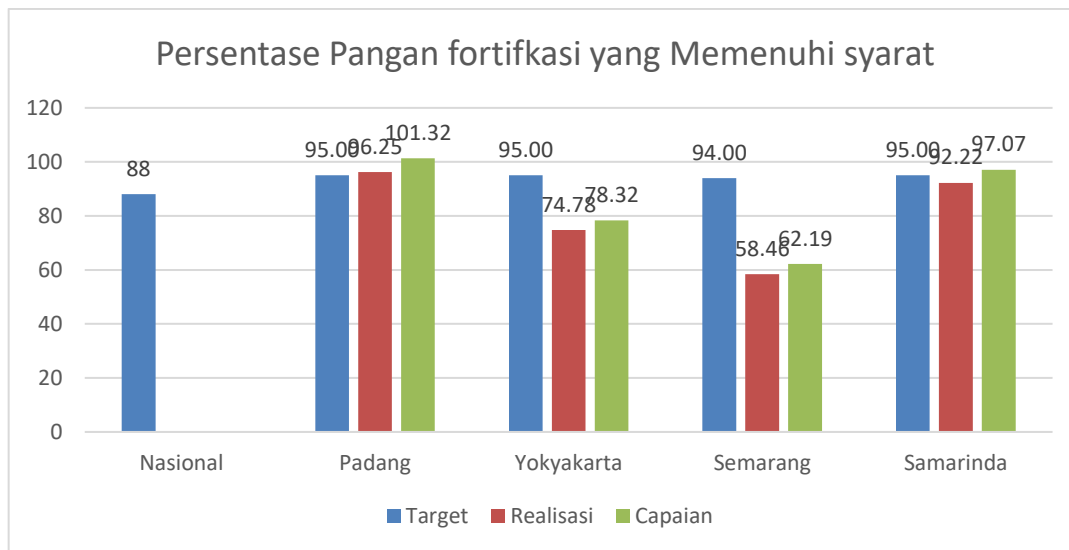
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

- a. Target akhir Renstra (Tahun 2024) Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 99%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik. dengan capaian yang diperoleh adalah 97,22%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan meningkatkan sarana prasarana di laboratorium, peningkatan kompetensi penguji sesuai ruang lingkup pedoman sampling dan pengujian dan peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian. Juga perlu dilakukan Rapat evaluasi bulanan atau triwulan bersama Kepala Balai dan Substansi Pemeriksaa, dan Substansi Pengujian, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium, melakukan pengujian dan pemeliharaan alat sesuai SOP Mikro, dan melakukan Jaminan Mutu hasil pengujian. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha , baik premarket maupun post market, dan kegiatan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat, yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat adalah 88%, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 109,38% (baik). Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang (96,25%) diikuti oleh BBPOM di Samarinda (92,22%), BBPOM di Yokyakarta (74,78%) dan BBPOM di Semarang(58,46%). Balai Besar POM di Padang dan Samarinda yang telah

mencapai IKU BPOM, sedangkan BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Semarang belum mencapai target IKU BPOM. Tingginya realisasi Balai besar POM di Padang karena Balai BesarPOM di Padang selalu Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha , baik premarket maupun post market, melakukan Kegiatan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. , Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium, melakukan pengujian, pemeliharaan alat sesuai SOP Mikro dan Melakukan Jaminan Mutu hasil pengujian.



Gambar 3.23 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pangan fortifikasi tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Rencana aksi yang dilakukan Balai Besar POM di Padang untuk meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian persentase pangan Fortifikasi antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi pangan fortifikasi dalam menerapkan aspek-aspek CPPOB serta penerapan ketentuan khusus pangan fortifikasi
- b. Melakukan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM Nasional , Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya sebagai unit kerja di wilayah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha semakin efektif dan berkesinambungan
- c. Melakukan Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan terhadap produk yang beredar dan sarana produksi dan distribusi, yang dilakukan oleh Badan POM secara Nasional, serta Balai

Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya, telah direspon dengan baik oleh pelaku usaha

- d. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam memilih produk yang baik atau memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk – produk yang aman dan bermutu. Sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu produk yang akan mereka edarkan
- e. Melakukan Sampling dan pengujian produk pangan fortifikasi pangan sesuai pedoman sampling dan pengujian yang telah ditetapkan
- f. Melaporkan hasil pengujian secara tertib kepada unit kerja pusat untuk ditindaklanjuti sesuai pedoman yang ada Kegiatan e registrasi pangan olahan untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha
- g. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang
- h. Semakin meningkatnya kapasitas/ kemampuan dari Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk yang beredar.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium

Kendala Yang dihadapi Balai besar POM di Padang :

Keterbatasan anggaran untuk reagen dan suku cadang serta pemeliharaan alat laboratorium

Alternatif solusi yang diupayakan untuk menunjang keberhasilan :

Melakukan koordinasi antara Bidang pemeriksaan dan pengujian serta tata usaha dalam sampling dan pengujian pangan fortifikasi sehingga penyelesaian hasil uji diselesaikan tepat waktu

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Ada Pun Program yang menunjang keberhasilan Balai Besar POM di Padang :

- a. Kegiatan sampling pangan Fortifikasi serta pengujian telah dilakukan sesuai pedoman sampling pengujian Obat dan Makanan tahun 2021
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan kemasan secara rutin setiap bulan
- c. Kegiatan pelaporan hasil sampling, pengujian mutu dan penilaian penandaan melalui SIPT
- d. Kegiatan pembinaan pelaku usaha produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Padang

- e. Kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja BBPOM di Padang
- f. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengujian dan Bagian Tata Usaha
- g. Penyediaan baku pembanding, reagensia dan alat laboratorium
- h. Koordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding.
- i. Peningkatan sarana dan prasana alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi untuk dapat menerapkan Cara Distribusi dan Produksi Yang Baik secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat, dan melakukan monitoring terhadap respon pelaku usaha atas tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi di daerah secara berkesinambungan
- d. Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang peraturan, berita hoax atau informasi yang lain yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu
- e. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
- f. Melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya
- g. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan reagen dan pemeliharaan Laboratorium
- h. Melakukan percepatan pengadaan reagensia
- i. Meningkatkan program KIE Kepada seluruh masyarakat ,agar masyarakat cerdas dalam memilih makanan aman dan bermutu, serta mengetahui penting fortifikasi yang ditambah kedalam makanan
- j. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha supaya patuh dalam penggunaan Fortifikan.

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang	84	74,28	88,43	Cukup

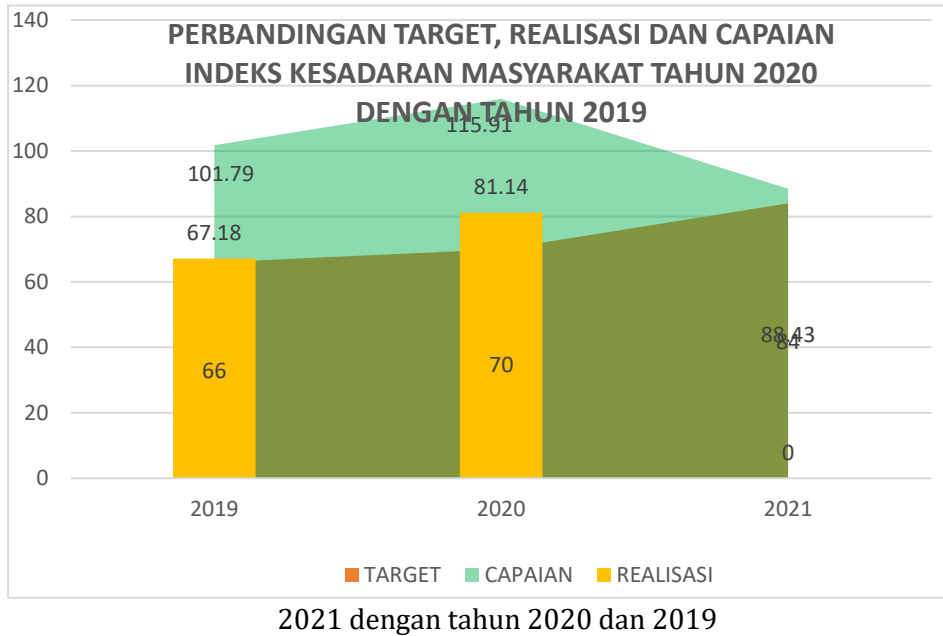
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 84 dengan realisasi 74,28% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 88,43% dengan kriteria Cukup.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2019 (67,18%) , maka terjadi kenaikan 7,1%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020(81,14%)terjadi penurunan 6,86%. Bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2019 (101,79%) terjadi penurunan 13,37%, terhadap capaian tahun 2020 (115,91) terjadi penurunan 27,48%. Penurunan yg cukup signifikan karena ada perubahan target sesuai reviu Renstra BBPOM di Padang 2020-2024. Rendahnya realisasi ini

Gambar 3.24 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks kesadaran masyarakat tahun



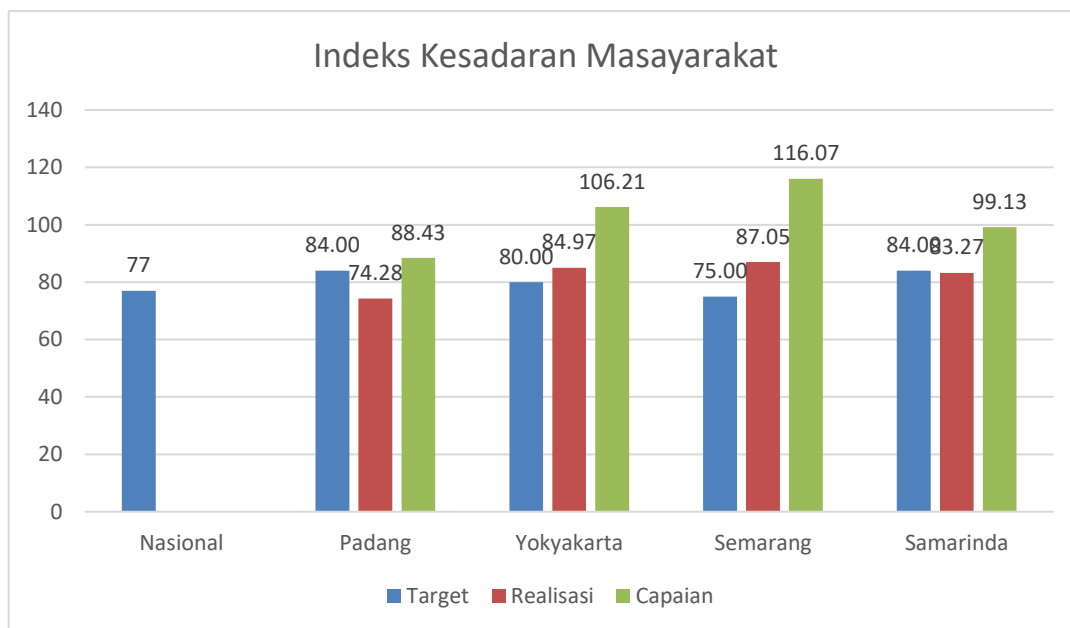
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

a. Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Padang adalah 91 maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, kategori cukup dengan capaian 81,63%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang intensif agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam melakukan KIE kepada masyarakat, membuat perencanaan kegiatan KIE berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, isu terkini serta hasil pengawasan dan pengujian.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu adalah 77, maka realisasi Balai Besar POM di Padang belum mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 96,47% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (87,05%) diikuti oleh BBPOM di Yokyakarta (84,97%), dan BBPOM di Samarinda (83,27%). Balai Besar POM di Padang mendapat nilai paling rendah diantara ketiga balai dalam kluster dan belum mencapai target IKU BPOM. Untuk itu perlu peningkatan kompetensi petugas secara berjenjang dan merata agar dapat menyampaikan KIE lebih menarik dan interaktif kepada masyarakat



Gambar 3.25 Perbandingan target, realisasi dan indeks kesadaran masyarakat tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Belum semua masyarakat mendapatkan edukasi terkait Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya
- b. Pengemasan materi KIE yang mudah dipahami belum disusun secara optimal
- c. Jenis konten yang disampaikan belum mencakup seluruh aspek terkait obat dan makanan
- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan obat dan makanan yang aman

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Memberdayakan kader dan komunitas keamanan pangan yang telah dibentuk untuk ikut menyebarkan informasi terkait obat dan makanan yang aman dan bermutu
- b. Kegiatan KIE Thomas, kegiatan keamanan pangan terpadu, mobil keliling dan ritel yang tetap dilaksanakan dengan penyesuaian penerapan protokol kesehatan baik secara luring ataupun daring selama masa pandemi Covid—19
- c. Setiap kegiatan KIE selalu menyampaikan pesan cek KLIK dan pengenalan aplikasi cek BPOM agar masyarakat dapat memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu
- d. Menyertakan contoh produk-produk tidak memenuhi ketentuan pada saat KIE

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk melakukan KIE kepada masyarakat
- b. Perencanaan kegiatan KIE dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, isu terkini, hasil pengawasan dan pengujian.
- c. Peningkatan kompetensi untuk petugas dilakukan secara berjenjang dan merata agar dapat menyampaikan KIE lebih menarik dan interaktif kepada masyarakat
- d. Melakukan evaluasi kompetensi petugas melalui masukan (form penilaian petugas) dari stakeholder
- e. Meningkatkan edukasi terkait izin edar kepada masyarakat, karena berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap izin edar masuk ke dalam kategori “tidak baik”

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT
TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Dari hasil capaian terhadap 3 indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,57% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	82,70	85,40	103,26	Baik
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,87	67,93	91,96	Baik
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	93,13	103,48	Baik

A. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei, yaitu dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 ketegori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021

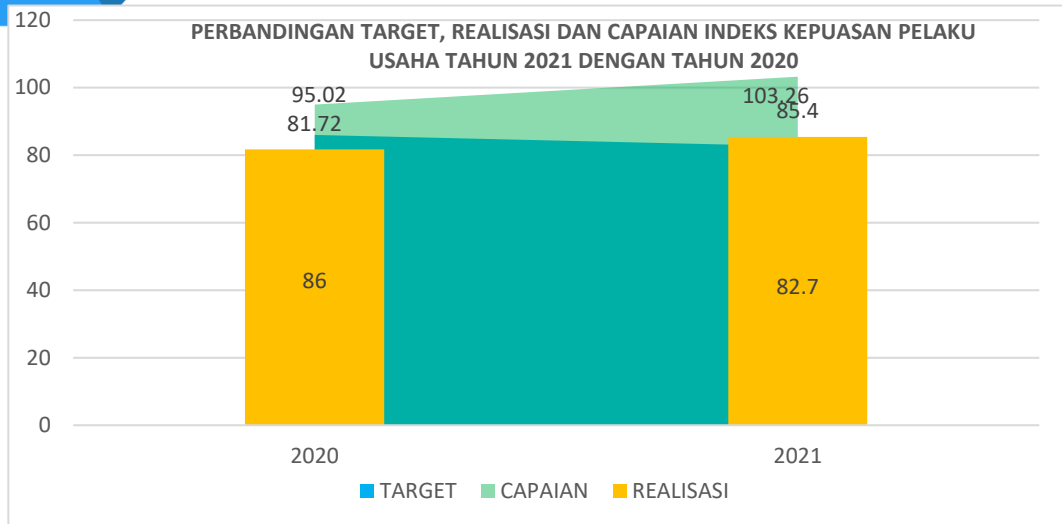
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	82,70	85,40	103,26	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 adalah 82,70 dengan realisasi 85,40 sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 103,26% dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang bila dibandingkan dengan tahun 2020 (81,72%) terjadi kenaikan 3,68 % dan bila dibandingkan dengan capaian 2020 (95,02) terjadi kenaikan 8,24%. Kenaikan ini dapat disebabkan meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha.



Gambar 3.26 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks kepuasan pelaku usaha tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI I 2021	% CAPAIAN
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	85,9	85,40	99,42

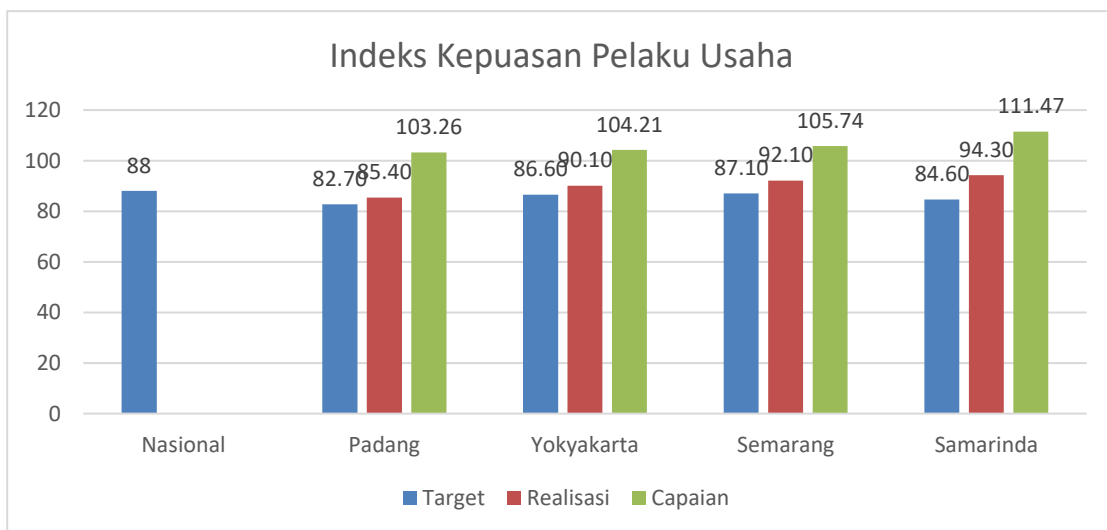
Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 belum tercapai sesuai dengan target akhir renstra 2020-2024, tetapi capaian termasuk kategori baik sehingga perlu perbaikan secara kontinu sehingga target Renstra tahun 2020-2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan adalah 88, maka realisasi Balai Besar POM di Padang belum mencapai target nasional dengan capaian 97,04 (baik).

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan adalah 85,4, belum mencapai target nasional yaitu 88, tetapi

capaiannya termasuk kategori baik yaitu 97,04. Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang dan BBPOM Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Samarinda (94,30%) diikuti oleh BBPOM di Semarang (92,10%) dan BBPOM di Yogyakarta (90,1%). BBPOM di Padang mendapat nilai paling rendah diantara ketiga balai dalam kluster dan belum mencapai target IKU BPOM. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha dimasa mendatang. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) agar lebih memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan. Peran dan *awareness* PIC di setiap unit penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal perencanaan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan KBP dan monitoring KBP.



Gambar 3.27 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima e-registration terpadu dengan Direktorat Pangan Olahan, kegiatan dilaksanakan secara luring dimana pelaku usaha memperoleh pendampingan khusus sehingga dapat mempercepat proses pendaftaran izin edar. Pada kegiatan ini telah berhasil diterbitkan 32 NIE. Kegiatan ini diutamakan bagi pelaku usaha UMKM yang mengikuti program pendampingan dan si jempol tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan juga dilaksanakan pada kegiatan *World Food Safety Day and Spice Up the World* dan Kegiatan Pekan Gelar Pendampingan UMK *Frozen Food* pada Masa Pandemi. Pelaku usaha pangan olahan mendapat bimbingan teknis terkait Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik. Penyelenggaraan kegiatan Bimtek e-registration dilakukan secara terencana yang dimulai dari pemilihan peserta pelaku usaha yang telah mendapat pendampingan dalam rangka persiapan proses registrasi pangan olahan. Peserta diprioritaskan kepada pelaku usaha yang telah mendapat rekomendasi PSB dan telah menyelesaikan dokumen desain GMP, sehingga pada saat desk registration pangan olahan semua dokumen telah terpenuhi dan evaluator BPOM dapat melakukan evaluasi dokumen tanpa kendala.

Sedangkan kegiatan *World Food Safety Day and Spice Up the World* dan Kegiatan Pekan Gelar Pendampingan UMK *Frozen Food* pada Masa Pandemi mendapat sedikit kendala pada proses persiapan disebabkan jadwal acara yang diinfokan tidak memungkinkan panitia melakukan persiapan secara terencana, seperti kemudahan memperoleh informasi kegiatan, jumlah peserta, media yang digunakan, pertanyaan pelaku usaha dan kecukupan waktu.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor sehingga dapat menaikkan daya saing UMKM di wilayah Sumatera Barat serta mempercepat pemulihan pada masa pandemi.
- b. Melaksanakan program sijempol (siap jemput bola) secara konsisten terhadap pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan percepatan layanan sertifikasi terhadap proses izin edar.
- c. Selalu berkoordinasi dengan petugas BPOM sehingga proses izin edar yang telah menggunakan berbagai bentuk aplikasi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kompetensi petugas dengan pengetahuan teknis serta layanan registrasi yang menggunakan aplikasi BPOM dan lainnya sehingga dapat melaksanakan pendampingan yang lebih cepat terhadap pelaku usaha yang mengurus izin edar.

7. Tindak lanjut dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indeks kepuasan pelaku usaha dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan bimbingan dan pembinaan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE). Bentuk upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dapat dilakukan dengan mencermati dan menindaklanjuti masukan dan keluhan dari para pelaku usaha yang ada pada data saran/masukan, diantaranya terkait dengan kemudahan memperoleh informasi kegiatan, jumlah peserta, media yang digunakan, kesiapan panitia, respon petugas/narsum atas pertanyaan pelaku usaha, kecukupan waktu, mekanisme antrian untuk konsultasi dan sebagainya. Penyelenggara KBP perlu menambah kecukupan waktu bimbingan dan

pembinaan karena ini merupakan hal yang paling dikeluhkan oleh pelaku usaha. BBPOM di Padang melakukan monev KBP secara berkala dalam upaya pencapaian target indeks.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021

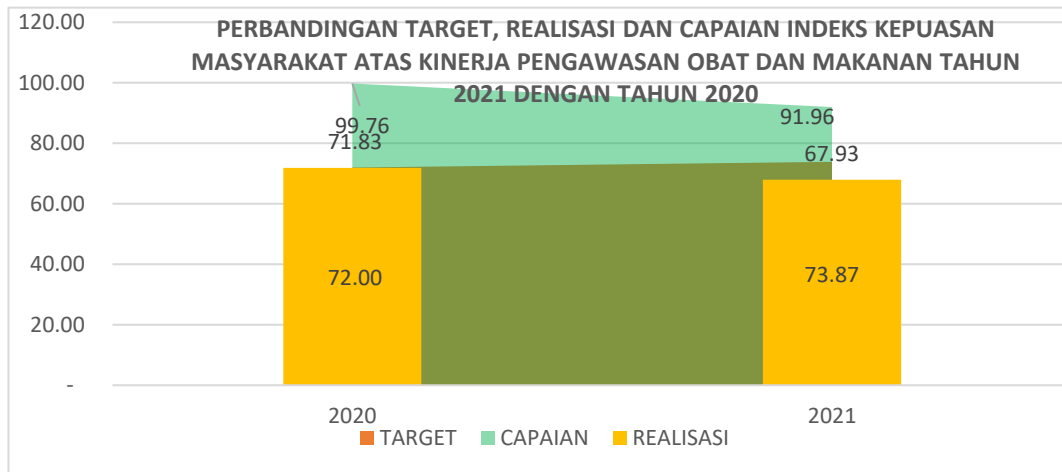
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,87	67,93	91,96	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 adalah 73,87 dengan realisasi 67,93% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 91,96% dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2020 (71,83%) , maka terjadi penurunan 3,9% dan bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (99,76%) terjadi penurunan 7,8%. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Padang agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan, meningkatkan pengetahuan tentang tugas dan fungsi BPOM serta meningkatkan strategi komunikasi secara langsung atau dengan melalui media sosial.



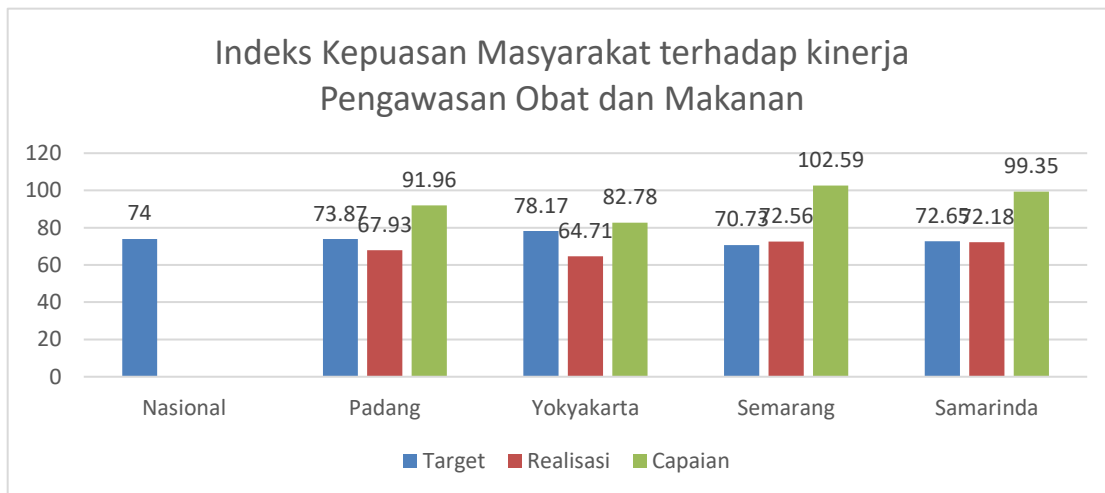
Gambar 3.28 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah 67,93, belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024 yaitu 80,01, tetapi capaiannya termasuk kategori cukup yaitu 84,90%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra tahun 2020-2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan adalah 74 sehingga realisasi BBPOM Padang belum mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 91,80% (baik). Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM Semarang (72,56%), diikuti oleh BBPOM di Samarinda (72,18%), BBPOM di Padang (67,93%) dan BBPOM di Yogyakarta (64,71%). Realisasi balai Besar POM dalam kluster ini masih dibawah target nasional.



Gambar 3.29 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Kepuasan masyarakat diukur melalui 5 indikator pembentuk kepuasan mengacu pada konsep *Service Quality* yang terdiri dari *reliability* (kemampuan/upaya pengawasan), *assurance* (memberikan perlindungan), *tangibles* (KIE), *emphaty* (kepedulian), dan *responsiveness* (tindakan). Berdasarkan aspek pengukuran maka aspek kepuasan tertinggi adalah *responsiveness* dan aspek terendah adalah *reliability*, tetapi secara umum seluruh aspek pembentuk kepuasan perlu ditingkatkan agar target tahun depan dapat tercapai. Pada tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM di Padang tidak memenuhi target, hal ini dapat disebabkan kemampuan upaya pengawasan obat dan makanan belum maksimal dan kegiatan KIE belum terealisasi untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu perlu peningkatan kualitas pengawasan dengan penambahan kompetensi kepada petugas, peningkatan layanan publik bagi masyarakat, peningkatan pengetahuan bagi masyarakat melalui kegiatan *public relation* dan publikasi melalui media sosial berbagai aktivitas BBPOM di Padang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti KIE obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BBPOM di Padang adalah melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya bagi Kesehatan. BBPOM di Padang perlu terus mempublikasikan program-program yang berdampak langsung serta meningkatkan pengetahuan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi

dengan lintas sektor dan asosiasi seperti Aprindo, IKAPI, IAI, dan OP-OPD terkait tentang pengawasan obat dan makanan.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Program KIE obat dan makanan yang dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media sosial.
- b. Koordinasi dengan stakeholder dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- c. Layanan si jempol dan aplikasi Galamai yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan layanan dari BBPOM di Padang
- d. Penyebaran informasi tentang obat dan makanan dengan mengundang pelaku usaha
- e. Peningkatan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi dan edukasi

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Meningkatkan program KIE dengan mempertimbangkan komoditi obat dan makanan yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sosialisasi bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait peraturan dan regulasi yang terkini terkait obat dan makanan.
- c. Melakukan komunikasi secara kontinu kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memberikan umpan balik terhadap pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan BBPOM di Padang dengan.
- d. Membentuk komitmen dengan lintas sektor untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan membuat SK Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan yang diketuai oleh Sekda Kab/Kota sesuai Permendagri No.41 tahun 2018.
- e. Membuat materi/konten KIE sesuai dengan isu-isu terkini, hasil temuan pengawasan dan pengujian terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Tahun 2021

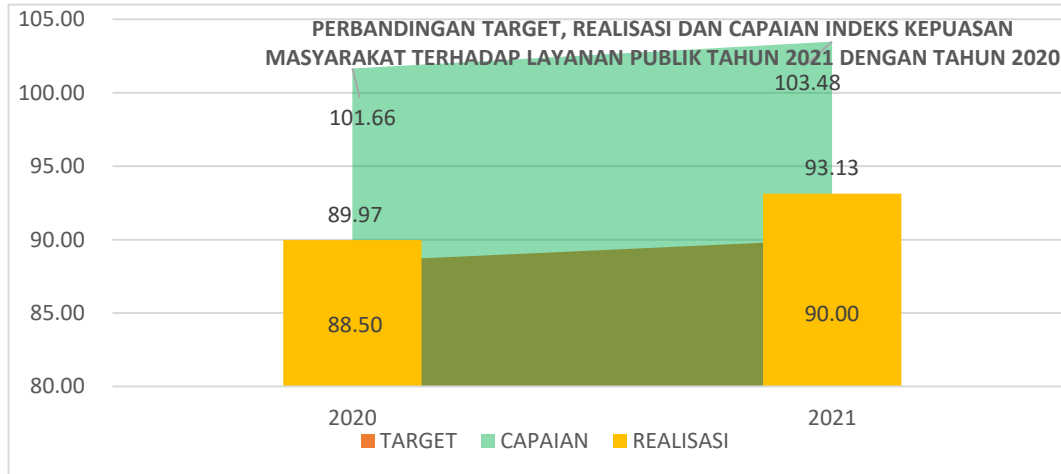
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	90,00	93,13	103,48	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 adalah 90,00 dengan realisasi 93,13% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 103,48 % dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Padang terhadap tahun 2018 (76,75%) terjadi kenaikan 16,48%, dengan tahun 2019 (87,77%) terjadi kenaikan 5,36% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020(89,97) terjadi kenaikan 3,16%. Terhadap capaian kinerja tahun 2020 (101,6) terdapat kenaikan 1,82%, namun tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sd 2019 karena IKU ini baru ada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya petugas yang kompeten, ruang layanan yang nyaman dan kemudahan akses layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial dan aplikasi GALAMAI.



Gambar 3.30 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik tahun 2021 dengan tahun 2020

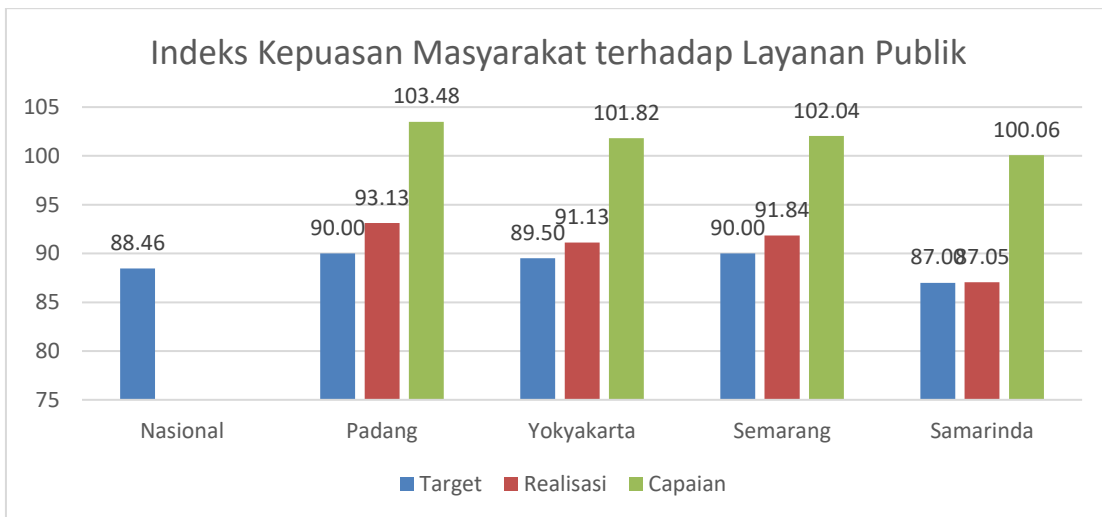
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM adalah 92 maka bila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra 2020-2024 capaian yang diperoleh adalah 101,23% dengan kriteria baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM adalah 88,46, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 105,28 (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang (93,13%) diikuti oleh Balai Besar POM di Semarang (91,84%), BBPOM di Yokyakarta (91,13%) dan BBPOM di Samarinda (87,05%) Semua Balai yang berada dalam 1 kluster telah mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.31 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2021 dengan target target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Kemudahan akses layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial dan aplikasi GALAMAI
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik secara berkala
- Ruang layanan publik yang memenuhi persyaratan standar layanan publik
- Petugas layanan publik yang kompeten dalam melayani masyarakat

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Mengoptimalkan media layanan informasi dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen(ULPK) Balai Besar POM di Padang namun juga dapat diakses melalui media sosial dan *live chat* di Aplikasi GALAMAI
- b. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan mengundang stakeholder untuk evaluasi penggunaan aplikasi GALAMAI
- c. Memberikan layanan informasi dan pengaduan sesuai dengan sistem, mekanisme dan prosedur yang jelas
- d. Melakukan renovasi sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan standar layanan publik
- e. Melakukan evaluasi dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan publik
- b. Meningkatkan kompetensi petugas secara berkelanjutan dalam memberikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas publik untuk memberikan informasi dan edukasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas
- d. Meningkatkan sosialisasi seluruh media informasi yang ada agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 indikator kinerja utama. Dari hasil capaian terhadap 6 indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 104,59% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 Capaian Sasaran Kegiatan ke IV

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98,42	100,43	Baik
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70,21	100,30	Baik
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,51	101,54	Baik
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	62,50	111,61	Sangat baik
5.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	67	75,07	112,05	Sangat baik
6.	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,42	101,61	Baik

A. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari 4 komponen :

- ❖ Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh pusat dan UPT lain

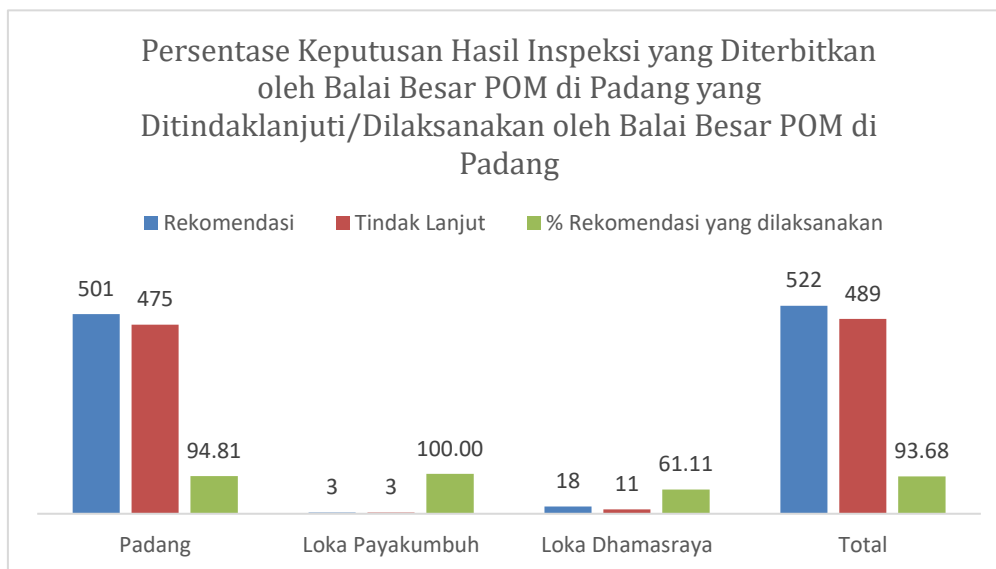
❖ Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021

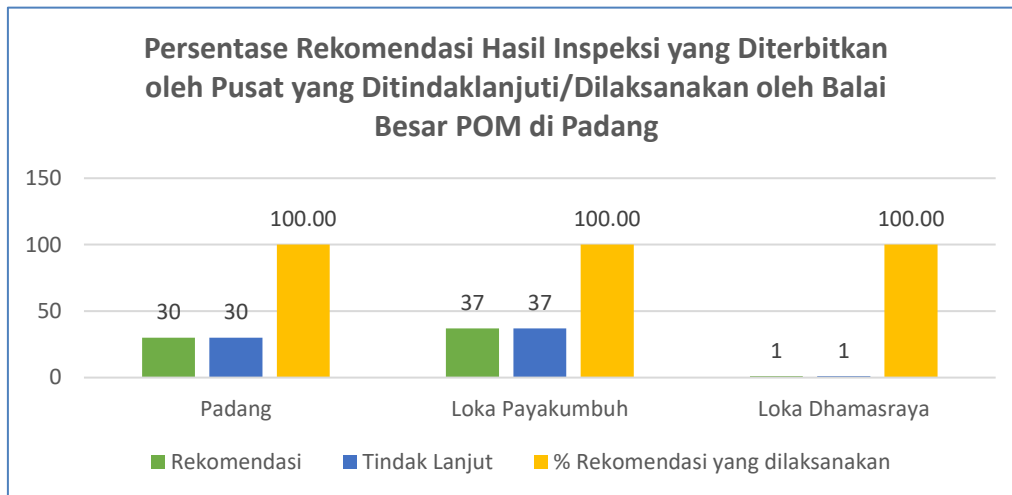
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98,42	100,43	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2021

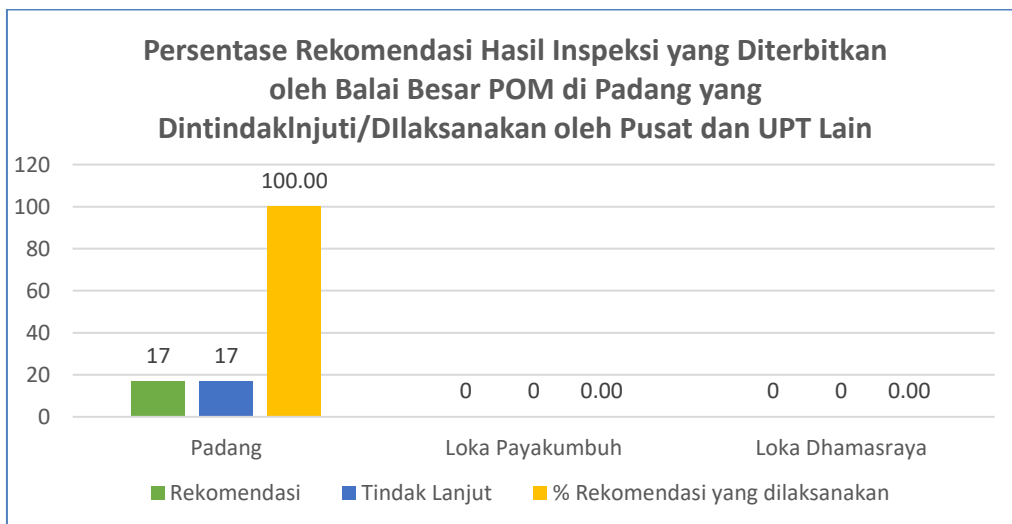
Pada tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan UPT Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Payakumbuh, dan Loka POM di Dharmasraya adalah 98%. Sedangkan realisasi adalah 98,42% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 100,43% dengan kriteria Baik



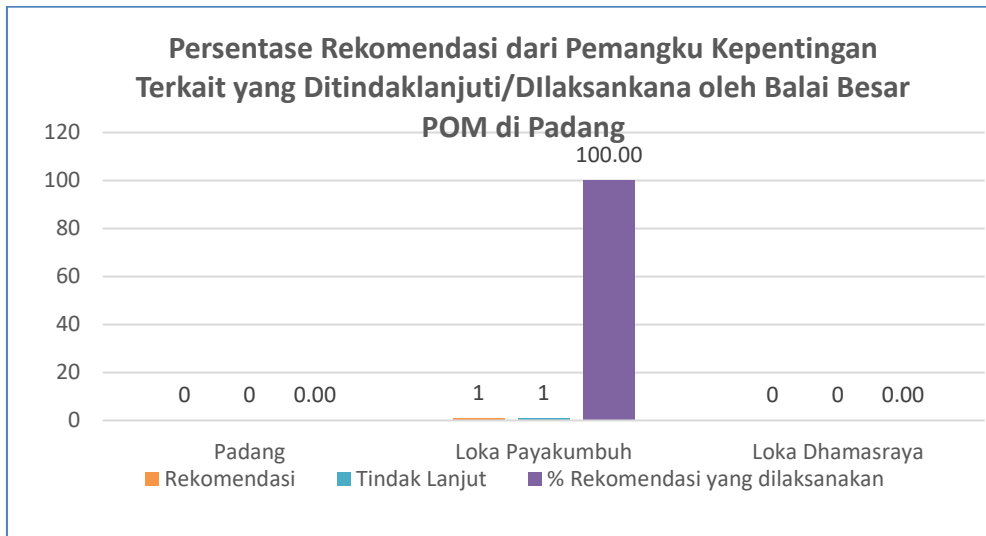
Gambar 3.32 Persentase Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021



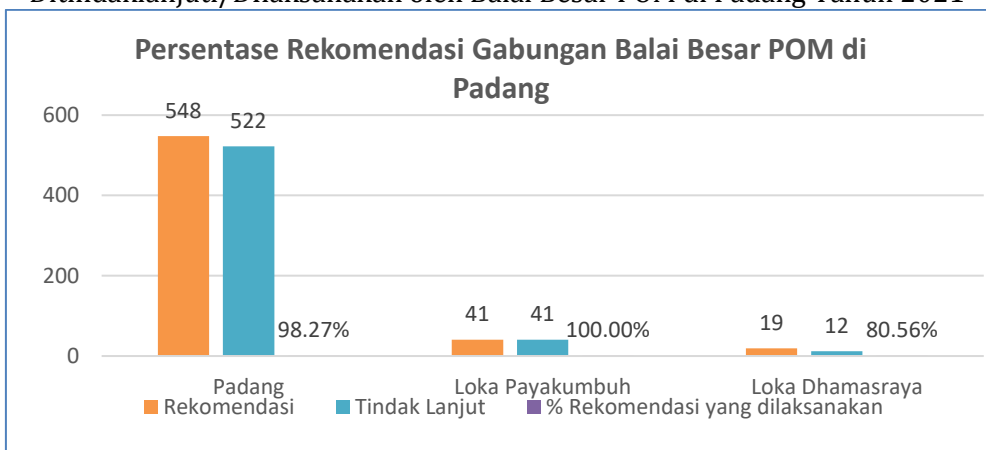
Gambar 3.33 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021



Gambar 3.34 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan oleh Pusat dan UPT Tahun 2021



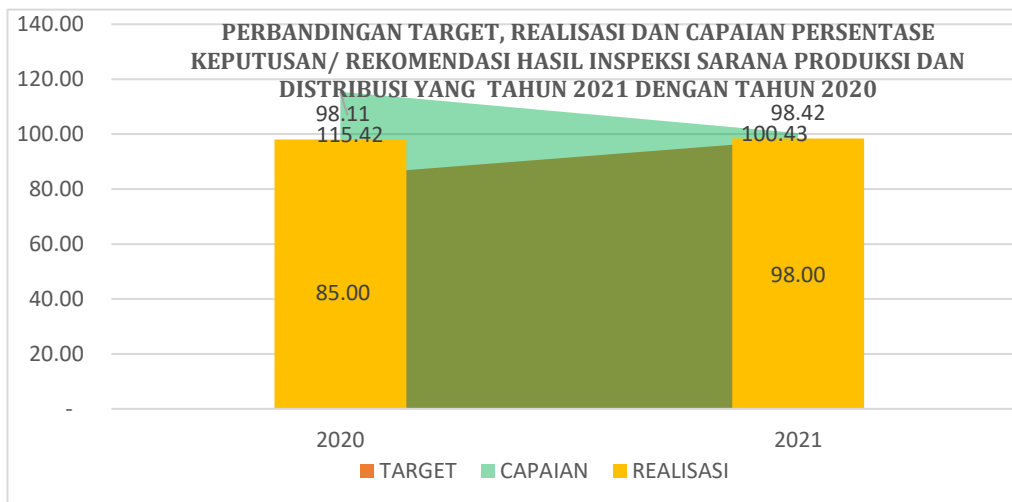
Gambar 3.35 Persentase Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan Terkait yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakana oleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021



Gambar 3.36 Persentase Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan Gabungan Balai Besar POM di Padang Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terhadap tahun 2020 (98,11%) terjadi kenaikan 0,31% dan bila dibandingkan dengan Terhadap capaian kinerja tahun 2020 (115,42%) terdapat penurunan 14,99%. Kenaikan realisasi yang diikuti dengan penurunan capaian ini disebabkan karena adanya kenaikan target pada tahun 2021 sesuai revisi Renstra 2020-2024 BBPOM Padang.



Gambar 3.37 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang tahun 2021 dengan tahun 2020

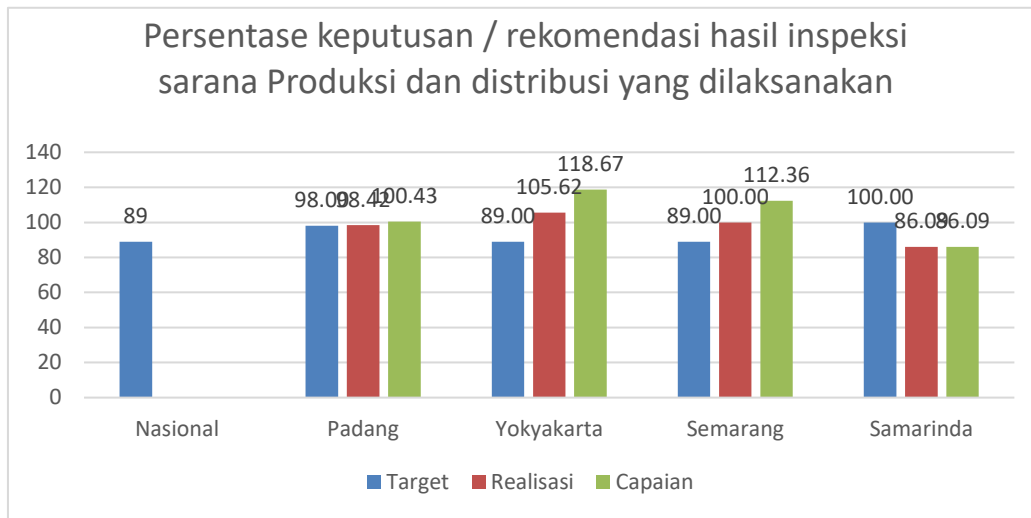
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) untuk Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 99%, realisasi tahun 2021 sudah mencapai 98,42 dengan kategori baik sehingga perlu perbaikan berkesinambungan untuk mencapai peningkatan persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022, 2023 hingga 2024 sesuai dengan target akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 89%, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 110,58% (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Yokyakarta (105,62%) diikuti oleh BBPOM di Semarang (100%), BBPOM di Padang (98,42%) dan BBPOM di Samarinda(86,09%). BBPOM di Yokyakarta, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Padang telah mencapai target IKU BPOM, sedangkan BBPOM di Samarinda belum mencapai IKU BPOM.



Gambar 3.38 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2021 merupakan gabungan dari beberapa kegiatan baik yang diterbitkan oleh BPOM Pusat, Pemangku kepentingan, maupun oleh BBPOM di Padang, serta yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat dan UPT lain maupun dilaksanakan langsung oleh BBPOM di Padang.

Peningkatan realisasi hingga 98 % merupakan dampak baik dari pembatasan kegiatan masyarakat pada status PPKM di Sumatera Barat sehingga menurunkan frekuensi kegiatan inspeksi dan menambah waktu kerja petugas dan supervisor untuk menyelesaikan rekomendasi/tindak lanjut paska pemeriksaan ke sarana. Prestasi ini dapat terus ditingkatkan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pembuatan surat tindak lanjut hasil inspeksi, peningkatan kompetensi petugas inspeksi dalam pembuatan surat tindak lanjut serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder terhadap surat tindak lanjut hasil inspeksi.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan monitoring terhadap rekomendasi serta laporan pengawasan dari Pusat dan UPT lain yang disampaikan ke Loka POM di Payakumbuh.
- b. Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindaklanjut dari yang diberikan oleh lintas sektor lain.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diberikan oleh pusat untuk dapat di tindak lanjuti oleh UPT
- b. Kegiatan yang padat dan keterbatasan jumlah SDM sehingga menyebabkan rekomendasi hasil pemeriksaan belum dapat ditindaklanjuti seluruhnya

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Pemanfaatan sistem informasi, teknologi dan aplikasi untuk membantu petugas dalam meningkatkan dan mempercepat pembuatan surat tindak lanjut
- b. Pemanfaatan sistem informasi, teknologi dan aplikasi untuk membantu atasan dalam memonitoring hasil pengawasan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan baik oleh pusat maupun oleh lintas sektor terkait.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan dengan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

Rekomendasi perbaikan berupa pembuatan aplikasi/ sistem yang dapat membantu proses pembuatan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan hasil inspeksi sarana masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat difungsikan. Diharapkan dengan adanya aplikasi/ sistem ini dapat memperpendek waktu dan menghemat tenaga SDM Substansi Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan evaluasi terkait dengan rekomendasi yang disampaikan ke Loka POM di Payakumbuh dengan tindak lanjut yang telah dilakukan secara rutin.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan monitoring secara rutin terhadap rekomendasi yang disampaikan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Rutin melakukan monitoring terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dan rekomendasi pusat agar segera ditindaklanjuti

B. Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

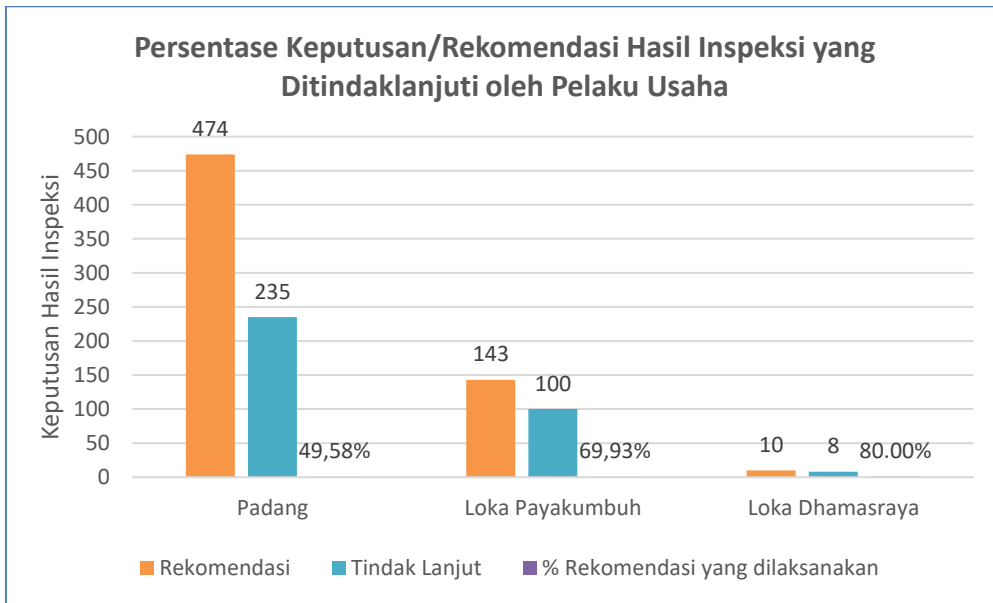
- ❖ Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan makanan.
- ❖ Pemangku kepentingan adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yaitu pelaku usaha dan lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Organisasi Profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan.
- ❖ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan, hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- ❖ Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stateholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Padang.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021

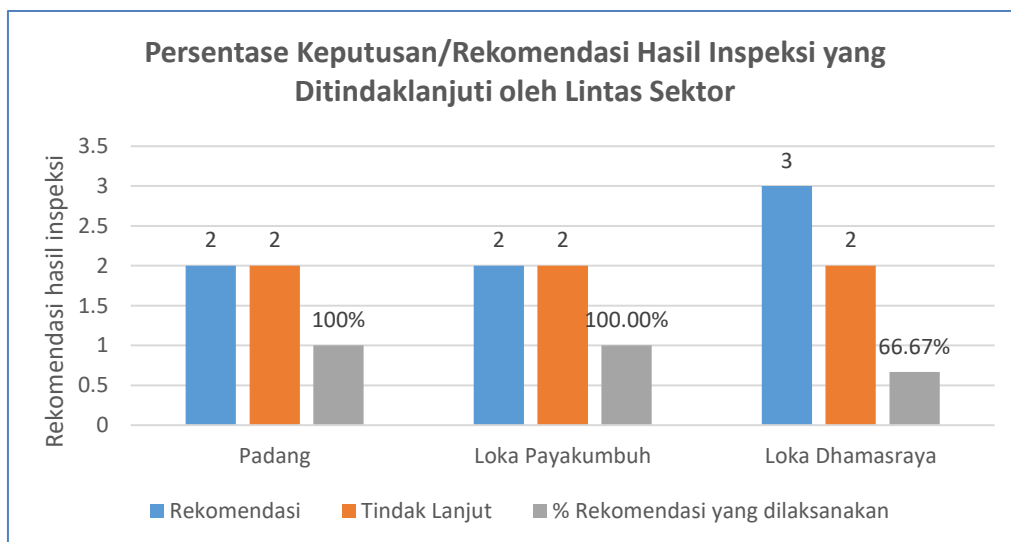
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70,21	100,30	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

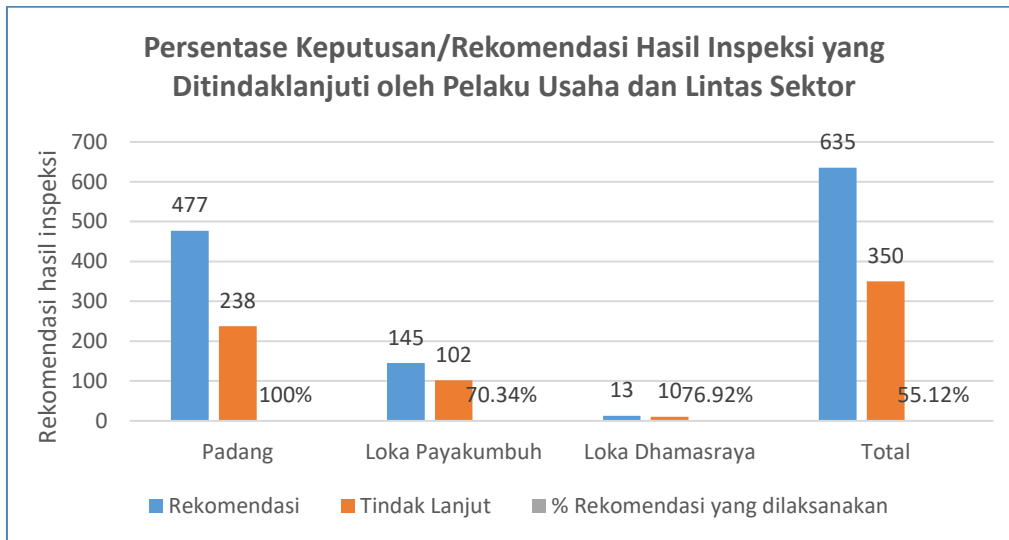
Pada tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 70% dengan realisasi 70,21% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini pada Tahun 2021 adalah 100,30% dengan kriteria Baik



Gambar 3.39 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Tahun 2021



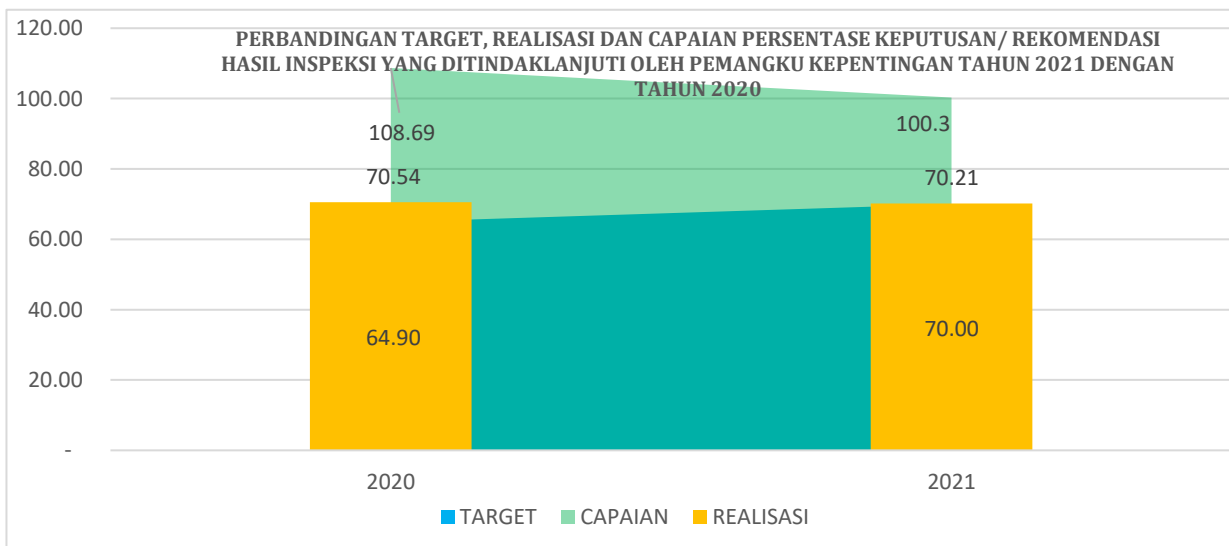
Gambar 3.40. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor Tahun 2021



Gambar 3.41 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dan Lintas Sektor Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2020(70,54%) , maka terjadi penurunan 0,33% dan bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (108,69%) terjadi penurunan 8,39%. Penurunan disebabkan karena terjadinya kenaikan target pada tahun 2021 sesuai reuiu Renstra 2020-2024



Gambar 3.42 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan tahun 2020

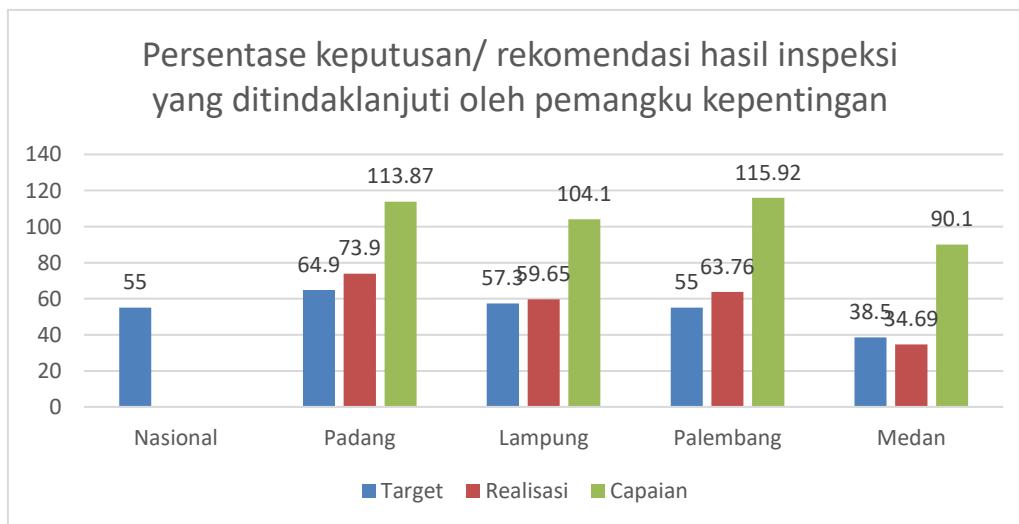
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 75%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 93,61%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target nasional Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 60%, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 117,02% (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda (83,57%) diikuti oleh BBPOM di Yokyakarta(82,86%), BBPOM di Semarang (72,77%) dan BBPOM di Padang(70,21%). Keempat balai tersebut telah mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.43 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- a. Komunikasi dengan pelaku usaha telah dilakukan dengan intens, namun untuk mempertahankan capaian indikator ini perlu dilakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka atau melalui media email, whatsapp, SMS atau telpon.
- b. Monitoring terhadap hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah dilakukan secara optimal dan untuk mempertahankan capaian indikator ini maka monitoring perlu dilaksanakan secara konsisten.

Alternatif solusi : Lebih aktif memantau atau mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan umpan balik terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan rekomendasi tindak lanjut yang telah diberikan.
- b. Melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan ke pelaku usaha .
- c. Meningkatkan pelaku usaha terkait dengan rekomendasi tindak lanjut yang dieberikan kepada pelaku usaha.
- d. Kurang pahamiya pelaku usaha terkait tindak lanjut yang diberikan oleh petugas terutama sarana UMKM dan Distribusi Pangan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Loka POM di Dharmasraya :

Dilakukan komunikasi dengan lintas sektor/pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk memberikan feedback terhadap surat tindak lanjut yang di kirimkan Loka POM di Kab. Dharmasraya.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Membuat suatu sistem kontrol terhadap tindak lanjut yang direspon oleh pemangku kepentingan, serta menunjuk petugas yang akan bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait respon terhadap tindak lanjut

- b. Monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan BBPOM di Padang ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- c. Komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- d. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Monitoring secara rutin dan berkala terhadap rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha.
- b. Memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang telah dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan monitoring tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor.
- b. Komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/ penanggungjawab sarana dan pemerintah kabupaten untuk memberikan umpan balik terhadap surat tindak lanjut yang diberikan.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan BBPOM di Padang ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- b. Dilakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut.
- c. Aktif mengingatkan kembali kepada pelaku usaha/pengelola melalui media email, whatsapp, SMS dan telpon tentang tindak lanjut yang sudah dikirim untuk direspon
- d. Rekomendasi perbaikan pada Th 2021 berupa pembuatan aplikasi/ sistem kontrol yang dapat membantu proses monitoring terhadap keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat difungsikan. Diharapkan dengan adanya aplikasi/ sistem ini dapat memperpendek waktu

dan menghemat tenaga SDM Substansi Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan. Kontrol terhadap keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan telah dilakukan koordinasi secara langsung oleh Subkoordinator inspeksi dan Koordinator pemeriksaan. Hal ini dapat terlihat dari angka realisasi terhadap indikator ini mengalami peningkatan di bandingkan realisasi pada TWIII.

- e. Realisasi BBPOM sampai pada Th 2021 sebesar 70,21 % dari target Th 2021 sebesar 70%. Capaian terhadap indikator ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar melakukan melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian hasil pengawasan sarana

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kendala pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan petugas.
- b. Mengupayakan metode yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Monitoring terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan Loka POM di Dharmasraya ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait selalu dilakukan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
- b. Dilakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/penanggungjawab sarana dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut, tatap muka langsung atau media email, whatsapp, SMS dan telpon.

C. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB

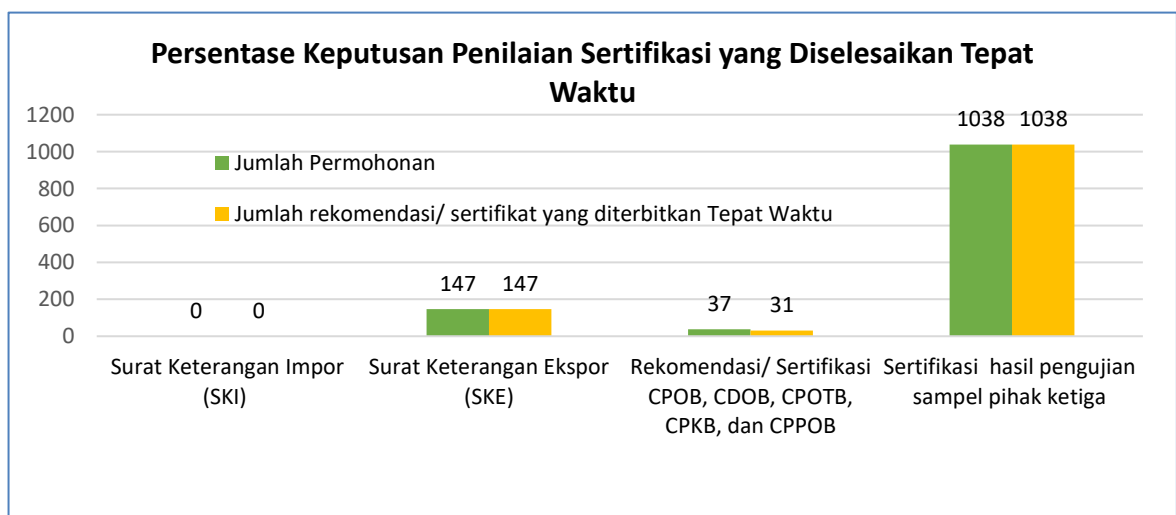
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)

Tabel 3.20.Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,51	101,54	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

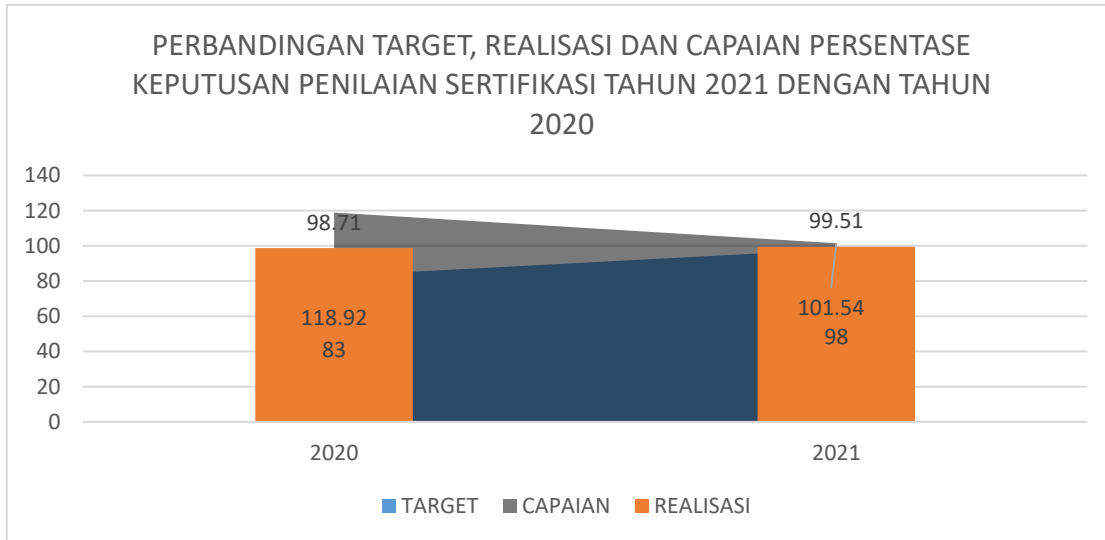
Pada tahun 2021 target indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 98% dengan realisasi 99,51% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 101,543% dengan kriteria Baik.



Gambar 3.44 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 (98,71%) , maka terjadi kenaikan 0,8% dan bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (118,93%) terjadi penurunan 17,39%. Penurunan capaian disebabkan oleh kenaikan target kinerja tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM di Padang 2020-2024.



Gambar 3.45 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

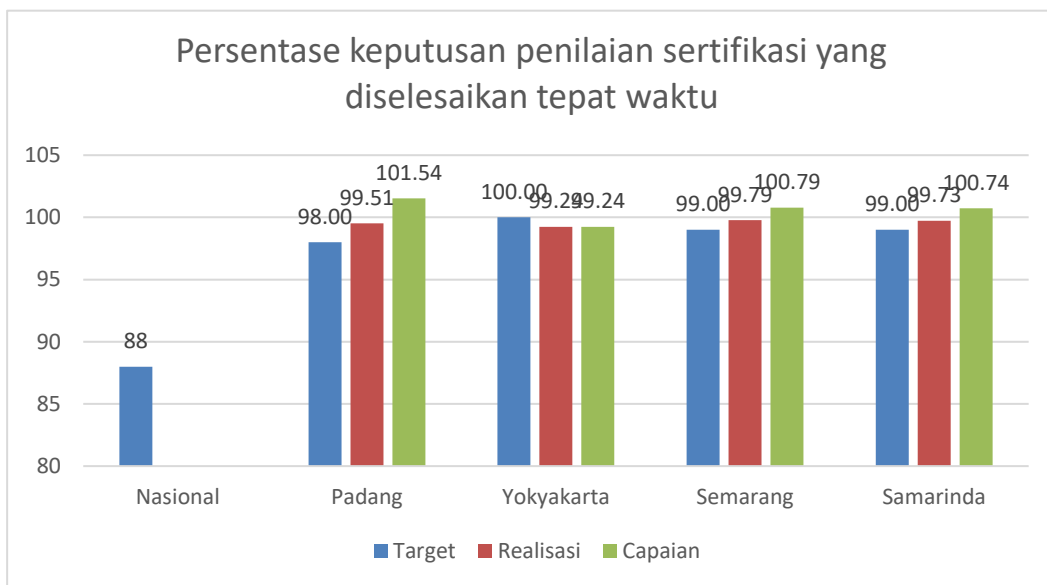
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50	99,51	100,01

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 99,51 %, sudah melampaui target Renstra 2020-2024 yaitu 100,01 % dengan kriteria baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 99,51% telah melampaui target nasional 88% sehingga capaian yang diperoleh 113,08 % dengan kriteria sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (99,79%) diikuti oleh BBPOM di Samarinda (99,73%), BBPOM di Padang (99,51%) dan BBPOM di Yogyakarta (99,24%). Target IKU BPOM telah tercapai untuk semua balai dalam 1 kluster ini.



Gambar 3.46 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 dengan target target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Pada Tahun 2021 telah diterbitkan 174 rekomendasi yang terdiri dari : 4 hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, 18 surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, 3 surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, 2 surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB tahap 1 dalam rangka pendaftaran produk OT (UMOT), 147 penerbitan SKE produk pangan olahan.

Kondisi Pandemi pada tahun 2021 menyebabkan pelaksanaan proses audit/sertifikasi di sarana produksi dan distribusi dilaksanakan secara *on site* dan *on desk*. Untuk proses pemeriksaan 4 PBF dalam rangka sertifikasi CDOB dilaksanakan secara *desk inspection*, sesuai surat pendelegasian dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP. Sedangkan proses proses audit/sertifikasi 18 sarana produksi pangan, 3 sarana industri kosmetik dan 2 sarana UMOT dilakukan secara *on site*, dengan mempertimbangkan kondisi UMKM yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pelaku usaha UMKM dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan petugas sehingga pemahaman pelaku usaha terhadap *Good Manufacturing Practise* lebih baik.

Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi adalah 14 hari kerja dan 7 hari kerja untuk layanan permohonan audit sertifikasi dalam rangka program sijempol (siap jemput bola). Terdapat 4 sarana produksi yang tidak terpenuhi *timeline* layanan permohonan audit sertifikasi disebabkan keterbatasan petugas dalam percepatan pelayanan audit ke sarana produksi, dimana dibutuhkan monitoring proses audit sertifikasi sehingga petugas dapat melakukan kegiatan audit sertifikasi tanpa melewati *timeline* yang telah ditetapkan. *Timeline* penerbitan terhadap 147 SKE telah terpenuhi hingga 6 jam yang sebelumnya adalah 24 jam. Kondisi ini dapat dicapai karena telah dilakukan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan petugas sehingga proses evaluasi dokumen dapat dipercepat.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha agar dapat melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ada.
- b. Pelaku usaha membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil audit dalam rangka pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- c. Petugas aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan ketidaksesuaian yang ada.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Telah dilakukan pendampingan langsung yang diberikan kepada pelaku usaha
- b. Sarana produksi belum memiliki fasilitas yang memadai, dikarenakan belum adanya biaya

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Pendampingan terhadap pelaku usaha agar dapat memenuhi semua persyaratan dengan lengkap sebelum mengajukan permohonan audit sertifikasi yaitu dokumen GMP, denah layout ruang produksi serta persyaratan administrasi lainnya
- b. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek sehingga dapat melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terutama pada proses pendaftaran di aplikasi BPOM.
- c. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pendampingan yang intensif terhadap pelaku usaha yang dalam proses sertifikasi.
- b. Melakukan pendataan pelaku usaha yang berpotensi untuk didampingi dalam rangka sertifikasi.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Petugas aktif melakukan komunikasi terhadap pelaku usaha untuk melakukan pembinaan baik secara langsung maupun via online
- b. Koordinasi dengan stakeholder terkait sarana produksi potensial yang mendapatkan bantuan untuk perbaikan ruang produksi

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan maka diperlukan peningkatan kualitas layanan pada kegiatan sertifikasi, dengan cara :

- a. Meningkatkan monitoring kegiatan oleh petugas dan pimpinan terutama terhadap evaluasi permohonan sertifikasi dan evaluasi CAPA sehingga *timeline* layanan sertifikasi dapat tercapai.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta dinas terkait dalam melakukan kegiatan bersama untuk pembinaan kepada pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan/bimtek sehingga petugas mampu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terutama pendampingan terhadap penerapan aplikasi yang sering mengalami kendala dari pelaku usaha.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Meningkatkan komunikasi petugas dengan pelaku usaha terkait GAP analisis yang ada.
- b. Memberikan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha terkait Sertifikasi produk baik Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Peningkatan kompetensi teknis petugas Loka POM di Dharmasraya
- b. Meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha terkait kendala dan pembinaan kepada pelaku usaha
- c. Memastikan komitmen pelaku usaha dalam perizinan produk

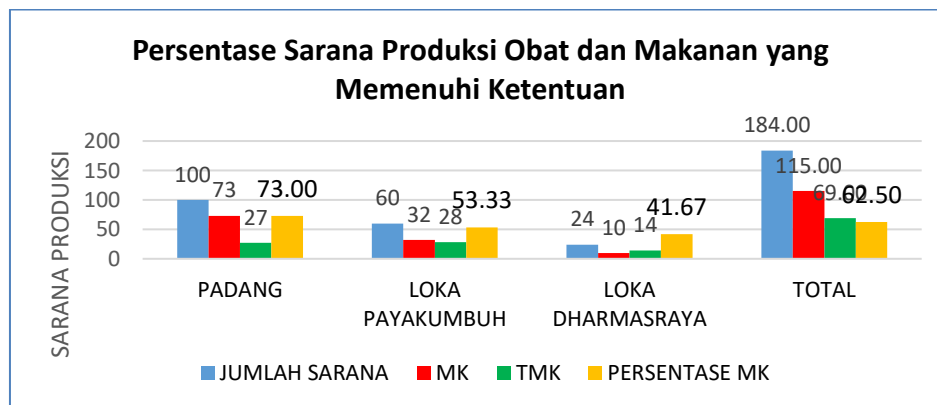
D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	62,50	111,61	Sangat baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

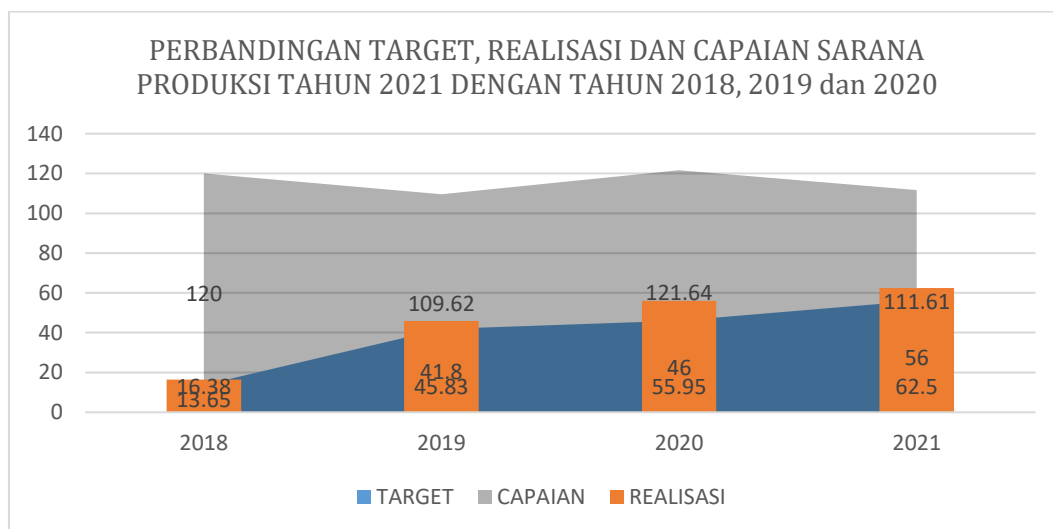
Pada tahun 2021 target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 56%, sedangkan realisasi adalah 62,50%, sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 111,61% dengan kriteria Sangat baik. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 115 sarana dari 184 sarana yang diperiksa tahun 2021.



Gambar 3.47. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 (16,38%) terjadi kenaikan 46,12%, tahun 2019 (45,83) terjadi kenaikan 16,67% dan tahun 2020(55,95) terjadi kenaikan 6,55%. Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2018 (120%) maka terjadi penurunan 8,39% dan tahun 2019 (109,62%) terjadi kenaikan 1,99% dan tahun 2020 (121,63%) terjadi penurunan 10,02%. Kenaikan realisasi yang diikuti dengan penurunan capaian terjadi karena adanya kenaikan target tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM Padang 2020-2024



Gambar 3.48 Perbandingan target, realisasi dan capaian Saranan Produksi tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 70%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 89,29%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

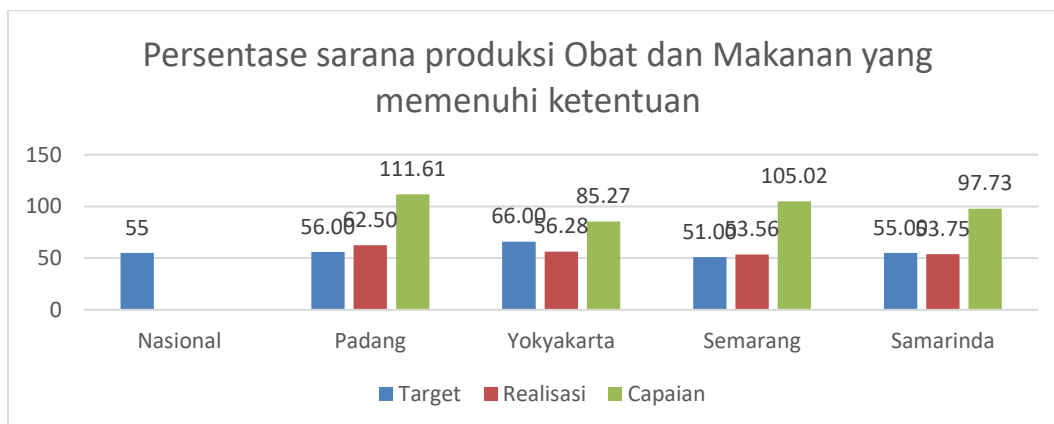
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa)x 100%. Pengawasan sarana Produksi yang diperiksa di wilayah Sumatera Barat yang meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM dilakukan berbasis risiko.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 55, maka realisasi Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target nasional dengan capaian 113,64% (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang(62,50%) diikuti oleh BBPOM di Yokyakarta (56,28%), dan BBPOM di Samarinda 53,75%) dan BBPOM di Semarang (53,56%). Seluruh target Balai Besar POM yang berada dalam 1 kluster telah mencapai target nasional.

Pencapaian target Nasional Sarana Produksi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan sarana produksi pangan MD terhadap penerapan aspek CPPOB, pembinaan yang diberikan oleh petugas terhadap pelaku usaha pada kegiatan KIE, Webinar maupun layanan publik secara langsung maupun tidak langsung seperti pemanfaatan aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi), Media Sosial dan melalui Webinar Online. Sarana produksi Obat yang sudah menerapkan CPOB secara maksimal sehingga dihasilkan obat aman dan bermutu. Pada sarana produksi pangan pada umumnya yang tidak memenuhi ketentuan karena belum memahami label yang sesuai ketentuan, dokumentasi produk yang belum lengkap dan penerapan Hygiene dan Sanitasi yang masih kurang pada sarana produksi. Adanya kegiatan pembinaan melalui peningkatan wawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).



Gambar 3.49 Perbandingan target, realisasi dan capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 disebabkan antara lain :

- a. Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pemeriksaan sarana produksi menjadi luring dan daring, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan dan level PPKM di daerah setempat. Pemilihan sarana produksi yang akan diperiksa berbasis risiko karena masih dalam kondisi pandemic Covid-19 dan dilakukan metode pemeriksaan yang sesuai prosedur kesehatan dengan melengkapi masker, mengkoordinasikan pemeriksaan dengan sarana produksi serta membatasi waktu tatap muka dengan petugas dalam rangka perlindungan keamanan petugas dan pihak pelaku usaha .
- b. Adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Pada tahun 2021 secara virtual maupun melalui whatsapp grup untuk peningkatan kompetensi petugas pengawas sarana produksi seperti forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM . Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Sebagian besar target sarana produksi merupakan sarana produksi Pangan Olahan yang sudah menerapkan CPPOB.
- b. Pemahaman pelaku usaha terkait penerapan Cara Produksi yang Baik pada Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan sudah meningkat.
- c. Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan olahan yang terdaftar di BPOM terutama penerapan CPPOB.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Pemeriksaan sarana produksi di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya di dominasi dengan produksi pangan IRTP, dari total 24 sarana produksi yang dilakukan pengawasan terdapat

14 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, dimana masih rendahnya komitmen dari pelaku usaha dalam penerapan pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT).

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran, pencapaian target dan protokol kesehatan
- b. Melakukan bimbingan teknis/ pembinaan di sarana produksi baik secara langsung saat pengawasan maupun melalui surat rekomendasi tindak lanjut yang diberikan
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenerapan CPP-IRT di sarana IRTP.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dalam penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB, serta CPPB-IRT.
- b. Koordinasi dengan lintas sektor terkait terutama dengan Dinas Kesehatan terutama peningkatan penerapan CPPBIRT pada IRTP yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tentang CPPB-IRT saat melakukan pemeriksaan
- b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui penyuluhan yang berkoordinasi dengan lintas sektor

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan IRTP melalui peningkatan UMKM IRTP didaerah seperti penyuluhan PKP bagi pelaku usaha/UMKM, pengawalan label pre market dan post market, pengawasan penggunaan bahan berbahaya, BTP dan bahan lain yang dilarang digunakan pada produk pangan.

- b. Melakukan pengawalan terhadap dana DAK Non Fisik badan POM yang diterima oleh 19 Kabpuatem/Kota di wilayah Sumatera Barat yang bertujuan membantu dinas terkait terhadap pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan yang ada pada Pemda dan bersinergis dalam memfasilitasi nara sumber, KIE serta pelaporan melalui SMARTPOM.
- c. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung melalui program sijempol (siap jemput bola) yaitu layanan terhadap pelaku usaha dalam proses sertifikasi sarana produksi obat dan makanan pada pengawasan sarana dan melakukan pendampingan proses perbaikan CAPA adan tindak lanjut dari ketidaksesuaian.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah terkait dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha IRTP dalam penerapan CPPBIRT.
- b. Memberikan Bimtek atau Sosialisasi dalam rangka reviu kepada pelaku usaha terkait Penerpan CPPOB dan CPPBIRT.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha secara langsung pada saat pengawasan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan kepada pelaku usaha

E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

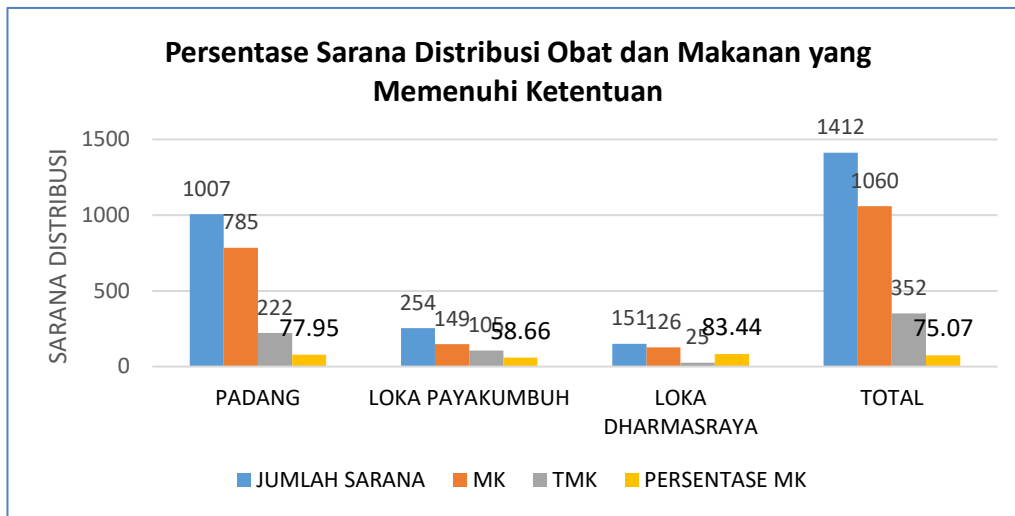
Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	75,07	112,05	Sangat Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Pada tahun 2021 target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 67% dengan realisasi 75,07% sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 112,05% dengan kriteria Sangat Baik.

Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 1060 sarana dari 1412 sarana yang diperiksa tahun 2021.



Gambar 3.50 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 (52,29%) maka terjadi kenaikan 22,78%, pada tahun 2019 (59,21%) terjadi kenaikan 15,86% dan pada tahun 2020 (66,67%) terjadi kenaikan 8,4%. Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2018 (117,9%) maka terjadi penurunan 5,85% dan tahun 2019 (118,9%) terjadi penurunan 6,85% dan tahun 2020 (111,11%) terjadi kenaikan 0,9%.

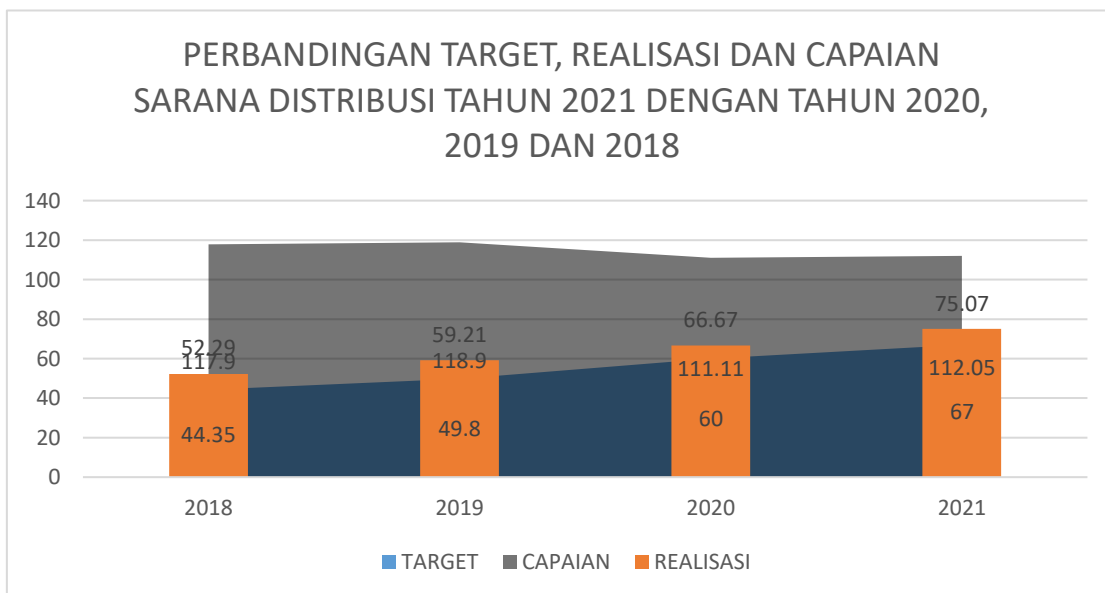
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : $(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}) \times 100 \%$.

Salah satu indikator terhadap penguatan system pengawasan obat dan makanan dilakukan pengawasan pre market dan post market. Pengawasan post market termasuk salah satunya pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan . Pengawasan ini melibatkan Balai Besar POM Padang, Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya. Adapun sarana distribusi obat dan makanan meliputi sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan

kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Padang, Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya .

Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku izin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga apotek yang melakukan panel penjualan obat. Balai Besar POM di Padang banyak melakukan pemeriksaan kepada sarana dalam rangka penelusuran kasus dari Badan POM maupun dari Balai Besar POM lainnya, maupun Loka POM.

Selama tahun 2021 berdasarkan laporan BBPOM Padang telah ditemukan produk obat tradisional dan suplemen Kesehatan TIE/ kedaluwarsa Produk tersebut diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Padang untuk mencegah produk tersebut dibeli oleh masyarakat



Gambar 3.51 Perbandingan target, realisasi dan capaian Sarana Distribusi tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020

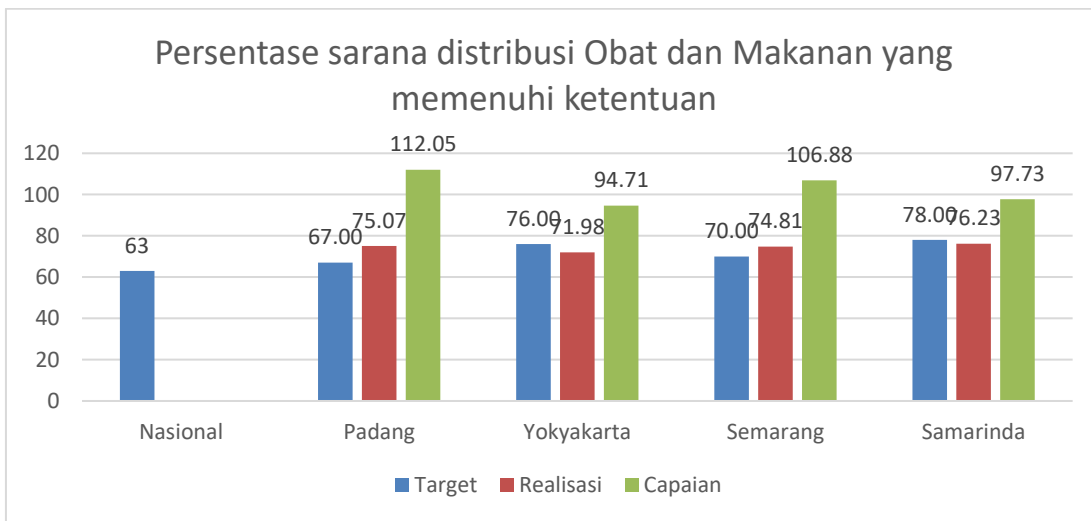
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 75%, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target akhir Resntra 2020-2024 dengan capaian 100,09%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 63, maka realisasi Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target nasional dengan capaian 119,16% (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda (76,23%), Padang (75,07), Semarang (74,81) dan Yokyakarta (71,98%). Realisasi kinerja semua Balai Besar POM yang berada dalam 1 kluster mencapai target nasional.



Gambar 3.52 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- Pemilihan sarana distribusi obat dan makanan dengan skala prioritas terhadap sarana dengan risiko tinggi (high risk) sehingga meningkatkan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

- b. Terjadinya peningkatan pemeriksaan terhadap sarana yang mengelola vaksin sehingga penurunan target sarana distribusi lainnya.
- c. Pada masa terjadinya pandemik, pemeriksaan sarana yang dilakukan secara luring terbatas karena adanya sarana yang tutup dan terdapat tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 sehingga terjadi pengalihan ke sarana target lainnya yang sama
- d. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Rendahnya persentase sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena pemilihan sarana berdasarkan analisis resiko, sehingga sebagian besar sarana terpilih merupakan sarana dengan tingkat kepatuhan rendah.
- b. Dengan adanya pengawasan dalam rangka intensifikasi vaksin sebagian besar temuan sarana disebabkan oleh pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas.
- c. Untuk sarana distribusi yang memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan yang besar adalah sarana distribusi kosmetik karena masih banyaknya ditemukan produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Tercapainya sasaran kinerja pengawasan sarana distribusi obat dan makanan karena adanya kerjasama yang baik antara pihak sarana dengan petugas Loka POM Dharmasraya untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Loka POM Dharmasraya melakukan pendekatan dan terus melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada di wilayah kerja, agar terjalin komunikasi yang baik dan pihak sarana menjadi lebih kooperatif.
- b. Loka POM Dharmasraya juga berupaya untuk merubah pola piket pihak sarana terhadap petugas loka POM Dharmasraya untuk lebih berkomitmen dan beranggapan bahwa loka POM Dharmasraya adalah mitra dengan pihak sarana distribusi.
- c. Adanya sarana distribusi yang masih TMK (25 sarana), merupakan sarana yang mempunyai temuan berulang dari tahun lalu, diantaranya sarana yang paling banyak TMK yaitu klinik.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) di loka Dharmasraya yang terbatas dan adanya kegiatan di luar perencanaan yang mendadak.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan berbasis resiko
- b. Menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana obat dan makanan
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja melalui efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran dan tindak lanjut
- d. Melakukan monitoring terhadap lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan peraturan yang ada di Pusat agar diterapkan di daerah.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang telah dilakukan sarana sehingga diharapkan tidak ada temuan yang berulang pada pemeriksaan berikutnya.
- b. Memberikan Bimtek terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan terkait peraturan perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan secara rutin
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat terutama sarana distribusi milik pemerintah.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas Loka POM di Kab. Dharmasraya.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Mengadakan KIE rutin kepada masyarakat termasuk pelaku usaha baik langsung maupun tidak langsung
- b. Melakukan edukasi melalui medsos, Instagram, twitter, dan facebook
- c. Melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap update peraturan terbaru, peningkatan SDM agar persamaan persepsi petugas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.

- d. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dan organisasi profesi dalam pemberian informasi kepada masyarakat, memberi edukasi agar dapat memilih obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi dengan petugas yang kompeten dan handal
- Loka POM di Payakumbuh :
- a. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sehingga perbaikan yang dilakukan sarana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Loka POM di Dharmasraya :

Untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini telah diupayakan pemberian sanksi yang lebih tegas dan langsung ke sarana serta pengamanan produk obat dan makanan yang ditemukan di sarana bila ditemukan yang tidak ada izin edar/ tidak sesuai aturan. Juga diberikan peringatan dan peringatan keras untuk sarana yang temuannya berulang.

F. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Padang berdasarkan 6 aspek meliputi : kegiatan pelayanan (30%), profesionalitas SDM (18%), Sarana Prasarana (15%), Sistem Informasi pelayanan Publik (SIPP) (15%), Konsultasi dan Pengaduan (15%) dan Inovasi (7%).

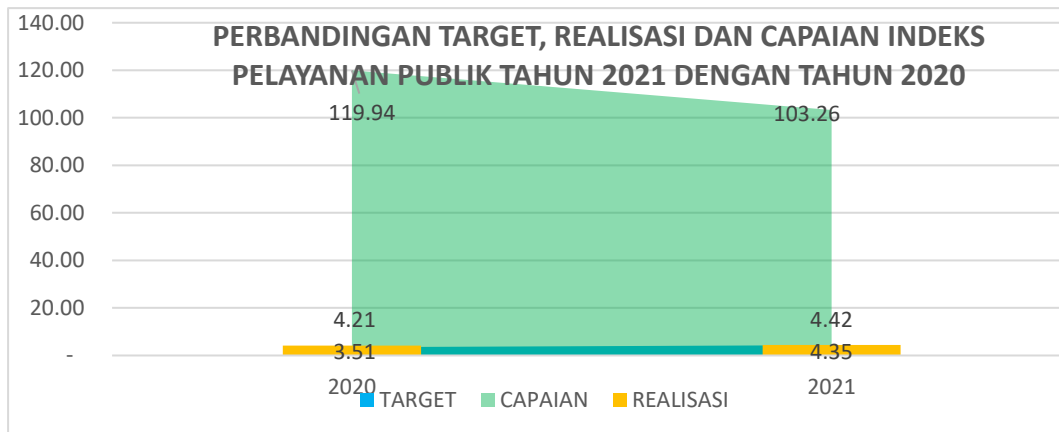
Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,42	101,61	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 4,35 dengan realisasi 4,42 sehingga persentase capaian atas indikator kinerja ini adalah 101,61% dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya



Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2020 (4,21) terjadi kenaikan 0,21 Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (119,94%) maka terjadi penurunan 18,33%. Kenaikan realisasi yang diikuti dengan penurunan capaian terjadi karena adanya kenaikan target tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM Padang 2020-2024

Gambar 3.53 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks pelayanan publik tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

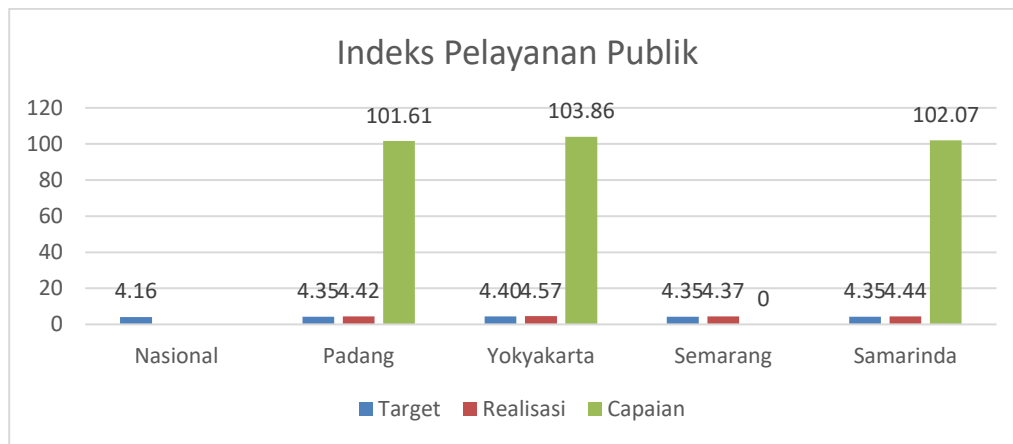
Target akhir Renstra Indeks Pelayanan Publik adalah 4,55, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024 dengan capaian 97,14%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar, meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan serta menambah media informasi layanan publik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks Pelayanan Publik adalah 4,16, maka realisasi Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target nasional dengan capaian 106,25% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Yokyakarta (4,57), BBPOM di Samarinda (4,4), BBPOM di Padang (4,42) dan BBPOM di Semarang (4,37). Realisasi BBPOM di Padang-sudah melebihi target

yang ditetapkan namun bila dibandingkan dengan Balai-balai dalam satu kluster capaiannya masih dibawah BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Samarinda.



Gambar 3.54 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Perbaiki sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik
- b. Meningkatkan kompetensi SDM di Pelayanan Publik melalui pelatihan berkelanjutan kepada personel-personel pelayanan publik
- c. Penambahan media informasi layanan publik seperti brosur pelayanan publik dan buku galeri inovasi yang dapat digunakan oleh pengguna layanan
- d. Meningkatkan fasilitas layanan publik dengan menyediakan alat baca (kacamata), fasilitas minum teh/kopi, snack dan permen untuk digunakan oleh pengguna layanan.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pemanfaatan Sistem Informasi seperti aplikasi Galamai yang dapat mempercepat layanan dan memberikan layanan yang lebih akuntabel, transparan dan konsisten.
- b. Penyusunan Standar Kebijakan yang telah melibatkan OPD terkait, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
- c. Memberikan sosialisasi tentang Standar Pelayanan, Alur Pelayanan dan Kebijakan Pelayanan.

7. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
 - a. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan SDM di Pelayanan Publik melalui pelatihan berkelanjutan kepada personel-personel pelayanan publik
 - c. Melakukan pemantauan/monev terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik BBPOM di Padang
 - d. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi aplikasi Galamai

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama,. Hasil capaian rata-rata ketiga indikator tersebut adalah 99,51%. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	92,15	98,03	Baik
1.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Baik
2.	Jumlah desa pangan aman	18	18	100	Baik
3.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-V sebagai berikut :

A. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

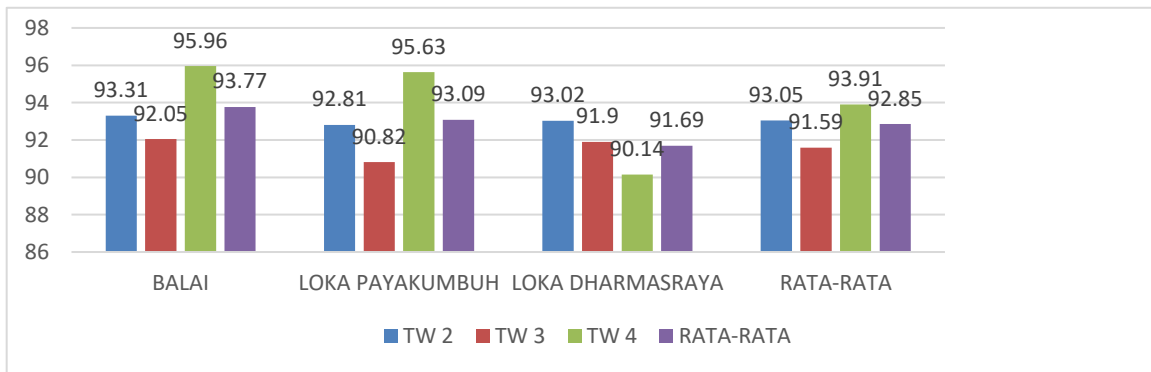
Tabel 3.25. Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	92,15	98,03%	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisas Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2021 adalah 92,15 dari target sebesar 94 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 98,03% dengan kriteria Baik

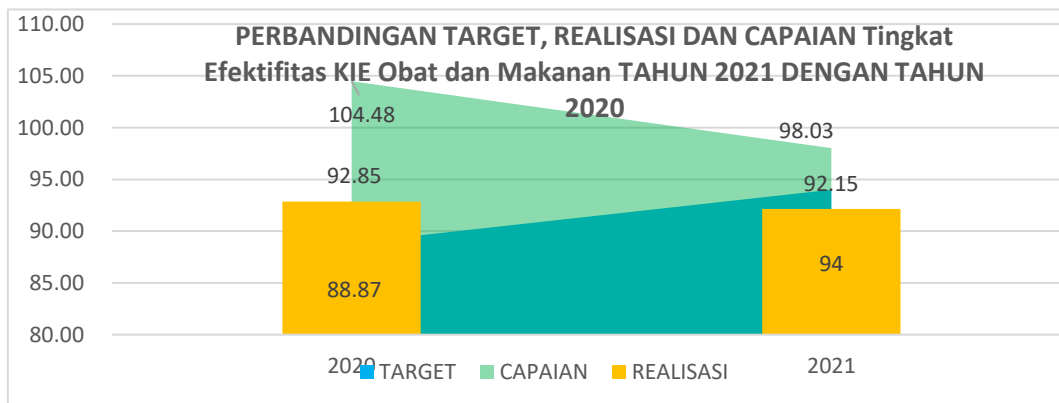
Realisasi Tingkat efektifitas KIE merupakan gabungan nilai Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya. Sedangkan nilai masing-masing adalah rata-rata realisasi nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 sd 4 Tahun 2021.



Gambar 3.55. Tingkat Efektifitas KIE BBPOM di Padang, Loka Payakumbuh dan Dharmasraya

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan Tingkat Efektifitas KIE pada tahun 2020 (92,85) terjadi penurunan 0,7. Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (104,48%) maka terjadi penurunan 6,45% Penurunan capaian terjadi karena adanya kenaikan target tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM Padang 2020-2024.



Gambar 3.56 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan tahun 2020

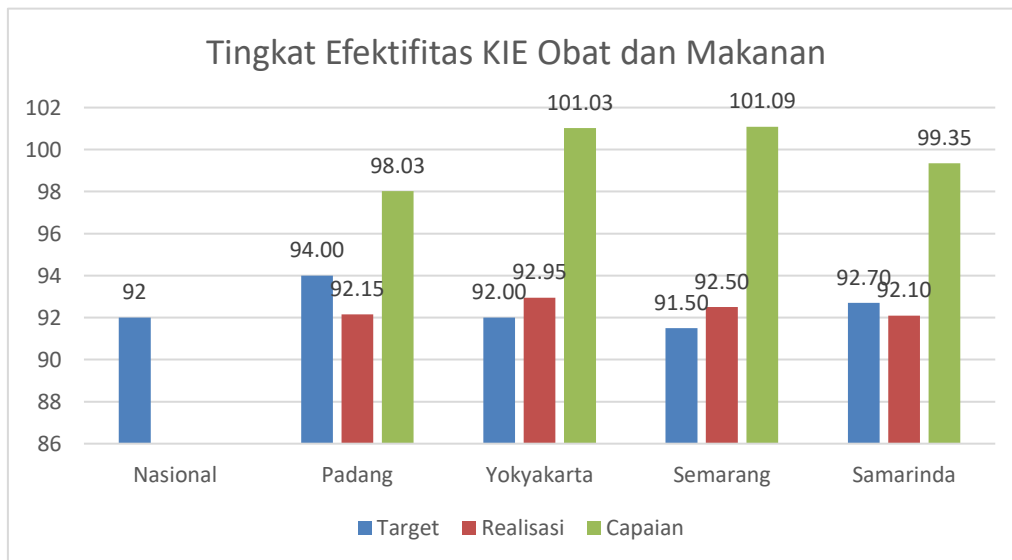
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra 2020-2024 Tingkat Efektifitas KIE adalah 98,3, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024 dengan capaian 93,74%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai seperti melakukan analisis KIE agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat penyampaian materi sedemikian rupa menarik dengan menggunakan media yang beragam.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Tingkat Efektifitas KIE adalah 92, maka realisasi Balai Besar POM di Padang dapat mencapai target nasional dengan capaian 100,16% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Yogyakarta (92,95), BBPOM di Semarang (92,50), BBPOM di Padang (92,15) dan BBPOM di Samarinda (92,10 BBPOM di Padang sudah melebihi target nasional namun masih berada dibawah BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Semarang.



Gambar 3.57 Perbandingan target, realisasi dan capaian Ptingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- a. Analisis KIE belum dilakukan secara baik sehingga belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Pelaksanaan KIE disertai dengan program vaksinasi sehingga peserta kurang maksimal menerima informasi yang diberikan
- c. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan KIE mengalami berbagai kendala diantaranya keterbatasan luas ruangan dengan jumlah peserta dalam penerapan protokol kesehatan, sebagian KIE dilaksanakan secara daring.
- d. Kurangnya minat peserta dalam mengikuti kegiatan KIE yang disebabkan beberapa faktor seperti pengemasan dan penyampaian materi kurang menarik serta ruangan yang kurang nyaman.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pelaksanaan KIE disertai dengan program vaksinasi sehingga peserta kurang maksimal menerima informasi yang diberikan
- b. Penyebaran informasi melalui media sosial masih kurang maksimal
- c. Metode KIE masih kurang bervariasi

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Membuat analisis KIE sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menambahkan permainan edukasi yang menarik dalam setiap pelaksanaan KIE untuk meningkatkan minat masyarakat
- c. Melaksanakan KIE dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial untuk penyebaran informasi dan kelancaran layanan Informasi

B. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 3.26. Capaian Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021

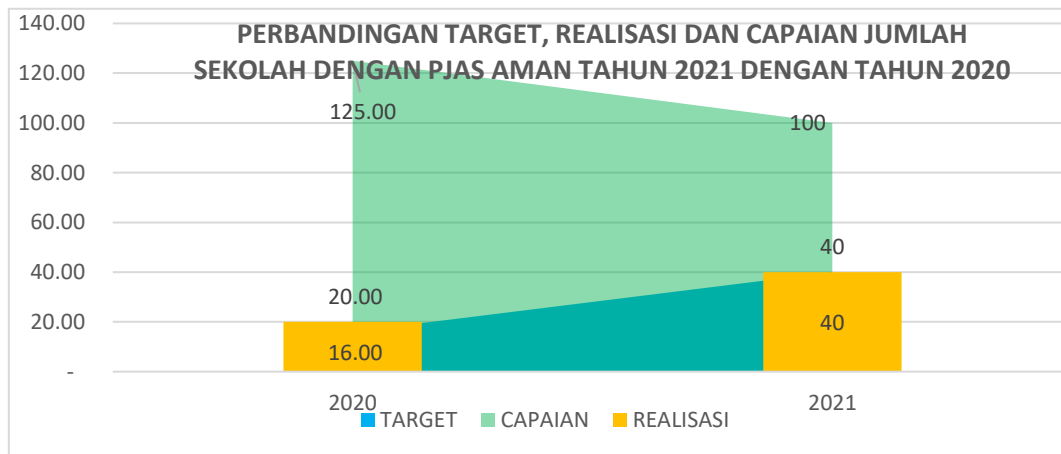
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	40	100	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2021 adalah 40 dari target sebesar 40 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2020

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada tahun 2020 (20 sekolah) terjadi penambahan menjadi 40 sekolah. Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (125%) maka terjadi penurunan 25%. Penurunan capaian karena pada tahun 2020 terdapat kelebihan jumlah sekolah yang diintervensi, sementara pada tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dilakukan sesuai dengan juknis yang telah diberikan.



Gambar 3.58 Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

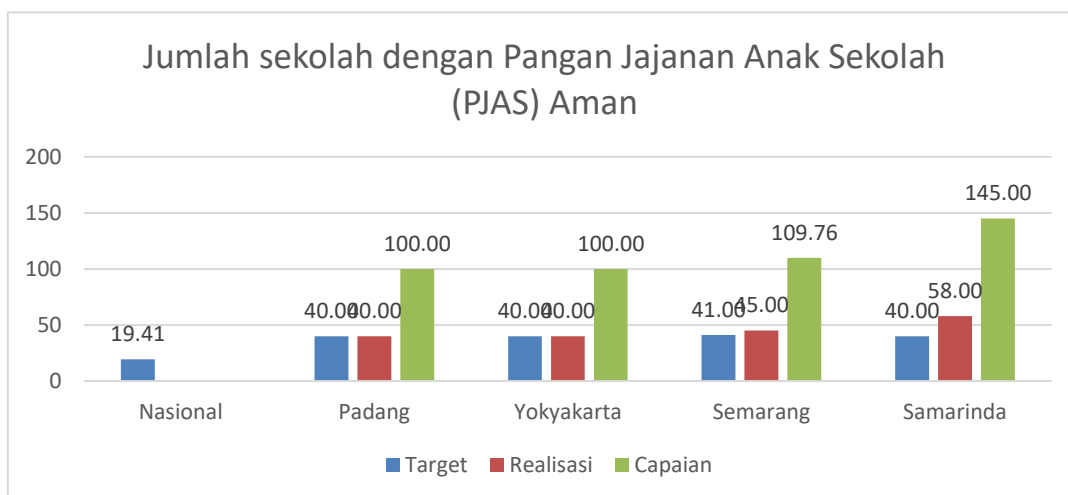
Target akhir Renstra (Tahun 2024) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 125, maka bila dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2020-2024 capaian yang diperoleh adalah 32% dengan kriteria sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis agar target Renstra 2024 dapat tercapai. Kegiatan yang dilakukan

telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Tahun berikutnya akan terjadi peningkatan target sekolah dengan PJAS aman.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 1330 yang dilaksanakan di 34 propinsi, maka tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Samarinda (58 sekolah) diikuti oleh BBPOM di Semarang (45 sekolah), sedangkan BBPOM di Padang dan Yokyakarta masing-masing 40 sekolah. Realisasi yang dicapai BBPOM di Padang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan namun bila dibandingkan dengan Balai-balai dalam satu kluster, BBPOM di Padang menduduki urutan dibawah BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Semarang.



Gambar 3.59 Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Pengawasan terhadap sekolah intervensi dilakukan secara terus menerus melalui *whatsapp* grup.

- b. Pemantauan seluruh sekolah intervensi agar mendapatkan Sertifikat PJAS Aman dengan terus memeriksa upload data dukung ke dalam bit.ly/MKKPS2021 sesuai dengan permintaan pada formulir sertifikasi.
- c. Memberikan motivasi kepada sekolah intervensi untuk melakukan replikasi kepada sekolah lain di kecamatan yang sama.
- d. Adanya kegiatan Evaluasi dan Sertifikasi PJAS Aman untuk mengumumkan hasil penilaian kuisisioner pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan dan pengumuman hasil penilaian sertifikasi PJAS Aman memberikan semangat baru terhadap tim keamanan pangan sekolah baik sekolah intervensi ataupun replikasi

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Adanya komitmen tertulis dari seluruh Kepala Sekolah yang diintervensi
- b. Koordinasi dengan Kepala Sekolah dan Tim Keamanan Pangan Sekolah melalui *whatsapp* grup sangat efektif dan respon dari sekolah cukup baik
- c. Pengumuman hasil penilaian pengetahuan, sikap dan perilaku terkait keamanan pangan dan hasil dari penilaian sertifikasi disampaikan melalui kegiatan Evaluasi dan Sertifikasi PJAS
- d. Semangat Kepala Sekolah dan Tim Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan replikasi PJAS Aman kepada sekolah lain dalam kecamatan yang sama sehingga didapatkan total 83 sekolah yang direplikasi PJAS Aman

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Membuat *whatsapp* grup untuk memudahkan pengawalan sekolah intervensi PJAS yang beranggotakan seluruh Tim Keamanan Pangan dari seluruh sekolah
- b. Memastikan sekolah yang akan diintervensi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

C. Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021

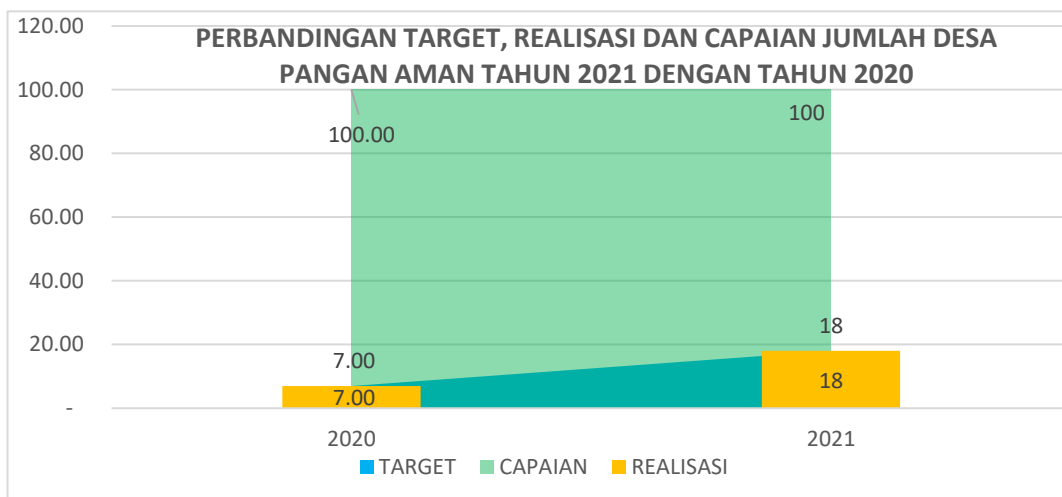
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	18	18	100	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2021 adalah sebesar 18, dengan target 18, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah desa pangan aman pada tahun 2020 (7 desa) terjadi penambahan menjadi 18 desa. . Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (100%) maka sama dengan tahun 2021. Penambahan target di tahun 2021 untuk melengkapi target carry over di tahun 2020.



Gambar 3.60 Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan tahun 2020

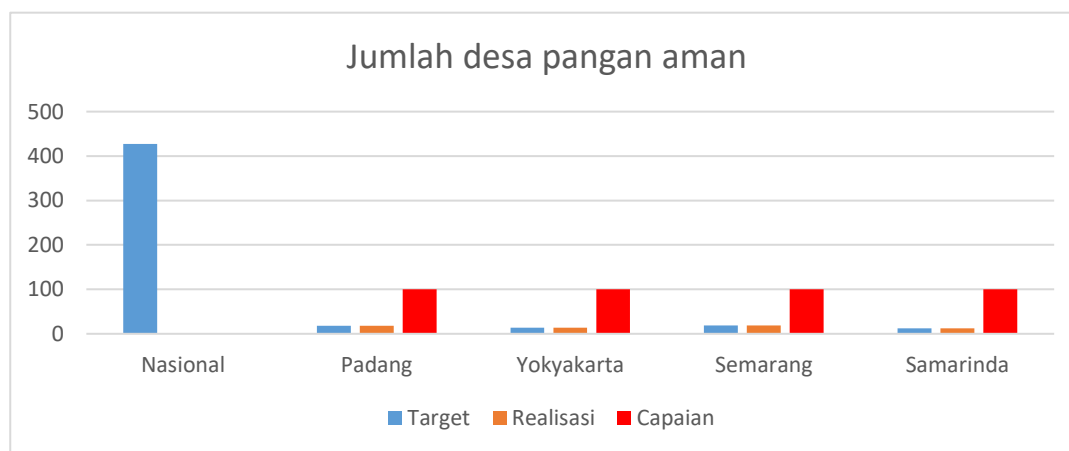
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Jumlah desa pangan aman adalah 46 desa, maka bila dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2020-2024 capaian yang diperoleh adalah 39,13% dengan kriteria sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis agar target Renstra 2024 dapat tercapai. Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Jumlah desa pangan aman adalah 427 yang dilaksanakan di 34 propinsi, maka tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (19 desa) diikuti oleh BBPOM di Padang (18 desa), BBPOM di Yogyakarta (14 desa) dan BBPOM di Samarinda (12 desa). Realisasi yang dicapai BBPOM di Padang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan namun bila dibandingkan dengan Balai-balai dalam satu kluster, BBPOM di Padang menduduki urutan kedua dibawah BBPOM di Semarang.



Gambar 3.61 Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- a. Pemilihan desa/nagari yang akan diintervensi dengan mempertimbangkan komitmen Pemerintah Daerah sampai ke tingkat desa/nagari.
- b. Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa dari Nagari yang diintervensi merupakan kader program lain di nagari seperti kader posyandu, kader PKK dan kader lansia yang memiliki motivasi dan pengalaman untuk melaksanakan Program Desa Pangan Aman
- c. Adanya penunjukan penanggungjawab kegiatan untuk setiap Kabupaten/Kota yang akan diintervensi

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Koordinasi dengan lintas sektor telah berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan tanpa kendala.
- b. Monitoring pelaksanaan Program Desa Pangan Aman yang dilakukan secara terus menerus kepada Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.
- c. Penyusunan jadwal dilakukan secara fleksibel dengan koordinasi yang berkesinambungan kepada lintas sektor dan desa/nagari/kelurahan yang diintervensi
- d. Kegiatan keamanan pangan terpadu tidak hanya melibatkan desa/nagari tapi juga sekolah dan pasar sehingga program keamanan pangan lebih menyeluruh.
- e. Efisiensi waktu dan kegiatan disebabkan kegiatan keamanan pangan terpadu dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Advokasi dilakukan tidak hanya pada forum advokasi saja tetapi telah dilakukan sejak kegiatan audiensi dalam pemilihan desa/nagari intervensi
- b. Melakukan sinergi dengan program lain baik dari Program Badan POM maupun lintas sektor lain (Posyandu, KIE Tomas, Dasawisma, Germas, dan lain-lain)
- c. Melakukan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu.
- d. Pemilihan nagari intervensi dilakukan lebih selektif dengan tetap melibatkan pemerintah kabupaten/kota
- e. Adanya jaminan keberlangsungan program keamanan pangan terpadu dalam bentuk laporan kegiatan setelah intervensi yang dilakukan oleh desa/nagari kepada BBPOM di Padang dengan tembusan Bupati/Walikota.

D. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tabel 3.28. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	6	100	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2021 adalah sebesar 6 dari target sebesar 6 sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 100% dengan kriteria Baik

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020

Bila dibandingkan dengan realisasi Jumlah desa pangan aman pada tahun 2020 (7 desa) terjadi penambahan menjadi 18 desa. Adapun bila dibandingkan persentase capaian terhadap tahun 2020 (100%) maka sama dengan tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021.



Gambar 3.62 Perbandingan target, realisasi dan capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang adalah 46, maka bila dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra 2020-2024 capaian yang diperoleh adalah 39,13% dengan kriteria sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis agar target Renstra 2024 dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis agar target Renstra 2024 dapat tercapai antara lain adalah membentuk komitmen dan koordinasi yang baik dengan stakeholder dan pengelola pasar.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 165 yang dilaksanakan di 34 propinsi., maka tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (10 pasar)) diikuti oleh BBPOM di Padang (6 pasar), BBPOM di Samarinda (4 pasar) dan BBPOM di Yogyakarta (2 pasar). Realisasi yang dicapai BBPOM di Padang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan namun bila dibandingkan dengan Balai-balai dalam satu kluster, BBPOM di Padang menduduki urutan kedua dibawah BBPOM di Semarang.



Gambar 3.63 Perbandingan target, realisasi dan capaian Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

- Adanya komitmen dan dukungan pengelola dan komunitas pasar serta pemangku kepentingan terkait dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pengelola Pasar menjadi salah satu faktor tercapainya kegiatan sesuai rencana.
- Masih terdapat kesalahan dalam penentuan parameter uji bahan berbahaya pada sampel
- Pemanfaatan *whatsapp group* sebagai media komunikasi dan koordinasi.

- e. Pelaksanaan program prioritas nasional keamanan pangan terpadu meliputi Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan secara terintegrasi sehingga dapat dilakukan secara komprehensif.
- f. Pandemi Covid-19 yang belum terkendali menyebabkan adanya berbagai macam penyesuaian dalam kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, namun dengan adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah sehingga program dapat terlaksana dengan baik.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Adanya program revitalisasi Pasar Tradisional yang dicetuskan oleh Pemerintah sehingga dapat disinkronkan dengan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- b. Koordinasi dengan lintas sektor telah berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilaksanakan tanpa kendala.
- c. Mensinergikan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan program Pemerintah Daerah
- d. Monitoring pelaksanaan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan secara terus menerus kepada Petugas Pengawas Pasar untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.
- e. Penyusunan jadwal dilakukan secara fleksibel dengan berkoordinasi secara berkesinambungan kepada lintas sektor dan petugas pasar yang diintervensi
- f. Kegiatan keamanan pangan terpadu tidak hanya melibatkan pasar tetapi juga desa/nagari dan sekolah sehingga program keamanan pangan lebih menyeluruh.
- g. Efisiensi waktu dan kegiatan disebabkan kegiatan keamanan pangan terpadu dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Masih diperlukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dalam rangka keberlanjutan program dan replikasi ke pasar tradisional yang lain. Advokasi dilakukan tidak hanya pada forum advokasi saja tetapi telah dilakukan sejak kegiatan audiensi dalam pemilihan pasar intervensi
- b. Melakukan sinergi dengan program lain baik dari Program Badan POM maupun lintas sektor lain (Pasar Sehat, Pasar Tertib Ukur, Pengawasan Pangan Segar, dan lain-lain)

- c. Melakukan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu.
- d. Pemilihan pasar intervensi dilakukan lebih selektif sesuai persyaratan dalam petunjuk teknis dengan tetap melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Adanya jaminan keberlangsungan program keamanan pangan terpadu dalam bentuk laporan kegiatan setelah intervensi yang dilakukan oleh petugas pengelola pasar kepada BBPOM di Padang dengan tembusan Bupati/Walikota.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 96,88% dengan kriteria baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,18	98,18	Baik
2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95,58	95,58	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-VI sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

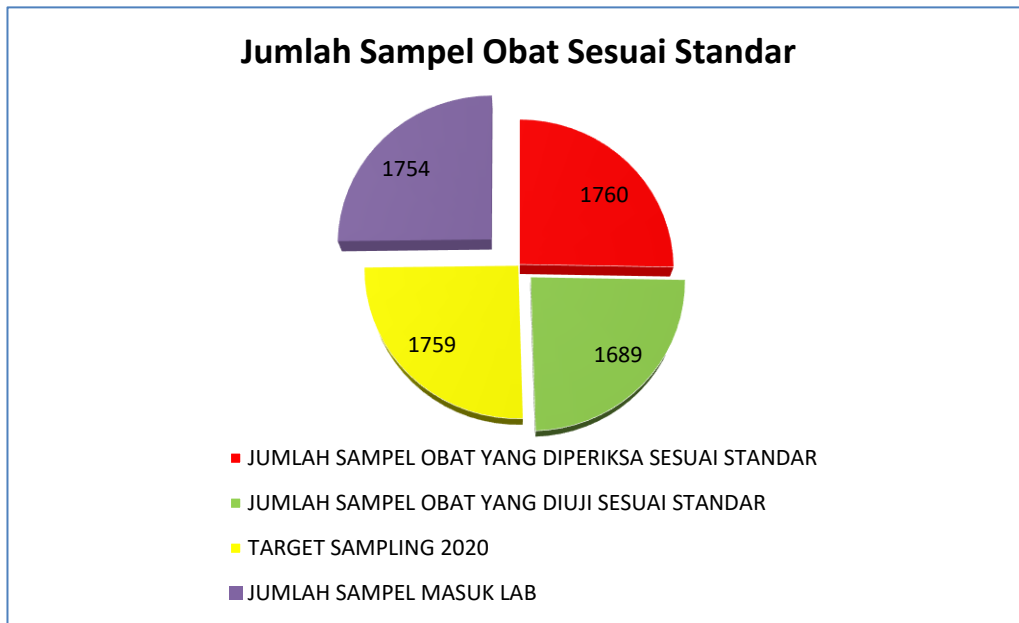
Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,18	98,18	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2021 adalah 98,18% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 98,18% dengan kriteria Baik



Gambar 3.64 Jumlah Sampel Obat Sesuai Standar Tahun 2021

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji memenuhi standar diperoleh sebesar 98,18 %. Sampel yang diperiksa yang memenuhi standar sebanyak 1760 sampel, dan sampel yang masuk laboratorium adalah 1754 sampel, terdapat 6 sampel yang TIE sehingga tidak dilakukan pengujian di laboratorium, karena sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian bahwa sampel yang TIE, rusak atau kedaluarsa tidak dilakukan pengujian di laboratorium.

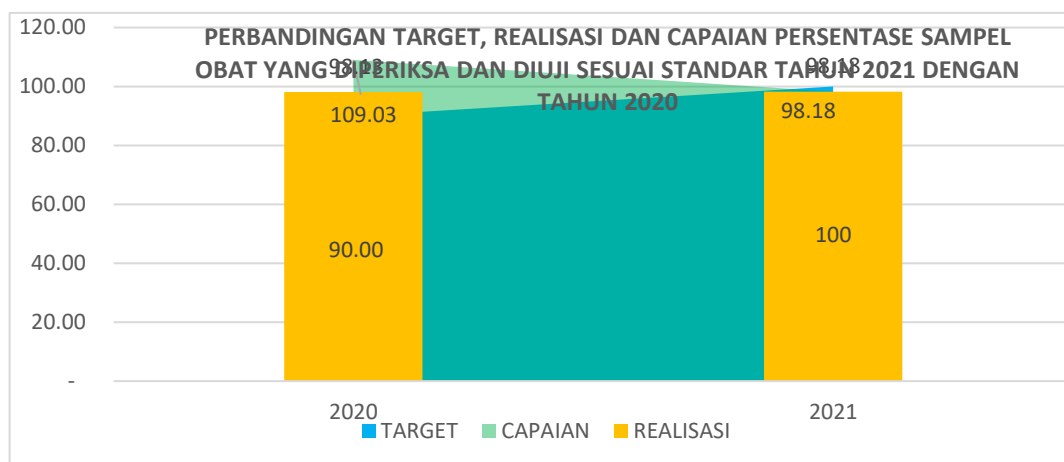
Jumlah Sampel yang diuji yang memenuhi standar sebanyak 1689 sampel dari 1754 sampel yang diuji atau masuk ke laboratorium. Sebanyak 65 sampel yang diuji yang tidak memenuhi standar

terdiri dari sampel Obat sebanyak 49 sampel, Obat Tradisional sebanyak 3 sampel, sampel Suplemen kesehatan 12 sampel dan sampel Kosmetik sebanyak 1 sampel.

Sampel yang tidak memenuhi standar disebabkan karena keterbatasan dan ketidakterediaan reagensia seperti Natrium Lauril Sulfat dan Tetrabutylamonium hidroksida serta tidak tersedia instrumen seperti spektrofotometer IR, Raman, dan Fluorometer untuk pengujian identifikasi dan uji solusi. Hal ini menyebabkan sampel tidak dapat diuji PUK wajibnya terutama untuk sampel obat. Penyebab lainnya adalah adanya sampel tidak dapat dilakukan pengujian tepat waktu karena adanya pengulangan sampel Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat sehingga melebihi timeline yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 (98,13%) terjadi kenaikan 0,05%, terhadap capaian kinerja tahun 2020 (109,03) terdapat penurunan 10,85%. Hal ini disebabkan oleh perubahan target IKU tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM Padang 2020-2024 yaitu 100%, sehingga capaian target menurun dibandingkan tahun 2020.



Gambar 3.65 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024, namun

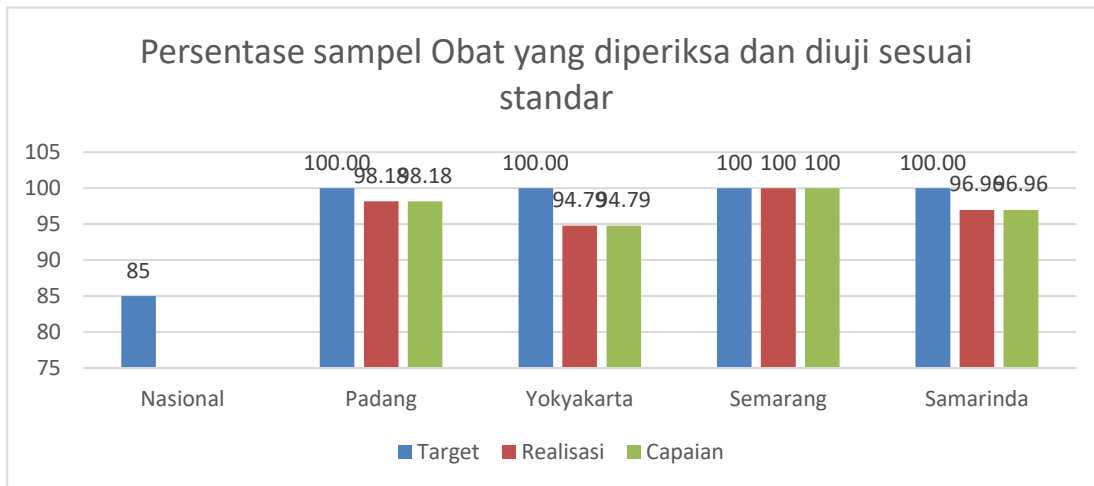
telah termasuk kategori baik dengan capaian 98,18%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai yaitu :

- a. Melakukan percepatan pengadaan reagensia dan suku cadang pada awal tahun
- b. Membuat perencanaan reagensia yang matang sesuai kebutuhan laboratorium, karena pada tahun 2021 anggaran reagensia untuk sampel rutin masih belum memadai
- c. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan baku banding secara mandiri,
- d. Meningkatkan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium. Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga meningkat, namun jumlah anggaran untuk kebutuhan ini relative tetap dari tahun ke tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 85% maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 115,51% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (100,00%) diikuti oleh BBPOM di Padang (98,18%), BBPOM di Samarinda (96,96%) dan BBPOM di Yokyakarta (94,79%). Realisasi Keempat balai yang berada dalam 1 kluster ini belum mencapai target IKU BPOM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Realisasi Kinerja supaya persentase capaian lebih meningkat yaitu membuat perencanaan yang matang terkait kebutuhan reagensia, suku cadang, baku pembanding dan pendukung lainnya serta anggaran pemeliharaan Alat Laboratorium yang memadai, sehingga semua sampel dapat diuji sesuai PUK dan tidak melewati *timeline* yang telah ditetapkan pada SOP, mengevaluasi kembali penetapan parameter uji dari pustaka acuan dalam pedoman sampling oleh PPPOMN terkait instrumen yang tidak memenuhi kriteria standar minimal alat, serta baku PEM banding yang pengadaannya sulit, sementara di PPPOMN tidak ada stoknya.



Gambar 3.66 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang telah melaksana kan :

- a. Rencana aksi yang dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan menyelesaikan uji tepat waktu yaitu dengan menerapkan Sistim Mutu ISO 17025:2107, dan melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian, dan sesuai SOP.
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan Timeline. Dalam pelaksanaan pengujian, MT, penyelia dan penguji harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian.
- c. Balai Besar POM di Padang dalam rangka memenuhi indikator target pengujian, selalu meningkatkan kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian. karena dengan pemahaman dan peningkatan kompetensi penguji maka sampel Obat dapat diuji sesuai standar. Untuk meningkatkan kompentensi petugas dilakukan pelatihan Analisis dengan Intrumen baik luring maupun daring melalui Zoom Meeting, Pelatihan Internal dan pelatihan lainnya.
- d. Melakukan Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha, koodinasi ini sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena terkadang pada saat reagensia, suku cadang dan alat laboratorium mengalami kendala maka perlu disepakati bersama kegiatan sampling pada saat tersebut, dan juga terhadap penerimaan

sampel di TPS, sehingga timeline penyelesaian sampel terpenuhi sesuai SOP, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pemeriksaan produk dilakukan sesuai dengan juknis penilaian untuk masing-masing komoditi.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait di pusat dalam penilaian produk yang dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Melakukan pemeriksaan sampel melalui kegiatan sampling dan penilaian/evaluasi penandaan sampel obat yang terpenuhi sesuai dengan target prioritas sampling.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan Internal dan Pelatihan Analisis dengan Instrumen baik internal maupun external melalui luring , daring /zoom Meeting dan pelatihan lainnya.
- b. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian. Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian, akan dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara melakukan pengujian yang belum masuk ruang lingkup, serta pelatihan terhadap parameter uji tersebut. Dan meningkatkan kapasitas Alat Laboratorium.

Loka POM di Payakumbuh :

Melakukan evaluasi secara rutin terhadap penilaian produk yang dilakukan serta hasil evaluasi dari pusat.

Loka POM di Dharmasraya :

Pelaksanaan sampling obat di lakukan sesuai dengan prioritas pedoman sampling, dan sampel di periksaan / dilakukan evaluasi label/penandaan terhadap produk sesuai dengan ketentuan

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan Balai Besar POM di Padang antara lain :

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan Reagensia yang dibutuhkan Laboratorium setiap tahunnya, sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Reagensia .
- b. Melakukan Rapat evaluasi bersama antara Substansi Pemeriksaan, dan Substansi Pengujian , Substansi Infokom dan Subtansi Penindakan dan Bagian Tata Usaha dan Kepala BBPOM terkait hasil uji, program kegiatan , serapan anggaran dan membahas kendala yang terjadi serta mencari solusi terhadap masalah yang timbul
- c. Rapat Evaluasi dengan subtansi pemeriksaanyang bertujuan untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan realisasi sampel yang masuk ke laboratorium, dan kesesuaian terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal tahun, serta tentang penandaan sampel
- d. Pengadaan baku pembanding secara mandiri, Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, sehingga Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium, Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji. Sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik.

Loka POM di Payakumbuh :

Meningkatkan pemahaman / kompetensi petugas yang melakukan penilain terhadap masing-masing komoditi.

Loka POM di Dharmasraya :

Peningkatan kompetensi dari petugas dalam pelaksanaan sampling dan evaluasi label/penandaan obat

B. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

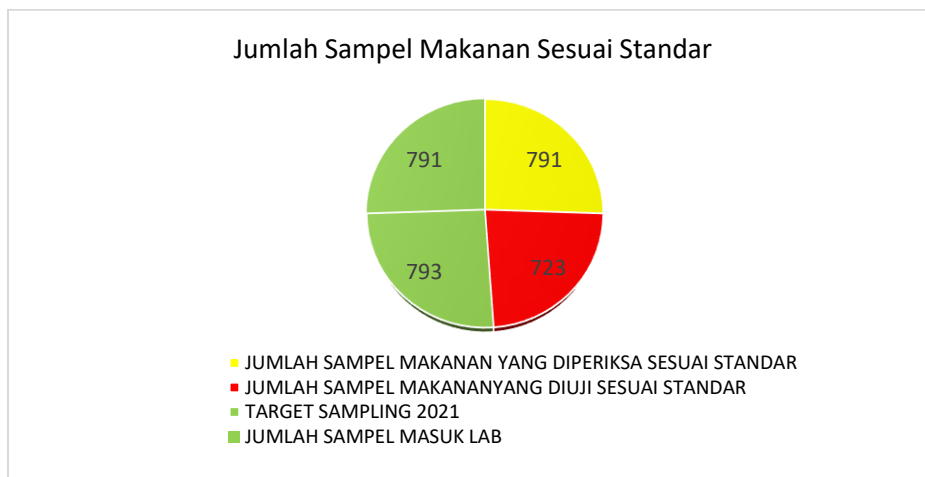
Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95,58	95,58	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang pada tahun 2021 adalah 95,58% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 95,58% dengan kriteria Baik



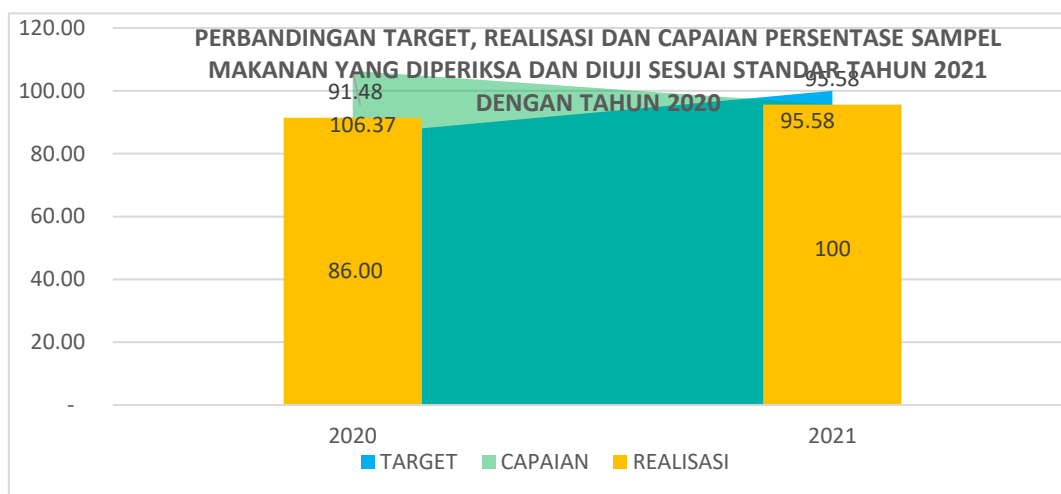
Gambar 3.67 Jumlah Sampel Makanan Sesuai Standar Tahun 2021

Realisasi Sampel makanan yang diperiksa dan diuji memenuhi standar diperoleh sebesar 95,58 %. Sampel yang diperiksa yang memenuhi standar sebanyak 791 sampel, dan semua sampel masuk laboratorium yaitu sebanyak 791 sampel.

Jumlah Sampel yang diuji yang memenuhi standar sebanyak 723 sampel dari 791 sampel yang diuji atau masuk ke laboratorium. Sebanyak 68 sampel yang diuji yang tidak memenuhi standar disebabkan karena keterbatasan reagensia, suku cadang dan baku banding sehingga menyebabkan sampel tidak dapat diuji PUK wajibnya, adanya kerusakan alat laboratorium juga menyebabkan keterlambatan pengujian sampel. Meningkatnya jumlah sampel pihak ketiga (terutama sampel DAK) yang diuji pada Triwulan IV dan keterbatasan anggaran untuk pengadaan Reagensia sampel Pihak ketiga (sampel DAK) juga menyebabkan penambahan jumlah sampel yang tidak memenuhi standar.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 (91,48%) terjadi kenaikan 4,1%, terhadap capaian kinerja tahun 2020 (106,37) terdapat penurunan 10,79%. Hal ini disebabkan oleh perubahan target IKU tahun 2021 sesuai Reviu Renstra BBPOM di Padang 2020-2024 adalah 100%



Gambar 3.68 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan tahun 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 95,58%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai yaitu :

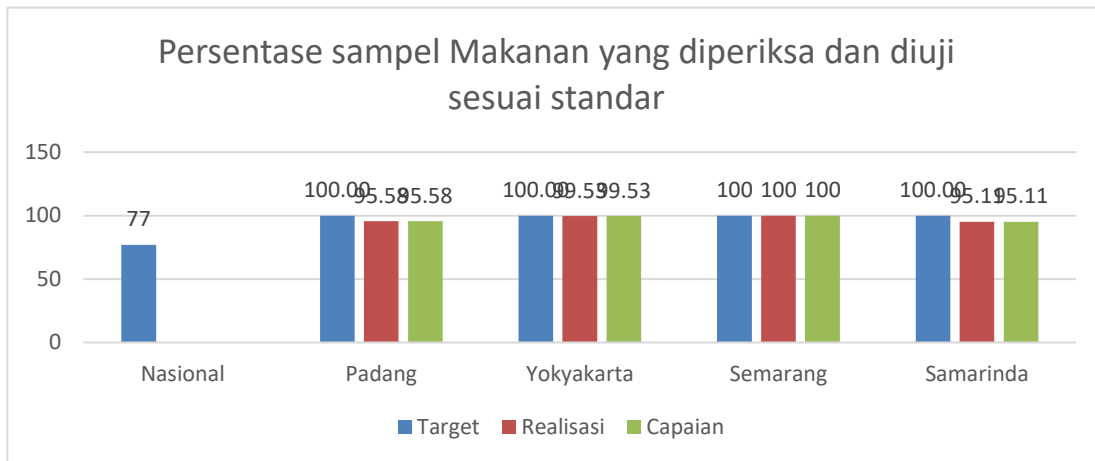
- a. Mempercepat pengadaan reagensia dan suku cadang pada awal tahun
- b. Membuat perencanaan reagensia sesuai kebutuhan laboratorium, dimana pada tahun 2021 anggaran reagensia untuk sampel rutin masih belum memadai
- c. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan baku banding secara mandiri,
- d. Meningkatkan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium. Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dimana dengan bertambahnya

- instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga meningkat namun jumlah anggaran untuk kebutuhan ini relative tetap dari tahun ke tahun.
- e. Untuk pengujian sampel pihak ketiga terutama sampel DAK perlu dikomunikasikan lebih intensif dengan Pemda dan instansi terkait untuk pengaturan masuk sampel ke laboratorium, sehingga sampel yang masuk dapat terdistribusi secara merata di sepanjang tahun, dan tidak menumpuk di Triwulan IV, dan dapat menganggarkan tersendiri reagensia untuk sampel pihak ke tiga (DAK),
 - f. Kendala lain proses pengujian sampel makanan adalah keterbatasan anggaran operasional pembelian gas untuk instrumen AAS dan ICP-MS. Hampir setiap sampel makanan memiliki parameter kritis uji logam, terutama sampel UMKM yang membutuhkan uji logam lengkap. Pengujian logam yang bermacam-macam akan lebih efisien jika diuji menggunakan ICP-MS karena dapat menguji beberapa parameter uji logam dalam waktu yang bersamaan, namun gas argon yang dibutuhkan untuk instrumen ini dapat mencapai 10 kali lipat bila dibandingkan kebutuhan gas instrumen AAS, sehingga dibutuhkan anggaran lebih untuk biaya operasional.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 77% maka realisasi Balai Besar POM di Padang belum mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 124,13% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (100,00%) diikuti oleh BBPOM di Yogyakarta (99,53%), BBPOM di Padang (95,58%) dan BBPOM di Samarinda (95,11%). Realisasi Keempat balai yang berada dalam 1 kluster ini telah mencapai target IKU BPOM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Realisasi kinerja supaya persentase capaian lebih meningkat yaitu membuat perencanaan yang matang terkait kebutuhan reagensia, suku cadang, baku pembanding dan pendukung lainnya serta anggaran pemeliharaan alat laboratorium yang memadai, sehingga semua sampel dapat diuji sesuai PUK dan tidak melewati *timeline* yang telah ditetapkan pada SOP



Gambar 3.69 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- a. Rencana aksi yang dilakukan dalam meningkatkan keberhasilan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan menyelesaikan uji tepat waktu yaitu dengan menerapkan Sistem Mutu ISO 17025:2107, serta melakukan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian, dan sesuai SOP.
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengujian terhadap PUK dan timeline. Dalam pelaksanaan pengujian, Manajer teknis, penyelia dan penguji harus melakukan monitoring terhadap PUK dan timeline pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian.
- c. Balai Besar POM di Padang dalam rangka memenuhi indikator target pengujian, selalu meningkatkan kompetensi penguji dalam memahami pedoman sampling dan pengujian, karena dengan pemahaman dan peningkatan kompetensi penguji maka sampel dapat diuji sesuai standar. Untuk meningkatkan kompetensi petugas dilakukan pelatihan Analisis dengan Instrumen baik luring maupun daring melalui Zoom Meeting, dan mengikuti magang ke PPPOMN.
- d. Melakukan Koordinasi antara Substansi Pemeriksaan, Substansi Pengujian dan Bagian Tata Usaha, koodinasi ini sangat diperlukan terutama dalam hal sampling, karena terkadang pada saat reagensia, suku cadang dan alat laboratorium mengalami kendala maka perlu disepakati bersama kegiatan sampling pada saat tersebut, dan juga terhadap penerimaan sampel di TPS, sehingga time line penyelesaian sampel terpenuhi sesuai SOP, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun kendala yang dihadapi BBPOM Padang dalam melakukan pengujian pangan adalah :

- a. Reagensia yang dibutuhkan tidak memadai untuk kebutuhan jumlah sampel rutin yang telah ditetapkan tahun 2021. dan pengadaan reagensia yang diadakan pada tahun 2021 belum dilakukan pada awal tahun, baru terealisasi pada TW 3 dan 4 terutama reagensia untuk Pangan Fortifikasi sehingga dalam pelaksanaan dilakukan revisi anggaran .
- b. Sampel yang masuk ke laboratorium belum sesuai perencanaan Pada perencanaan sampel yang akan disampling tercantum jumlah sampel acak dan targeted yang dibuat pertahun dan perbulan. Pada pelaksanaan sampling masih ada beberapa komoditi produk yang disampling tidak sesuai jumlah sampel yang direncanakan terutama sampel acak
- c. Keterbatasan anggaran untuk pembelian gas untuk alat instrumen AAS dan ICPMS. Hal ini disebabkan karena parameter uji kritis sampel makanan paling banyak adalah cemaran logam, terutama pengujian sampel yang berasal dari UMKM dalam rangka izin edar, dimana Parameter Uji cemaran logam yang dipersyaratkan harus lengkap .

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Pemeriksaan produk dilakukan sesuai dengan juknis penilaian untuk masing-masing komoditi.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait di pusat dalam penilaian produk yang dilakukan.

Loka POM di Dharmasraya :

Tidak tercapai indikator persentase makanan yang diperiksa dan di uji sesuai standar disebabkan karena terdapat 2 item sampel pangan yang tidak dapat di sampling yaitu sampel targeted kategori sampel UMKM, sampel UMKM merupakan kategori sampel pangan tertentu dalam rangka pendampingan UMKM dimana yang menjadi kriteria sampling adalah sara produksi yang memenuhi ketentuan CPPOB (mendapat rekomendasi dengan nilai minimal B) namun pada tahun 2021 belum ada sarana produksi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya yang memenuhi kriteria tersebut.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan Analisis dengan Instrumen baik internal maupun external melalui luring , daring /zoom Meeting dan mengikuti magang ke PPPOMN

b. Peningkatan kemampuan ruang lingkup pengujian

Dengan peningkatan ruang lingkup pengujian maka sampel yang diuji dengan parameter (PUK) yang diwajibkan pada pedoman sampling dan pengujian dapat tercapai. Peningkatan ruang lingkup pengujian dengan cara melakukan pengujian yang belum masuk ruang lingkup, serta pelatihan terhadap parameter uji tersebut.

Dalam meningkatkan Jaminan Mutu Hasil Pengujian telah dilakukan :

a. Uji Profisiensi dengan judul :

1. Penetapan Kadar Asam benzoat dan acesulfam K dalam sirup secara KCKT dengan hasil in lier
2. Penetapan Kadar Vitamin B1 dan B2 dalam Biskuit Secara KCKT UV –Vis dengan hasil in lier
3. Penetapan kadar Deoxynivalenol dalam Tepung Terigu secara KCKT-Detektor UV (35/PA/12) yang diadakan P3OMN dengan hasil uji in lier
4. ,
5. Sebagai TIM Uji kolaborasi baku banding yang berkolaborasi dengan laboratorium Obat dengan judul cemaran total asam Linoleat BFI (L201028) yang diadakan P3OMN

b. Verifikasi Metoda untuk penambahan Ruang Lingkup di laboratorium pangan yaitu :

1. Penetapan Kadar Aflatoxin M1 dalam Susu bubuk SKIM secara KCKT Benzoat, Sorbat dan Sakarin Dalam Makanan secara KCKT
2. Penetapan kadar gula pereduksi/gula jumlah/sakarosa dalam pemanis termasuk madu secara Volumetri
3. Penetapan Kadar Asam Laktat pada produk susu dan analognya (Produk Pangan Dan produk untuk keperluan gizi khusus) secara KCKT
4. .Penetapan kadar pewarna Sudan I,II,III,dan IV dalam saus cabe secara KCKT
5. Identifikasi Vit B1,B2,B6 pada produk susu dan analognya (produk pangan dan produk untuk keperluan gizi khusus) KCKT
6. penetapan kadar glikosida steviol pada Produk pangan selain produk susu dan analognya dan lemak minyak seacara KCKT

Loka POM di Payakumbuh :

Melakukan evaluasi secara rutin terhadap penilaian produk yang dilakukan serta hasil evaluasi dari pusat.

Loka POM di Dharmasraya :

Kegiatan sampling makanan yang di lakukan sesuai dengan prioritas pedoman sampling, dan sampel di periksa / dilakukan evaluasi label/penandaan terhadap produk sesuai dengan ketentuan

7.Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan Reagensia yang dibutuhkan laboratorium setiap tahunnya, sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Reagensia .
- b. Melakukan rapat evaluasi bersama antara Substansi Pemeriksaan, dan Substansi Pengujian , Substansi Infokom dan Subtansi Penindakan dan Bagian Tata Usaha dan Ka BBPOM terkait hasil uji, program kegiatan , serapan anggaran dan membahas kendala yang terjadi serta mencari solusi terhadap masalah yang timbul
- c. Rapat Evaluasi antara substansi pengujian dan substansi pemeriksaanyang bertujuan untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan realisasi sampel yang masuk ke laboratorium, juga kesesuaian terhadap kesepakatan yang telah dibuat di awal tahun , serta pembahasan tentang penandaan sampel
- d. Pengadaan baku pembanding secara mandiri, Ketersediaan baku pembanding di P3OMN belum memadai sehingga P3OMN merekomendasikan agar Balai melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri, maka Balai harus menyediakan anggaran untuk pengadaannya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium, Substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji. Sehingga pengujian yang dilakukan dapat dikelola dengan baik.

Loka POM di Payakumbuh :

Meningkatkan pemahaman / kompetensi petugas yang melakukan penilaian terhadap masing-masing komoditi.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan evaluasi penandaan/label
- b. meningkatkan koordinasi dengan Deputi III terkait tidak terpenuhinya target dari prioritas sampel makanan

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

A. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.32. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93	125	134,41	Tidak dapat disimpulkan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2021 adalah 125 dari target sebesar 93 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 134,41% dengan kriteria Tidak Dapat disimpulkan. Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

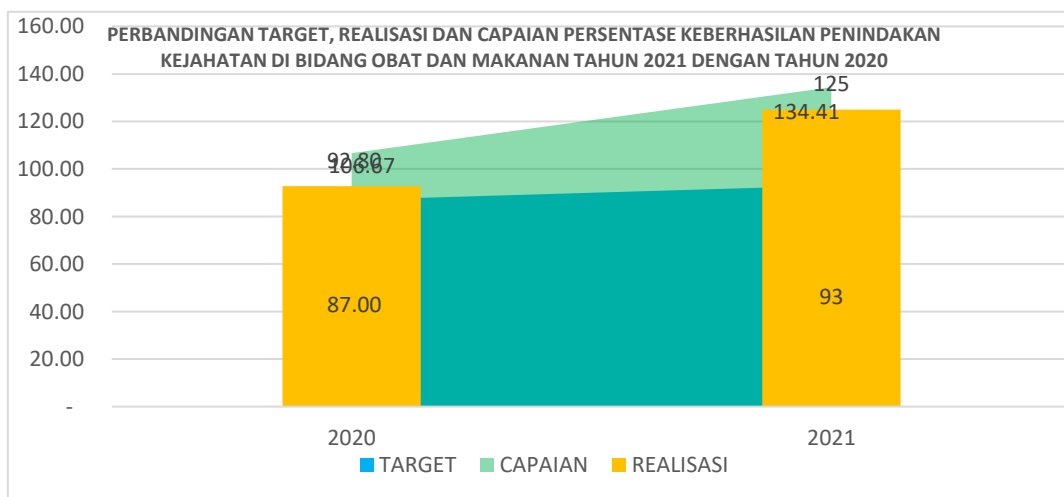
Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain : SPDP, Tahap I, P21, Tahap 2.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 5 perkara. realisasi perkara SPDP sebanyak 7 perkara, tahap I sebanyak 7 perkara dan tahap 2 sebanyak 7 perkara. Sedangkan penyelesaian perkara carry over untuk P21 sebanyak 3 (termasuk 1 perkara DPO) dan tahap 2 sebanyak 3 perkara (termasuk 1 perkara DPO). Secara keseluruhan, realisasi perkara tahun 2021 adalah 7 perkara dari BBPOM di Padang, Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Darmasraya.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020 (92,8%) terjadi kenaikan 32,2%, terhadap capaian kinerja tahun 2020 (106,67) terdapat kenaikan 27,74%. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan 2 perkara dari 5 target yang sudah ditetapkan dan adanya penyelesaian 3 perkara carry over. Sehingga tahun 2021 total penyelesaian proses perkara dibidang obat dan makanan sampai tahap 2 sebanyak 10 perkara yang menyebabkan terjadinya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.70 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2021 dengan tahun 2020

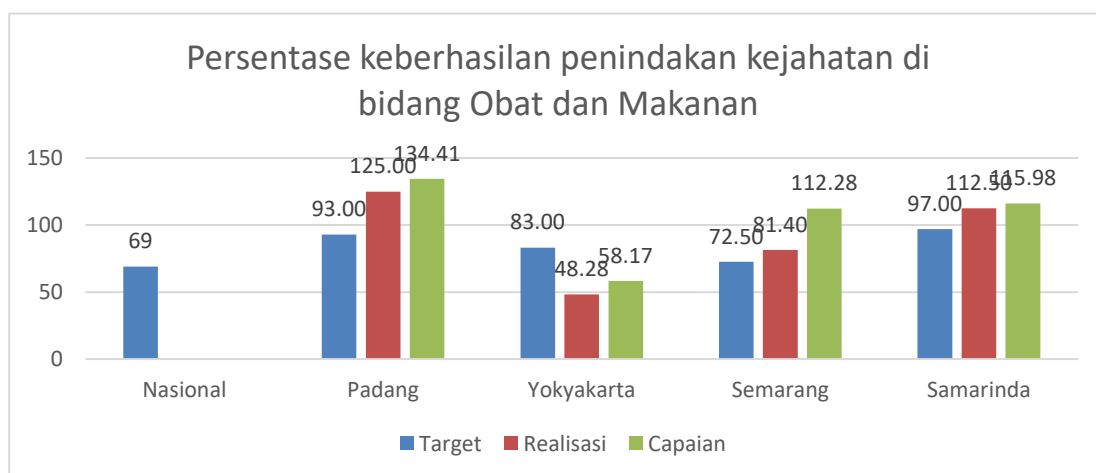
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 96%, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target akhir Renstra 2020-2024, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dengan capaian 130,21%. Untuk pencapaian persentase keberhasilan penindakan tahun 2021 target dan realisasi keberhasilan penindakan BBPOM Padang masih tergabung dengan Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Darmasraya karena penyidikan semua perkara dilakukan oleh PPNS BBPOM di Padang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 69, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah melampaui target nasional dengan capaian yang diperoleh 181,16% (tidak dapat disimpulkan).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang (125%) diikuti oleh BBPOM di Samarinda (112,50%), BBPOM di Semarang (81,40%) dan Yokyakarta (48,28%). Realisasi BBPOM di Padang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Semarang telah mencapai IKU BPOM, BBPOM di Yokyakarta belum mencapai target IKU BPOM. Dengan perbandingan tersebut persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 dibandingkan dengan Balai Besar POM setara dimana capaian kinerja tahun 2021 Balai Besar POM di Padang lebih optimal dari capaian kinerja Balai Besar POM lainnya yang setara.



Gambar 3.71 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang pada tahun 2021 sudah mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

a. Melakukan Perencanaan yang matang dalam penentuan target operasi penindakan yang diatur sedemikian rupa terkait cara bertindak di tempat kejadian perkara.

b. Peningkatan Kinerja Penyidik

Realisasi perkara tahun 2021 (tahun n) sebanyak 7 perkara dari target 5 perkara dimana 7 perkara tersebut dapat diselesaikan oleh penyidik BBPOM di Padang sampai tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa penuntut umum) sehingga tidak ada tunggakan perkara untuk tahun berikutnya. Rincian realisasi 7 perkara diantaranya 4 perkara BBPOM di Padang, 2 Perkara Loka POM Payakumbuh dan 1 perkara Loka POM Darmasraya. Selain itu ada 3 perkara carry over tahun 2020 yang dapat diselesaikan sampai tahap 2 di tahun 2021 dilanjutkan ke proses persidangan, termasuk 1 perkara yang tersangkanya melarikan diri (DPO). Dari 7 perkara tahun 2021 terdapat 1 perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh PPNS BBPOM di Padang dengan bantuan Korwas PPNS Polda Sumbar telah diselesaikan sampai tahap 2.

c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Dalam pencapaian keberhasilan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk setiap perkara yang sudah diproses projustisia dilakukan monitoring pada kartu kendali perkara.

d. Penguatan koordinasi dengan ICJS

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan penegakan hukum seperti; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terlaksana dengan baik sehingga berkas perkara yang diselesaikan dapat sampai ke persidangan.

e. Koordinasi dengan ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia)

Melakukan koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman barang untuk menindak lanjuti laporan / informasi dari Dit. Intelijen BPOM dimana adanya pengiriman paket yang di duga berisi Obat Ilegal (TIE) melalui Ekspedisi TIKI dari Jakarta ke Padang. Berdasarkan

informasi tersebut telah dilakukan operasi penindakan terhadap pemilik paket yang berisi Obat Ilegal (TIE) dan telah diselesaikan secara Pro Justitia.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Terdapatnya carry over dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi terhadap persentase perhitungan capaian.
- b. Penetapan target yang akan dilakukan penindakan dengan hasil investigasi yang matang.
- c. Masih kurangnya tenaga PPNS di Loka Payakumbuh sehingga kinerja masih belum optimal.

Loka POM di Dharmasraya :

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya pada tahun 2021 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- a. Capaian tahapan proses penyidikan

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan di Loka POM di Kab. Dharmasraya dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu :

- Proses SPDP dengan bobot 15%
- Proses Tahap I dengan bobot 40%
- Proses P21 dengan bobot 30%
- Proses tahap II dengan bobot 15%

Tingkat keberhasilan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di kantor Loka POM di Kab. Dharmasraya sesuai target yaitu 1 perkara, proses tersebut dilalui secara berkala untuk mencapai pembobotan 100%.

- b. Koordinasi dengan ICJS

Dilakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan di kantor Loka POM di Kab. Dharmasraya diantaranya dengan penegakan hukum seperti : Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Koordinasi terlaksana dengan baik sehingga berkas perkara dapat selesai sampai dengan ke persidangan.

- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Adanya kegiatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan didampingi oleh instansi terkait seperti pihak kepolisian. Kondisi di Kantor Loka POM di Kab Dharmasraya masih minimnya PPNS sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan PPNS dari Balai Besar POM di Padang dalam hal pencapaian target kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan di kantor Loka POM di Kab. Dharmasraya.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

Kegiatan penunjang untuk mencapai target adalah :

- a. Tercapainya target keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan tahun 2021 didukung oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh petugas substansi penindakan Balai Besar POM di Padang.
- b. Pengumpulan bahan keterangan pada kegiatan intelijen atau operasi intelijen.
- c. Melakukan pemantauan obat dan makanan yang beredar di media online secara patroli siber.
- d. Pelaksanaan kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi, gelar perkara, penyelesaian pemberkasan untuk dapat dimajukan ke tahap I serta melakukan perbaikan kelengkapan berkas P19 sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap / P21 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- e. Peningkatan kompetensi petugas di Bidang Penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat berjalan lancar
- f. Koordinasi yang baik dengan CJS dan lintas sektor terkait sehingga memudahkan PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara hingga pelaksanaan Tahap 2.

Loka POM di Payakumbuh :

- a. Koordinasi dengan Balai Koordinator terkait dengan kegiatan penindakan yang akan dilakukan.
- b. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kegiatan penindakan.

Loka POM di Dharmasraya :

Tercapainya target didukung oleh kemampuan dasar petugas fungsi penindakan di Loka POM di Dharmasraya terkait kegiatan pengumpulan kasus kejahatan obat dan makanan. Untuk proses penyidikan dibantu oleh PPNS dari Balai Besar POM di Padang bersama pihak kepolisian sehingga memudahkan dalam melakukan penyelesaian berkas perkara sampai Tahap II. Dalam rangka mendukung kegiatan intelijen dan operasi intelijen diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut seperti laptop dengan spesifikasi tinggi dan alat khusus intelijen lainnya. Hal tersebut berguna untuk memudahkan pencarian dan akses informasi peredaran obat dan makanan baik secara daring/luring. Selain itu petugas fungsi penindakan di kantor Loka POM di Kab.Dharmasraya perlu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kegiatan intelijen di Loka POM di Kab. Dharmasraya.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan intelijen, patroli siber dan penyidikan.
- b. Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 untuk uji bebas Covid-19.
- c. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input untuk perkara obat dan makanan.

Loka POM di Payakumbuh :

Peningkatan kompetensi petugas penindakan di Loka POM Payakumbuh

Loka POM di Dharmasraya :

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi dilakukan melalui daring/luring. Petugas melakukan peningkatan akses informasi yang dapat memberikan input terkait perkara obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya. Proses kegiatan penyidikan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meningkatkan koordinasi dengan PPNS Balai Besar POM di Padang dalam hal pelaksanaan kegiatan penyidikan. Selain itu melakukan peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif untuk pencapaian kegiatan sampai kepada tahap II.

Dengan berakhirnya periode ini, target perkara Loka POM di Kab. Dharmasraya dapat tercapai dan terselesaikan hingga tahap II dengan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena proses yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP Mikro fungsi penindakan di Loka POM di Kab. Dharmasraya.

CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu :

- A. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
 - B. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
-
- A. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Tabel 3.33. Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,20	83,17	99,96	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 adalah 83,17 dari target sebesar 83,20 sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 adalah 99,96% dengan kriteria baik.

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Padang yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil sebesar 92,22 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Balai Besar POM di Padang.

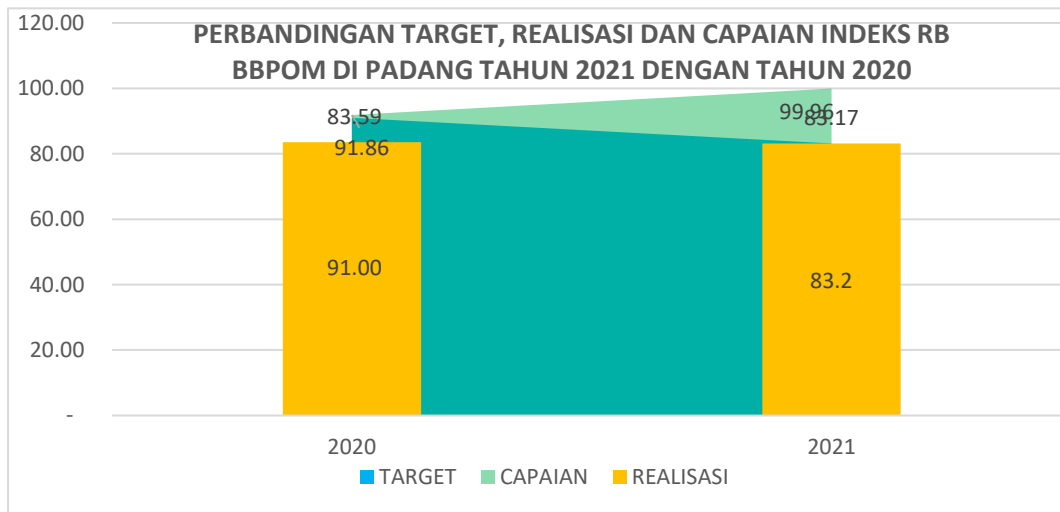
PENILAIAN		Bobot	Nilai	%	Keterangan
A.	PROSES (60)				
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	8	7,16	89,44%	MS
II.	PENATAAN TATALAKSANA (5)	7	5,50	78,57%	MS
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	10	8,70	87,04%	MS
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10	9,69	96,88%	MS
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15	13,88	92,50%	MS
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10	9,60	96,00%	MS
TOTAL PENGUNGKIT		60	54,52		

HASIL (40)					
B.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20	19,10	95,50%	MS
	I. 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)		14,10	94%	MS
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindaklanjuti (5)		5	100%	TMS
	II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	20	18,35	92%	MS
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)		18,60	93%	MS
TOTAL HASIL		40	37,70		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			92,22		

Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/POM dan oleh KemenPANR dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2021. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Padang sebesar 83,17.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks RB tahun 2020 (83,59%) terjadi penurunan 0,42%, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 (91,86) terdapat kenaikan 8,1%. Penurunan realisasi yang diiringi dengan kenaikan capaian disebabkan adanya penurunan target tahun 2021 sesuai reviu Renstra 2020-2024. Namun bila dibandingkan dengan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh TPI sebelum konversi dengan nilai KemenPANRB terdapat kenaikan 2,08, yaitu tahun 2021 sebesar 92,22 dengan nilai tahun 2020 sebesar 90,14.



Gambar 3.72 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks RB BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020

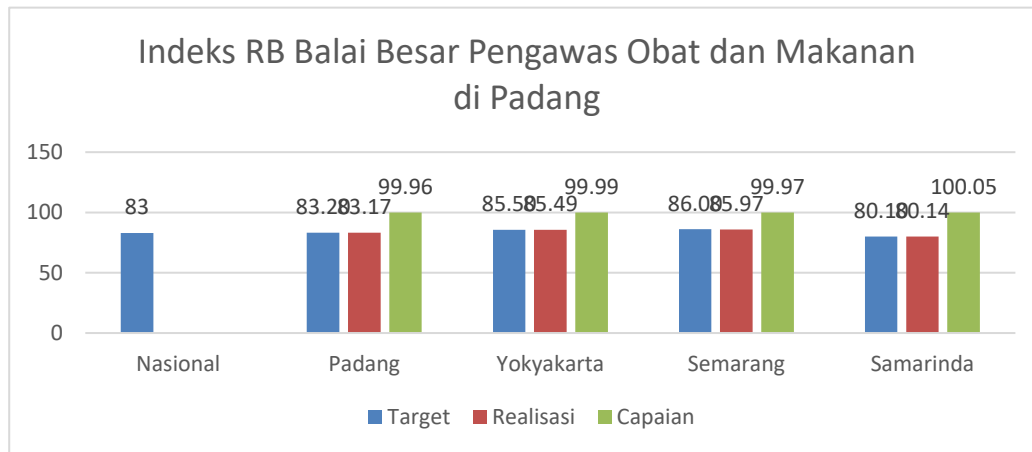
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks RB adalah 86,2, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 96,48%. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks RB adalah 83, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 100,20% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (85,97%) diikuti oleh BBPOM di Yokyakarta (85,49%), BBPOM di Padang (83,17%) dan BBPOM di Samarinda (80,14).



Gambar 3.73 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Penurunan realisasi Indeks RB dari tahun 2020 disebabkan oleh adanya konversi dengan penilaian oleh KemenPANRB, dimana penilaian oleh PMPZI sebesar 92,22 setelah dikonversi menjadi 83,17. Hasil penilaian oleh TPI menunjukkan hal-hal yang menyebabkan peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- Rencana kerja prioritas pembangunan ZI belum mengodir seluruh area perubahan
- Terdapat penurunan nilai Survei Persepsi Reformasi Birokrasi BBPOM di Padang tahun 2021
- Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan namun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan belum dilakukan secara optimal
- Kesenjangan kompetensi pegawai BBPOM di Padang masih mencapai 30%.
- Telah melaksanakan manajemen SDM dengan cukup baik yaitu dengan adanya perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi internal, pengembangan kompetensi, penegakan aturan disiplin dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.

Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/POM dan oleh KemenPANR dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2021. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Padang sebesar 83,17.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Penetapan rencana kerja RB dan target prioritas dan terhadap pelaksanaan rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas
- b. Peningkatan pemanfaatan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu Aplikasi Galamai (Galeri Layanan Masyarakat dan Informasi)
- c. Pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI secara berkelanjutan mulai dari penilaian awal TPI, perbaikan setelah evaluasi dan penilaian KemenPANRB setelah evaluasi dan kunjungan penilaian pembangujnan ZI menuju WBBM
- d. Penyusunan standar pelayanan publik dan penerapan budaya pelayanan prima dalam melakukan pelayanan publik
- e. Implementasi Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO 17025 : 2017 dengan pelaksanaan kaji ulang dokumen, RTM, audit internal dan eksternal, dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP.
- f. Pelaksanaan survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Anti Korupsi (IPAK) dengan hasil memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan MenPanRB
- g. Menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan baik secara internal maupun eksternal

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) Penilaian mandiri Zona Integritas maka upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyusunan rencana kerja prioritas pembangunan ZI yang mengakomodir seluruh area perubahan.
- b. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang memuat kendala dan rencana tindak lanjut di periode berikutnya.
- c. Menyusun tindak lanjut pemenuhan kesenjangan kompetensi pada Balai Besar POM di Padang
- d. Terus melakukan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stateholder serta melaksanakan analisis dampak kemfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

B. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Tabel 3.35. Capaian Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang	79,80	79,90	100,13	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 adalah 79,90 dari target sebesar 79,80 sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 100,13% ,dengan kriteria baik. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena implementasi SAKIP di Balai Besar POM di Padang belum sepenuhnya diterapkan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP dan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM no HK 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020.

Rincian hasil evaluasi komponen SAKIP sebagai berikut :

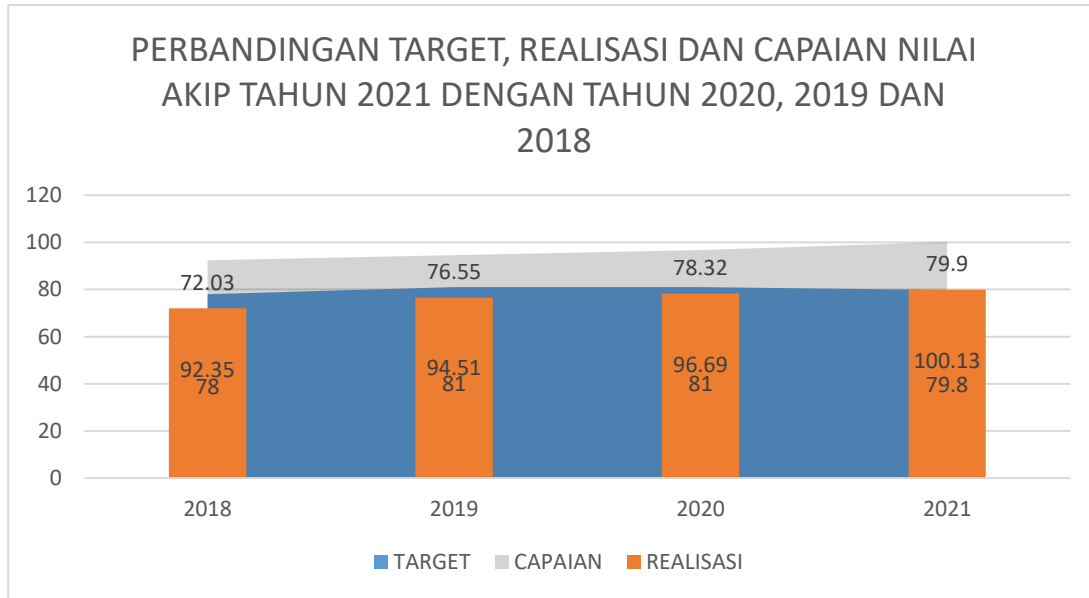
Tabel 3.36. Hasil Penilaian AKIP 2021

NO	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,72
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	13,30
4	Evaluasi Internal	10	7,81
5	Capaian Kinerja	20	14,01
	Nilai hasil evaluasi	100	79,90
	Tingkat akuntabilitas kinerja		BB

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2018 (72,03%) maka terjadi kenaikan 7,87% dan tahun 2019 (76,55%) maka terjadi kenaikan 3,35% dan 2020 (78,32) terjadi kenaikan 1,58. Adapun bila dibandingkan

persentase capaian terhadap tahun 2018 (92,35%) terjadi kenaikan 7,78% dan tahun 2019 (94,51%) terjadi kenaikan 5,62% dan 2020 (96,69) terjadi kenaikan 3,44%. Kenaikan persentase ini disebabkan oleh peningkatan penilaian komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Sedangkan untuk komponen penilaian capaian kinerja terjadi penurunan.



Gambar 3.74 Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai AKIP tahun 2021 dengan tahun 2020, 2019 dan 2018

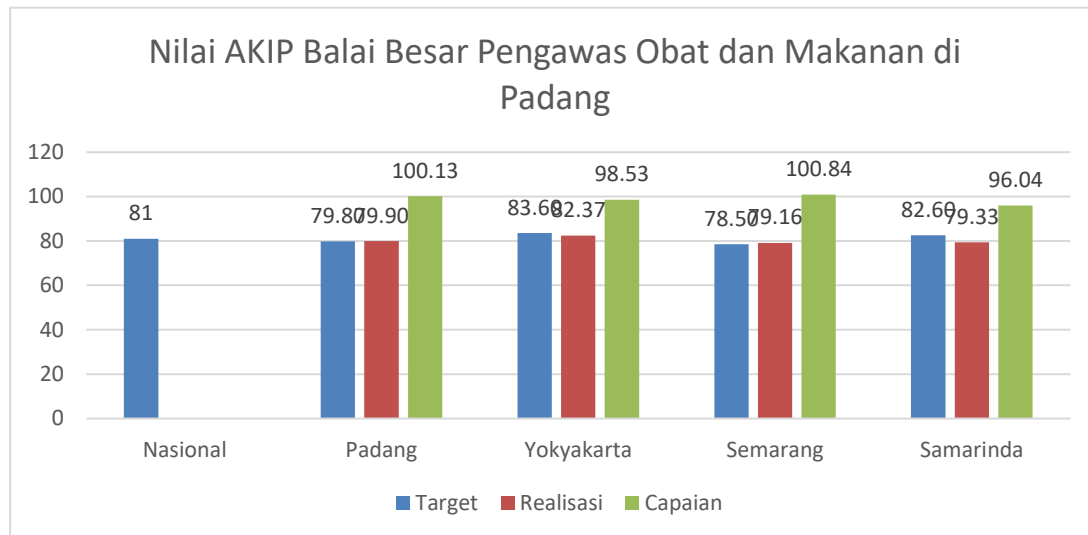
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks RB adalah 84,3 maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024, namun telah termasuk kategori baik dengan capaian 94,78%, untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan selalu melakukan implementasi SAKIP dalam melaksanakan manajemen kinerja di Balai Besar POM di Padang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Nilai AKIP adalah 81, maka realisasi Balai Besar POM di Padang belum mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 98,64% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta, Semarang dan Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Yogyakarta (82,37%) diikuti oleh BBPOM di Padang (79,90%), BBPOM Samarinda (79,33%) dan yang paling rendah BBPOM di Semarang (79,16%)



Gambar 3.75 Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang tahun 2020 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- Indikator kinerja telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Telah memiliki SOP Mikro tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan juga telah dijadikan sebagai dasar perbaikan perencanaan dalam usulan revisi target Renstra 2020-2024
- Penyajian serta penjelasan atas capaian kinerja telah ditampilkan secara memadai dan didukung dengan data sumber yang mampu telusur

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Rapat evaluasi kinerja dan anggaran triwulan dan bulanan
- b. Rencana Strategi (Renstra) digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reuiu renstra terhadap target indicator kinerja yang menyesuaikan dengan realisasi kinerja 2020.
- c. Mekanisme Pengumpulan data kinerja sesuai dengan SOP dan menggunakan link google drive sehingga data akurat dan dapat dikirimkan tepat waktu.
- d. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara triwulan yang dilengkapi dengan hambatan dan rencana tindak lanjut

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci dengan rincian anggaran per sub kegiatan untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
- b. Menyelaraskan indikator kinerja hingga tataran individu pegawai yang diturunkan dari Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar POM.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.
- d. Hasil rekomendasi atas implementasi SAKIPB alai Besar POM di Padang oleh Inspektorat akan diterapkan pada tahun 2022 sebagai perbaikan untuk meningkatkan nilai AKIP.

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 Dimensi, yaitu 1) Dimensi Kualifikasi, untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi

sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%. 2) Dimensi Kompetensi, untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%. 3) Dimensi Kinerja, untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%; dan 4) Dimensi Disiplin, untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.

Tabel 3.37. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021

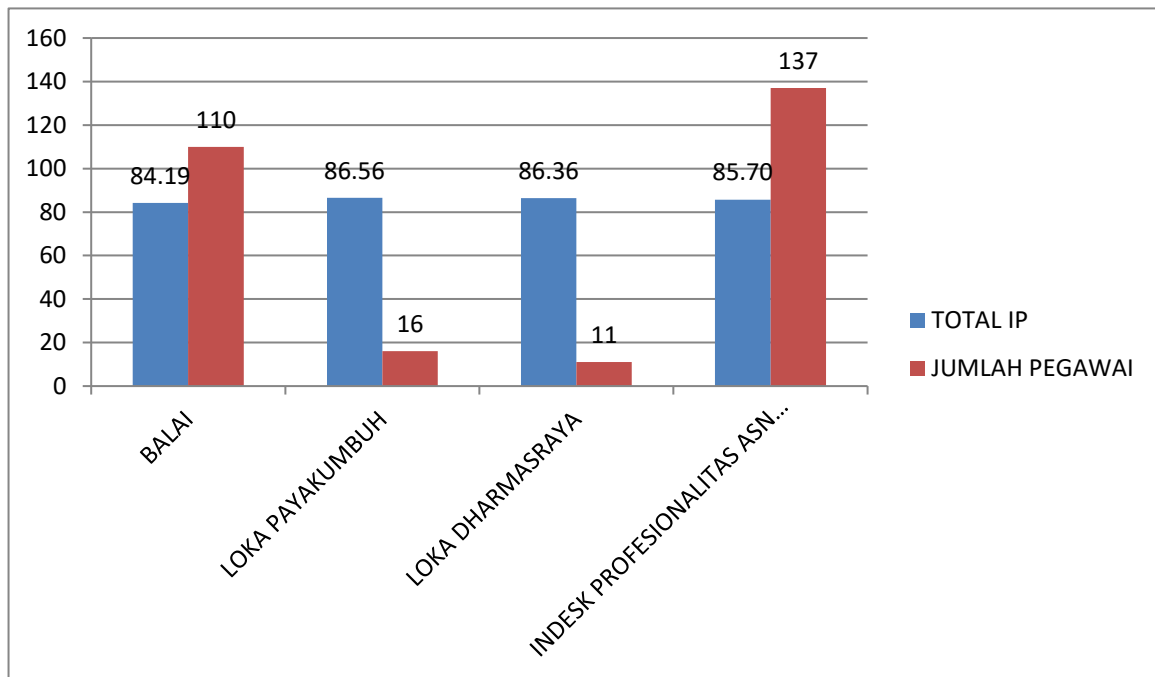
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83,70	85,70	102,39	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Indeks profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 85,70 dari target sebesar 83,70 sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 102,39% dengan kriteria baik.

Indeks profesionalitas ASN merupakan gabungan nilai Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dharmasraya dengan cara perhitungan Indeks profesionalitas ASN adalah :

$$\frac{(\text{total IP Balai Besar POM di Padang} + \text{total IP Loka POM Payakumbuh} + \text{Loka POM Dharmasraya})}{(\text{jumlah pegawai Balai Besar POM di Padang} + \text{jumlah pegawai Loka POM Payakumbuh} + \text{Loka POM Dharmasraya})}$$



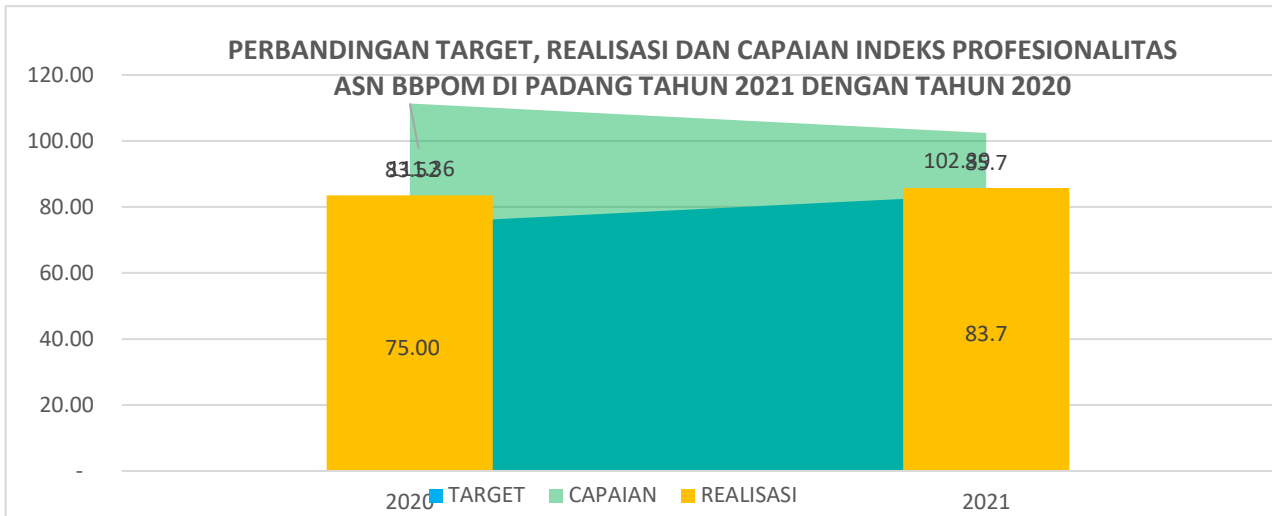
Gambar 3. 76. Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang, Loka Payakumbuh dan Loka Dharmasraya

Adapun nilai rata-rata dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang, Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya sebagai berikut :

UPT	Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin
Padang	15.05	39.05	25.09	5
Payakumbuh	16.56	40	25	5
Dharmasraya	16.36	40	25	5

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2020 (83,52%) terjadi kenaikan 2,18%, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 (111,36) terdapat penurunan 8,97%. Kenaikan realisasi yang diiringi dengan penurunan capaian disebabkan adanya penyesuaian target tahun 2021 dimana setelah pelaksanaan reuiu Renstra 2020-2024, target IP ASN dinaikkan mendekati realisasi tahun 2020.



Gambar 3.77 Perbandingan target, realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020

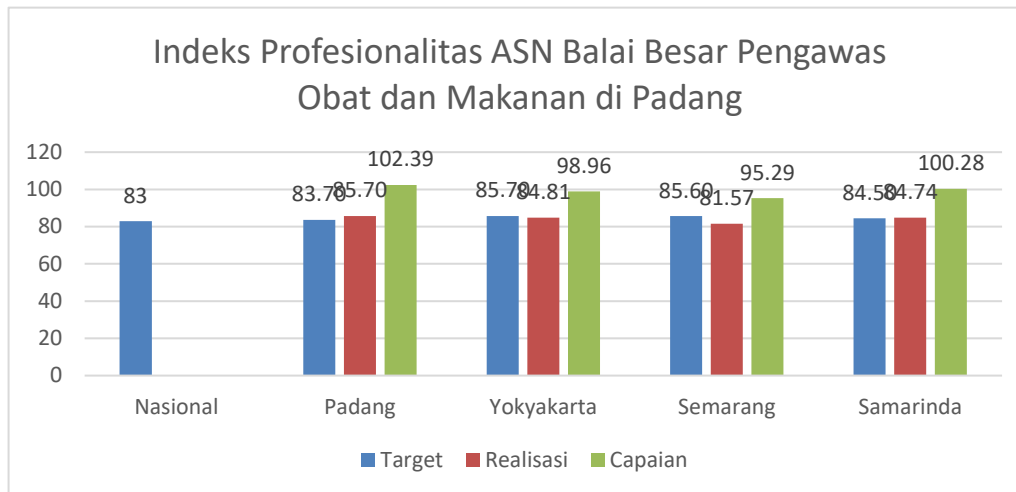
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks profesionalitas ASN adalah 84,6, maka realisasi tahun 2021 telah mencapai target akhir Renstra 2020-2024, kategori baik dengan capaian 101,30%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Indeks profesionalitas ASN adalah 83, maka realisasi Balai Besar POM di Padang telah mencapai target nasional dengan capaian yang diperoleh 103,25% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang (85,70%) diikuti oleh BBPOM di Yokyakarta (84,81%), BBPOM di Samarinda (84,74%) dan BBPOM di Samarang (81,57%).



Gambar 3.78 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Keberhasilan capaian Indeks Profesional ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2021 antara lain:

- Seluruh pegawai telah memenuhi persyaratan pengembangan kompetensi diklat teknis sebesar 20 Jam Pelajaran (JP);
- Semua pegawai mendapatkan nilai SKP pada kategori Baik dan Sangat Baik sehingga dimensi Kinerja mendapatkan nilai yang cukup tinggi;
- Tidak terdapat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sehingga Dimensi Disiplin memperoleh nilai maksimal.

Loka POM di Payakumbuh :

- Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan peningkatan dimensi kompetensi masing - masing pegawai mengikuti Diklat teknis dan Seminar atau workshop.
- Penilaian Dimensi Kinerja melalui Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai dengan memperhatikan capaian hasil Kerja Pegawai.

Loka POM di Dharmasraya :

- Pegawai dengan jabatan fungsional PFM telah mengikuti diklat fungsional PFM dan ujian kompetensi

- b. Seluruh pegawai telah memenuhi jumlah JP pengembangan kompetensi minimal 20 JP baik diklat teknis maupun seminar/workshop
- c. Penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dengan penilaian kriteria baik

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Balai Besar POM di Padang :

- a. Pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai secara rutin;
- c. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil pemetaan kompetensi mandsosul dan gap kompetensi teknis;
- d. Pendampingan pada pegawai yang kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara online dan mandiri selama masa pandemi, antara lain melalui aplikasi IDEAS dan lain-lain;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja pegawai secara rutin per triwulan;
- f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran disiplin secara rutin.

Loka POM di Payakumbuh

- a. Melakukan pemantauan terhadap pengukuran dimensi kompetensi pegawai dengan mengikuti Diklat teknis dan Seminar atau workshop yang diikuti oleh masing-masing pegawai minimal 20 Jam Pelajaran.
- b. Memperhatikan target kinerja pegawai dengan capaian untuk masing - masing kegiatan pada Sasaran Kerja Pegawai yang memberikan kontribusi pada pengukuran Dimensi Kinerja.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pegawai sehingga pegawai tidak mendapatkan penilaian disiplin buruk yang akan mempengaruhi pengukuran Dimensi Disiplin.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Pemantauan terhadap capaian target pengembangan kompetensi 20 JP setiap pegawai

b. Monitoring dan evaluasi capaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan per triwulan oleh Pusat

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai Besar POM di Padang :

- a. Mengusulkan pelaksanaan diklat pimpinan sesuai level jabatan bagi pejabat struktural;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial sosio kultural, utamanya bagi pegawai yang memiliki gap kompetensi tersebut;
- c. Mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan secara mandiri;
- d. Terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan penerapan disiplin pegawai.

Loka POM di Payakumbuh :

Memperhatikan GAP pemenuhan kompetensi pegawai yang ada dengan kebutuhan diklat pegawai tersebut.

Loka POM di Dharmasraya :

- a. Peningkatan monitoring pengembangan kompetensi pegawai dalam pemenuhan minimal 20 JP.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kebutuhan kompetensi pegawai.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

**MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, yaitu :

A. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Tabel 3.38. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Tahun 2020

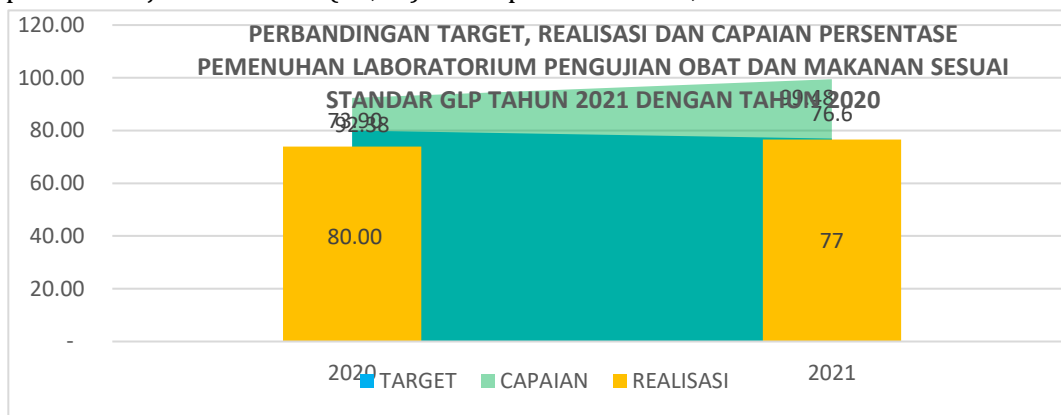
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	77	76,6	99,48	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 76,60% dari target sebesar 77 sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 99,48% dengan kriteria baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2020 (73,9%) terjadi kenaikan 2,7%, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 (92,38) terdapat kenaikan 7,1%.



Gambar 3.79 Perbandingan target, realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan tahun 2020

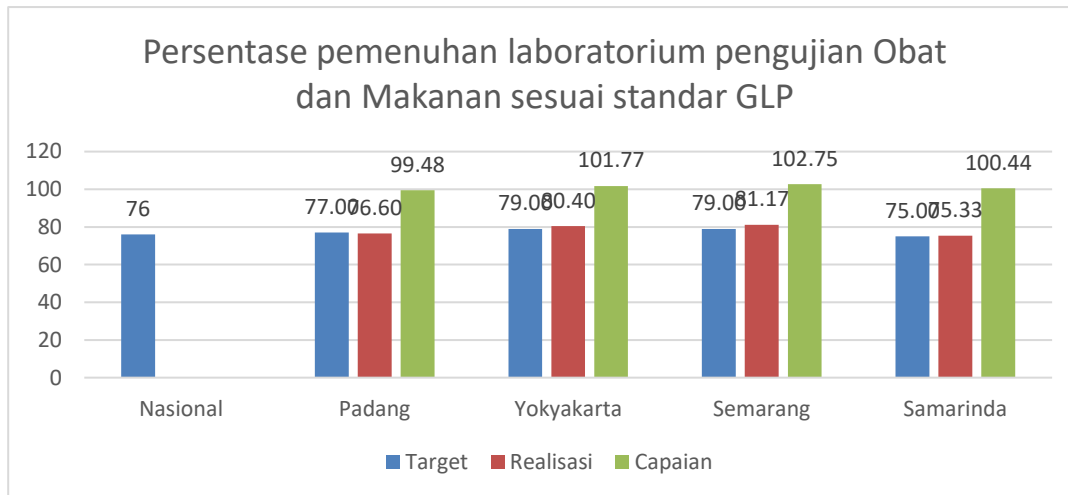
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP adalah 92%, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, dengan capaian 83,26%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan meningkatkan standar kemampuan ruang lingkup, meningkatkan standar kompetensi petugas dan meningkat standar peralatan laboratorium .

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah 76, maka bila dibandingkan dengan target nasional capaian yang diperoleh 100,79 (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (81,17%) diikuti oleh BBPOM di Yogyakarta (80,4%), BBPOM di Padang (76,60%) dan BBPOM di Samarinda (75,33).



Gambar 3.80 Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Ada beberapa faktor yang menyebabkan target tidak tercapai yaitu:

- a. Standar yang digunakan pada saat Asesment menggunakan Standar Kompetensi Laboratorium tahun (SKL) 2020-2024, sedangkan target yang ditetapkan adalah berdasarkan atau mengacu pada Standar tahun 2015-2019, yang mana hasil asesmen pada tahun 2019 yaitu sebesar 81,9% sehingga pada tahun 2020 ditetapkan target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah sebesar 80 %.
- b. Standar GLP yang dinilai adalah pemenuhan Ruang Lingkup Pengujian, Kompetensi Penguji dan Alat Laboratorium. Untuk pemenuhan Alat Laboratorium, Balai Besar POM di Padang tidak bisa dipenuhi sesuai usulan dari Balai Besar POM di Padang karena persyaratan pemenuhan tergantung pada persetujuan dari P3OMN. Apalagi dengan adanya Regionalisasi Laboratorium yang dilaksanakan tahun 2022, penambahan Alat Laboratorium menjadi evaluasi oleh P3OMN. Sedangkan Ruang Lingkup Pengujian dan Kompetensi penguji dapat ditingkatkan.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Bidang Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan Ruang Lingkup Pengujian
- b. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi pengujian
- c. Pelatihan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Laboratorium secara terus menerus
- d. Peningkatan pemenuhan Alat Laboratorium sesuai standar
- e. Berkoordinasi dengan P3OMN dalam hal pemenuhan Ruang Lingkup, Kompetensi petugas dan Alat Laboratorium
- f. Melakukan Monev setiap triwulan terhadap pemenuhan SKL yang dilakukan oleh Laboratorium BBPOM di Padang secara *self asesment* dan kemudian akan dinilai atau diverifikasi oleh P3OMN.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Perlu membuat Perencanaan terhadap peningkatan kompetensi petugas pengujian dalam rangka pemenuhan SKL, baik pelatihan internal dan eksternal
- b. Melakukan koordinasi baik dengan P3OMN maupun Bidang Pemeriksaan untuk pemenuhan Ruang Lingkup Pengujian secara intensif
- c. Peningkatan pemenuhan Alat Laboratorium sesuai standar SKL yang telah ditetapkan P3OMN
- d. Melakukan Monev setaiap bulan untuk pemenuhan terhadap SKL

B. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang Optimal

Tabel 3.39. Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2,2	110	Sangat Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

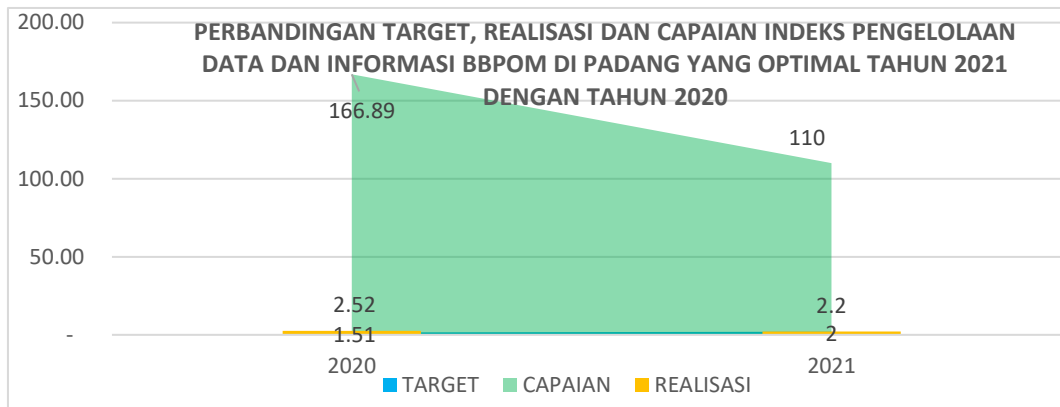
Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal tahun 2021 adalah 2,2 dari target sebesar 2 sehingga capaian yang diperoleh Tahun 2021 sebesar 110%.

Tabel 3.40. Rincian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Padang

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah c= a+ b	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah h = d+e+f+g/4	Total Nilai i = c+h/2
		SIPT(a)	SPIMKe r(b)		Email(d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BC C (f)	Berita Aktual (g)		
		80%	20%							
	Balai Besar POM di Padang	0,8	0,6	1,4	3	3	3	3	3	2,2

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2020 (2,52) terjadi penurunan 0,52%, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 (166,89) terdapat penurunan 56,89%. Penurunan capaian kinerja yang tinggi tidak sebanding dengan penurunan realisasi karena terdapat perubahan target tahun 2021 menjadi lebih tinggi sesuai rewiu Renstra 2020-2024.



Gambar 3.81 Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Padang yang optimal tahun 2021 dengan tahun 2020

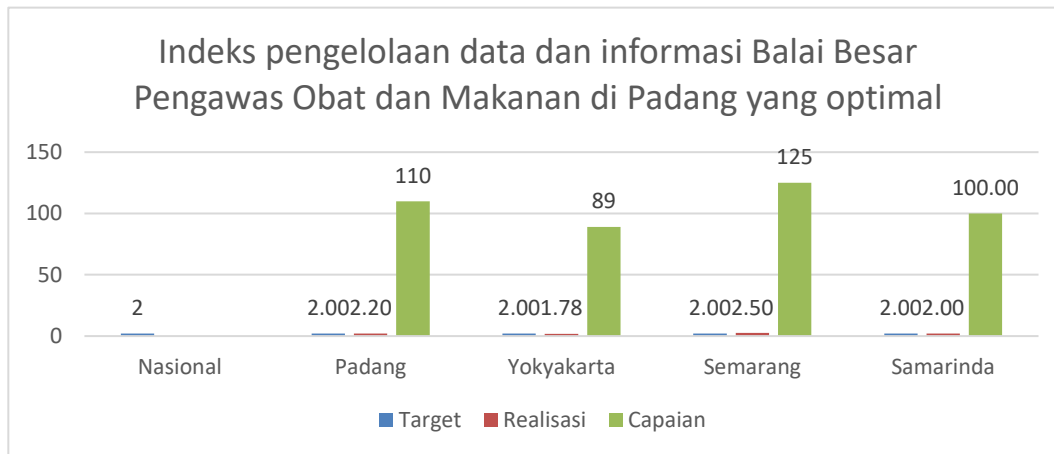
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi adalah 3, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Renstra 2020-2024, dengan capaian 73,33%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase pemenuhan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi adalah 2, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 110% (sangat baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (2,5) diikuti oleh BBPOM di Padang (2,2), BBPOM di Samarinda (2) dan BBPOM di Yogyakarta (1,78).



Gambar 3.82 Perbandingan target, realisasi dan capaian pemenuhan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

- Pada triwulan III (bulan September tahun 2021), terjadi perubahan alur pelaporan hasil penandaan di SIPT, sehingga operator pemeriksaan harus memasukkan ulang laporan hasil penandaan ke aplikasi SIPT dari bulan Januari sampai dengan Agustus, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan hasil pengujian, dimana laporan hasil pengujian bisa dikirim ke pusat jika hasil penandaan sudah diisi oleh operator pemeriksaan. Sehingga indeks pelaporan SIPT tidak terjadi kenaikan.
- Verifikator kasus keracunan aktif melakukan verifikasi pada aplikasi SPIMKER setiap bulannya.
- Pimpinan BBPOM di Padang aktif memanfaatkan dashboard BCC.
- Petugas pemeriksaan aktif menggunakan sharing folder
- Seluruh pegawai sudah aktif memanfaatkan email corporate setiap bulannya.
- Penanggung Jawab kegiatan dan tim Media Sosial aktif dalam melaporkan berita kegiatan dalam berita aktual di subsite BBPOM di Padang.

Alternatif solusi :

- Percepatan *entry* ulang laporan hasil penandaan dari bulan Januari sampai dengan Agustus oleh operator pemeriksaan.
- Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan dan melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi.

- c. Pengguna SIPT aktif berkoordinasi dengan Tim TI BBPOM di Padang jika ada kendala terkait SIPT sehingga bisa langsung di Tindak Lanjuti oleh Tim TI BBPOM di Padang ke tim SIPT di Pusdatin.
- d. Tim TI BBPOM di Padang aktif berkoordinasi dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Pemanfaatan seluruh aplikasi maupun teknologi informasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan.
- b. Penggunaan aplikasi yang tepat waktu (sesuai *timeline*), seperti verifikasi kasus keracunan pada SPIMKER dibawah 5 hari kerja, begitu juga dengan SIPT.
- c. Pemanfaatan email corporate BPOM dalam berkomunikasi.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Petugas SIPT terutama operator pemeriksaan secara aktif dan tepat waktu dalam melakukan pengisian SIPT setelah melakukan pemeriksaan di lapangan, baik pemeriksaan sarana, sampling dan penandaan serta iklan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengisian SIPT oleh pengujian dan proses pengiriman ke pusat.
- b. Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan, melakukan sosialisasi serta melakukan pemantauan kepada pimpinan dan pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi.
- c. Pimpinan dan pegawai BBPOM di Padang sudah aktif dalam memanfaatkan teknologi ataupun aplikasi yang tersedia.
- d. Tim TI BBPOM aktif berkoordinasi dengan pengguna aplikasi maupun dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya, serta cepat dalam penanganan masalah terkait TIK.

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 103,21% dengan kriteria Baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.41. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92,50	91,51	98,93	Baik
2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	100	107,53	Baik

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-XI sebagai berikut :

A. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA). Nilai kinerja anggaran (NKA) BBPOM di Padang dihitung berdasarkan:

$$\text{NKA: (Nilai EKA x 60\%) + (Nilai IKPA x 40\%)}$$

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu DJA SMART Kementerian Keuangan yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat serta aspek konteks sehingga menghasilkan nilai tersebut. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 3.42. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92,50	91,51	98,93	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2021 adalah 91,51 dari target sebesar 92,50 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 98,93% dengan kriteria Baik.

Tabel 3.43 Rincian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang

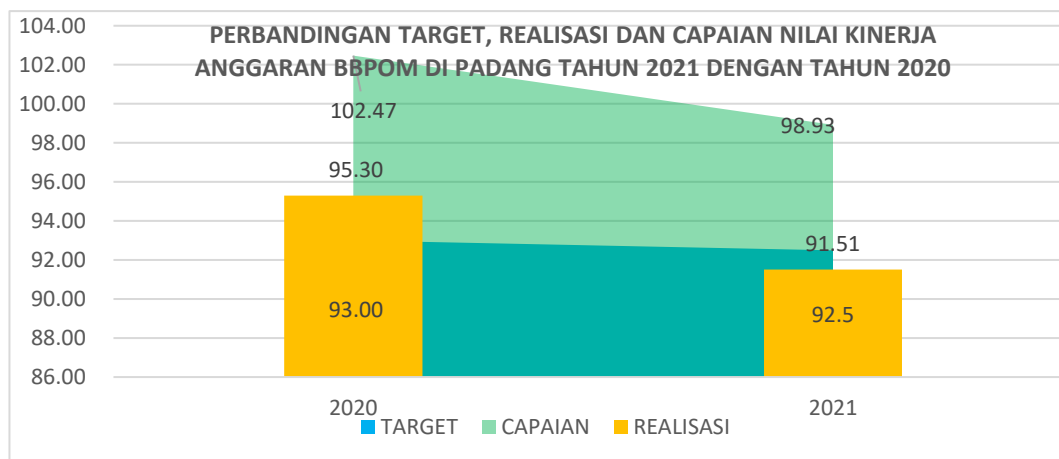
NILAI EKA	NILAI IKPA	REALISASI
87,68	97,25	91,51

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu DJA SMART Kementerian Keuangan yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Dilakukan pembobotan dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sehingga menghasilkan nilai evaluasi kinerja anggaran sesuai PMK No 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 (95,30) terjadi penurunan 3,79, dan bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 (102,47) terdapat penurunan 3,54%. Penurunan capaian ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat perubahan cara pengukuran nilai EKA pada SMART DJA khususnya pada perhitungan efisiensi sehingga memberikan kontribusi nilai rendah pada realisasi tahun 2021. Untuk nilai IKPA penilaian indikator konfirmasi capaian output pada tahun 2021 sudah memperhitungkan nilai capaian output dan harus dikonfirmasi penyebab target tidak tercapai atau tidak selaras dengan penyerapan anggaran.



Gambar 3.83 Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020

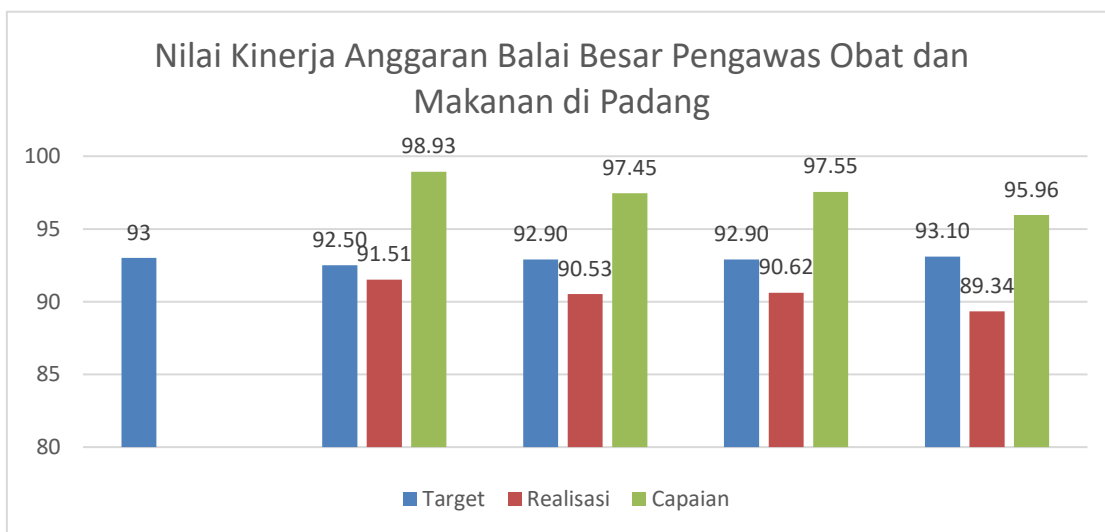
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Target akhir Renstra (Tahun 2024) Nilai Kinerja Anggaran adalah 95,5, maka realisasi tahun 2021 belum mencapai target akhir Resntra 2020-2024, dengan capaian 95,82%. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai dengan melakukan evaluasi realisasi capaian output, penyerapan anggaran, dan tertib administrasi keuangan setiap bulan dan menyusun langkah-langkah strategis untuk menaikkan nilai masing-masing komponen pada nila EKA dan IKPA sehingga dapat mencapai target akhir Renstra 2020-2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase pemenuhan Nilai Kinerja Anggaran adalah 93, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 98,40% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yokyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Padang (91,51) diikuti oleh BBPOM di Semarang (90,62), BBPOM di Yokyakarta (90,53) dan BBPOM Samarinda (89,34). Dari keempat Balai Besar POM yang berada dalam 1 kluster belum ada yang mencapai target IKU BPOM. Balai Besar POM di Padang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran paling tinggi dalam kluster dan juga paling tinggi (peringkat I) di antara BB/BPOM di seluruh Indonesia.



Gambar 3.84 Perbandingan target, realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang tahun 2020 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana Penilaian IKPA merupakan nilai hasil pembobotan pada komponen pendukungnya yang nilainya setiap bulan, sedangkan penilaian EKA realisasi bertahap naik dari awal bulan sampai akhir tahun seiring meningkatkannya realisasi output dan serapan anggaran.

Nilai EKA diperoleh dari nilai penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran (Rincian Output), dan efisiensi, dengan nilai penyerapan anggaran : 99,32, Konsistensi 99,88, CRO 100 dan nilai Efisiensi 57,24

Berdasarkan rumus perhitungannya, dilakukan pembobotan terhadap 4 komponen penilaian yaitu capaian rincian output (43.5%), efisiensi (28.6%), konsistensi (18.2%), dan penyerapan (9.7%) dengan masing-masing penilaian sebagai berikut:

- a. Komponen capaian rincian output (CRO) dengan nilai 100, merupakan nilai maksimal. Apabila nilai komponen ini dikonversikan pada bobot penilaian EKA akan diperoleh nilai 43.5, yaitu nilai maksimal pada penilaian EKA. Pada perhitungan capaian rincian output, nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100%, apabila capaian rincian output lebih dari 100% akan dianggap 100%, namun kelebihan nilai capaian rincian output ini akan berkontribusi pada perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dengan maksimal penyesuaian adalah 120%.
- b. Komponen efisiensi dengan nilai terendah yaitu 57,24. Apabila nilai komponen ini dikonversikan pada bobot penilaian EKA akan diperoleh nilai 16,37, dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 28.60. Yang mempengaruhi efisiensi adalah capaian RO dan penyerapan anggaran. Agar memperoleh nilai efisiensi yang optimal capaian RO diatas target volume RO dan dengan penyerapan anggaran sesuai pagu atau kurang dari pagu yang dialokasikan. Nilai efisiensi sulit dicapai, karena disisi lain terdapat target realisasi anggaran minimal sampai 99% seperti yang ditargetkan di tahun 2021
- c. Komponen konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan nilai 99,88 atau setara dengan 18,18 apabila dikonversikan pada bobot penilaian EKA dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 18.2. Yang mempengaruhi Konsistensi Perencanaan RPD Bulanan yang akurat dan kemampuan satker dalam mengeksekusi penyerapan anggaran bulanan. Agar memperoleh Kosistensi yang optimal maka Penyerapan anggaran bulanan harus mengacu kepada RPD Bulanan pada halaman 3 DIPA Petikan Revisi dan dengan melakukan revisi atas halaman 3 DIPA setiap dilakukan revisi anggaran.
- d. Komponen penyerapan anggaran dengan nilai 99.32 atau setara dengan 9.63 apabila dikonversikan pada bobot penilaian EKA, dengan nilai maksimal pada penilaian EKA adalah 9.70. Nilai realisasi anggaran ini terintegrasi dengan nilai realisasi anggaran pada OMSPAN berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN sampai dengan 31 Desember 2021.

Berdasarkan analisa diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sulit untuk dapat dicapai lebih dari 90%, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Padang tahun 2021 sebesar 87,68 termasuk kategori baik dalam pengelolaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.44 Nilai EKA Balai Besar POM di Padang Tahun 2021

Komponen penilaian EKA	Nilai	Bobot	Nilai Kinerja Indikator (NKI)
Penyerapan anggaran	99.32%	9.70%	9.63%
Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	99.88%	18.20%	18.18 %
Capaian Rincian Output	100%	43.50%	43.5%
Efisiensi	57.24%	28.60%	16.37 %
Total Nilai Kinerja Indikator (NKI) EKA		100.0%	87.68 %

Nilai IKPA pada tahun 2021 diperoleh 97.81% belum berhasil mencapai nilai maksimal. Dari 13 komponen penilaian IKPA terdapat 12 komponen dinilai dengan hasil 6 komponen mendapat nilai 100, dan 6 komponen tidak mencapai 100. Satu komponen yang tidak dilaksanakan yaitu indikator Renkas atau perencanaan kas yaitu rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (Rencana Penarikan Dana Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN, sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terdapat transaksi pencairan anggaran diatas 1 milyar rupiah.

Tabel. 3.45 Nilai IKPA Balai Besar POM di Padang Tahun 2021.

Keterangan	Keseesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
Nilai	100.00	84.37	100.00	100.00	97.00	100.00	100.00	91.25	100.00	99.90	99.75	0.00	95.00	92.39	95%	97.25
Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
Nilai Akhir	5.00	4.22	5.00	10.00	7.76	5.00	5.00	13.69	10.00	16.98	4.99	0.00	4.75			
Nilai Aspek	94.79			99.25				97.73				95.00				

Se Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Empat komponen dengan nilai kurang dari 100 adalah sebagai berikut :

- Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 5% dengan nilai 84,37 (4,22%). Deviasi halaman III DIPA merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan RPD bulanan. Untuk menekan besarnya deviasi tersebut perlu dilakukan pemutakhiran realisasi RPD sampai

dengan level detil dan dilakukan setiap bulan yang kemudian dimutakhirkan pada Kanwil DJPB setiap triwulan berakhir sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

- b. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 8% dengan nilai 97 (7,76%). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak boleh ada sisa yang dikembalikan/diseter.
- c. Penyerapan anggaran dengan bobot 15%, dengan nilai 91,25 (13,69%), dihitung berdasarkan rasio antara persentara penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap penyerapan anggaran triwulanan.
- d. Capaian output dengan nilai bobot tertinggi, yaitu 17%, dengan nilai 99,89 (16,98%), dihitung berdasarkan jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Konfirmasi capaian output bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran
- e. Retur SP2D dengan bobot 5% dengan nilai 99,75 (4,99%). Retur SP2D diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Untuk mencegah terjadinya retur SP2D dengan melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif.
- f. Kesalahan SPM dengan bobot 5% dengan nilai 95 (4.75%) dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front officer di KPPN dan pada saat verifikasi midle officer. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain belum dilakukan cek ulang pada dokumen lampiran SPM yang akan diunggah yang dipengaruhi oleh batas waktu yang singkat dalam mengunggah SPM karena sudah mendekati batas akhir pengunggahan SPM.

Dari uraian diatas bahwa untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pencapaian keluaran kegiatan lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggarannya yang akan sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran yang lebih baik dalam mencapai keluaran kegiatan, komitmen dan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun dengan tetap memperhitungkan target realisasi anggaran triwulanan yang harus dicapai serta komitmen dalam melakukan pmutakhirkan realisasi anggaran setiap bulan pada RPD aplikasi sakti

sampai dengan level detil dan dimutakhirkan setiap triwulan pada Kanwil DJPB.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pencapaian serapan anggaran setiap output dan kegiatan setiap bulan
- b. Refocusing dan realokasi sisa anggaran ataupun anggaran yang berpotensi tidak terserap menjadi kegiatan yang meningkatkan pencapaian kinerja.
- c. Pemutakhiran RPD bulanan atas realisasi anggaran setiap bulan sebelum tgl 10 bulan berikutnya;
- d. Pemantauan dan pengendalian proses pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Pengisian monev Smart DJA secara akurat dan tepat waktu
- f. Koordinasi dengan substansi terkait pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran
- g. Koordinasi secara aktif dengan KPPN Padang dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sehingga permasalahan pelaporan keuangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Meningkatkan pengisian realisasi Volume Rincian Output (RVRO) bulanan secara lengkap, akurat dan tepat waktu
- b. Memperoleh capaian RO yang optimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pencapaian RO di lapangan.
- c. Penyerapan anggaran secara optimal dan mengacu kepada RPD bulanan pada halaman 3 DIPA petikan revisi
- d. Melakukan revisi pada halaman 3 DIPA setiap dilakukan revisi anggaran
- e. Konsistensi realisasi anggaran bulanan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan revisi
- f. Menjalankan fungsi sebagai pengelola anggaran secara optimal oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran.

- g. Meningkatkan disiplin pelaporan, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan nilai IKPA

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Tabel 3.46. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021

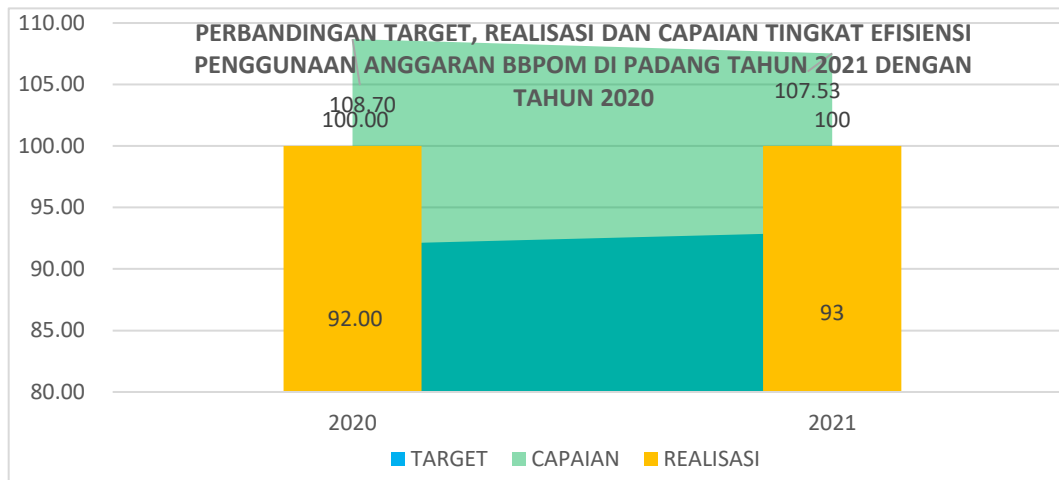
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	100	107,53	Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2021 adalah 100% dari target efisien 93%, sehingga capaian yang diperoleh tahun 2021 sebesar 107,53% dengan kriteria Baik

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian kinerja Tahun 2021 dengan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi Nilai Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 2020 (100) maka nilai yang diperoleh tahun 2021 sama dengan tahun 2020, bila dibandingkan dengan capaian 2020 (108,70) maka terdapat penurunan 1,17%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh target 2021 lebih tinggi dari 2020.



Gambar 3.85 Perbandingan target, realisasi dan capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Padang tahun 2021 dengan tahun 2020

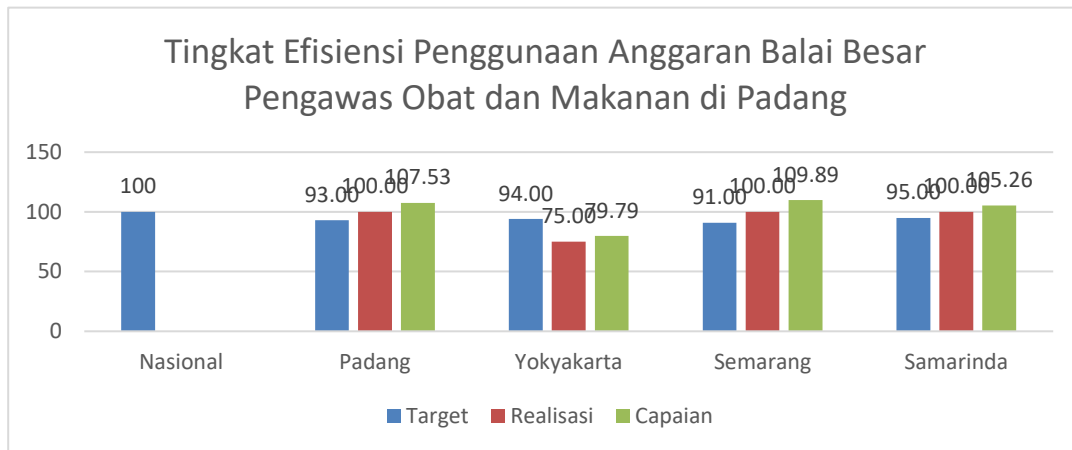
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berlaku ditahun 2020 dan 2021 saja, untuk tahun 2022 sd 2024 IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dikeluarkan dari IKU Balai Besar POM di Padang sesuai reviu Renstra BBPOM di Padang 2020-2024 karena IKU tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah termasuk di dalam IKU Nilai Kinerja Anggaran.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara

Target Nasional Persentase pemenuhan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah 92,7, maka bila dibanding dengan target nasional capaian yang diperoleh 107,87% (baik).

Apabila dibandingkan dengan Balai Besar POM yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu Balai Besar POM di Yogyakarta BBPOM di Semarang dan BBPOM di Samarinda maka realisasi Balai Besar POM di Padang, Samarinda dan Semarang sama yaitu sebesar 100%, sedangkan Balai Besar POM di Yogyakarta realisasi 75% belum mencapai target IKU BPOM.



Gambar 3.86 Perbandingan target, realisasi dan capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Padang tahun 2021 dengan target nasional dan balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi atau Upaya Nyata yang Telah Dilakukan.

Balai Besar POM di Padang :

Capaian Indikator tingkat efisiensi penggunaan Anggaran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 107,53% dari target 93 yang telah ditetapkan dan diatas target nasional kategori baik, hal ini disebabkan dari 29 indikator hanya 7 indikator yang memiliki realisasi dibawah 100%, sisanya 22 indikator memiliki realisasi diatas 100%. Sedangkan realisasi anggaran semua indikator memiliki realisasi diatas 90%, 27 indikator lainnya diatas 92%, sehingga menghasilkan efisiensi karena dengan anggaran yang terbatas bisa menghasilkan output yang melebihi target.

Capaian Indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 107,53% dari target 93 yang telah ditetapkan pada Reviu Rencana Strategis 2021-2024 Hal ini disebabkan 21 dari 29 indikator yang diukur efisien dan 8 indikator yang tidak efisien. Delapan indikator yang tidak efisien tersebut adalah

- a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan realisasi output 100,01% namun anggaran yang digunakan terealisasi 98,76% sehingga memberikan nilai TE 1,8 dan capaian TE 75%
- b. Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang bermutu dengan realisasi output 88,43% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99,81% sehingga memberikan nilai TE - 0,11 ; dan capaian TE 75%
- c. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi output hanya 91,96% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99,81% sehingga

- memberikan nilai TE -0.08, dan capaian TE 75%
- d. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan realisasi output 98,03% anggaran yang digunakan terealisasi 99.80% sehingga memberikan nilai TE -0.02 dan capaian TE 75%
 - e. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan realisasi output 98,18% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99.13% sehingga memberikan nilai TE -0.01 dan capaian TE 75%
 - f. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan realisasi output 95,58% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99.13% sehingga memberikan nilai TE -0.04 dan capaian TE 75%
 - g. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan realisasi output 134,41% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99.51% sehingga memberikan nilai TE 0,35 dan capaian TE 95%.
 - h. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Padang dengan realisasi output 98,89% namun anggaran yang digunakan terealisasi 99.51% sehingga memberikan nilai TE -0.01 dan capaian TE 75%.

Untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan indikator tidak efisien positif dimana output yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang digunakan, sedangkan 6 indikator lainnya merupakan indikator tidak efisien negatif yang memiliki realisasi output lebih kecil dibandingkan dengan realisasi input atau anggarannya.

Hal ini disebabkan :

- Perubahan target pada Reviu Rencana Strategis 2021-2024 pada akhir tahun 2021 sehingga beberapa realisasi yang dicapai pada tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah mengalami kenaikan pada reviu Renstra.
- Tidak tercapainya realisasi output pada indikator Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang bermutu, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM
- Tingginya capaian output Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk itu perlu dilakukan reviu target pada tahun berikutnya
- Perubahan rumus perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran oleh Kementerian Keuangan

yang menyebabkan penurunan yang besar pada nilai efisiensi.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kompetensi pegawai.
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut pada periode selanjutnya.
- c. Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak yang telah selesai

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Membuat rencana penyerapan anggaran dan kegiatan oleh setiap substansi dan bagian setiap triwulan
- b. Melaksanakan kegiatan secara maksimal untuk meningkatkan capaian output sehingga sebanding dengan penyerapan anggarannya
- c. Melakukan revisi anggaran untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
- d. Meningkatkan komitmen semua substansi dan bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada awal Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.45.920.455.000. Selama tahun 2021 telah dilakukan beberapa kali revisi DIPA sehingga anggaran menjadi Rp.41.448.152.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.18.400.491.000,- Belanja Barang Rp.18.923.701.000,- dan Belanja Modal Rp.4,123,960,000,- dengan realisasi anggaran Rp.41.168.302.154,- atau 99.32%.

Tabel 3.47. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	18.400.491.000	18.317.141.974	99.55%
Belanja Barang	18.923.701.000	18.732.160.798	98.99%
Belanja Modal	4.123.960.000	4.118.999.382	99.88%
	41.448.152.000	41.168.302.154	99.32%

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 11 sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT TAHUN 2021

Tabel 3.48. Realisasi Anggaran per Output Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e=(d/c \times 100)$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.ADD Standarisasi Lembaga	1	1	100%	3.167.775.000	3.114.472.320	98.32%
2	3165.AEA Koordinasi	5	5	100%	76.511.000	76.125.023	99.50%
3	3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	9	9	100%	192.252.000	182.264.300	94.80%
4	3165.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	12335	14954	121,23%	3.771.160.000	3.763.954.251	99.81%
5	3165.BKB Pemantauan produk	1	1	100%	1.485.219.000	1.478.906.966	99.58%
6	3165.BMB Komunikasi Publik	76	152	200%	194.630.000	193.663.650	99.50%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
7	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	3	3	100%	4.123.960.000	4.118.999.382	99.88%
8	3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	5	7	140%	433.439.000	431.347.650	99.52%
9	3165.QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	64	64	64	1.638.024.000	1.629.671.211	99.49%
10	3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2552	2551	99.96%	1.279.163.000	1.271.714.026	99.42%
11	3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1518	1596	105%	1.442.612.000	1.376.378.803	95.41%
12	6384.EAA Layanan Perkantoran	1	1	100%	23.643.407.000	23.528.201.013	99.51%
JUMLAH					41.448.152.000	41.165.698.598	99,32%

2. CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

Tabel 3.49. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>b</i>	<i>c</i>		<i>e</i>	$f = (e/dx 100)$	<i>g</i>	<i>h</i>	$I = (h/gx 100)$
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.5	84,94	99.35	Rp227.472.000	Rp224.788.390	98,82%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85.5	88,03	102.96	Rp12.850.000	Rp12.845.358	99,96%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84.01	100.02	Rp227.607.000	Rp224.788.390	98.76%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	86.51	113.83	Rp12.985.000	Rp12.845.358	98,92%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	96.25	101.32	Rp30.678.000	Rp29.607.452	96.51%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	84	74.28	88.43	Rp444.161.000	Rp443.310.315	99.81%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82.7	85.4	103.26	Rp96.126.000	Rp91.132.150	94,80%
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	73.87	67.93	91.96	Rp1.967.250.000	Rp1.963.529.373	99,81%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	pengawasan Obat dan Makanan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	93,13	103,48	Rp1.434.080.500	Rp1.407.697.415	98,16%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98,42	100,43	Rp360.653.000	Rp344.094.701	95,41%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	70,21	101,30	Rp364.805.250	Rp348.143.251	95,43%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,51	101,54	Rp96.126.000	Rp91.132.150	94,80%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	62,5	111,61	Rp51.008.750	Rp47.658.550	93,43%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	67	75,07	112,05	Rp666.145.000	Rp636.482.302	95,55%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
	memenuhi ketentuan						
	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,42	101,61	Rp314.131.000	Rp313.335.650	99,75%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	92,15	98,03	Rp1.909.780.000	Rp1.906.005.126	99,80%
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Rp603.883.000	Rp602.282.900	99,74%
	Jumlah desa pangan aman	18	18	100	Rp360.390.000	Rp356.260.396	98,85%
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100	Rp229.590.000	Rp227.817.600	99,23%
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98.18	98.18	Rp1.609.760.500	Rp1.595.733.754	99,13%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95.58	95.58	Rp1.617.229.500	Rp1.602.470.834	99,09%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93	125	134.41	Rp509.950.000	Rp507.472.673	99,51%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pengawas Obat dan Makanan di Padang							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83.2	83.17	99.96	Rp500.053.800	Rp497.863.802	99.56%
	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	79,80	79,90	100,13	Rp144.956.300	Rp144.904.654	99,96%
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83.7	85.7	102.39	Rp280.723.400	Rp278.056.620	99,05%
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	76.60	99.48	Rp3.473.758.000	Rp3.469.000.207	99.86%
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2,00	2,20	110,00	Rp126.860.000	Rp126.753.000	99.92%

SASARAN STRATEGIS	NAMA INDIKATOR	ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS					
		TARGET TW 4	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU TW IV	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92.5	91.51	98.93	Rp22.541.345.500	Rp22.431.619.643	99,51%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93,00	100,00	107,53	Rp1.233.793.500	Rp1.228.066.586	99,54%

3.3 ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Yang menjadi fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{IE}$$

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing Indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.50. Nilai efisiensi sasaran kegiatan Tahun 2021

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1,01	0,01	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1,03	0,03	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,02	1,80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,15	0,15	100 %
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	1,05	0,05	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	0,89	-0,11	75%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	1,09	0,09	100%
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0,92	-0,08	75%

9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	1,05	0,05	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1,05	0,05	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1,06	0,06	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1,07	0,07	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,19	0,19	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,17	0,17	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	1,02	0,02	100 %
16	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,98	-0,02	75 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	1,00	0,00	100 %
18	Jumlah desa pangan aman	1,01	0,01	100 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1,01	0,01	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,99	-0,01	75 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0,96	-0,04	75 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1,35	0,35	95 %
23	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1,00	0,00	100%
24	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1,00	0,00	100%
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1,03	0,03	100%
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1,00	0,00	75%
27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	1,10	0,10	100%

28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	0,99	-0,01	75%
29	Tingkat efisiensi Penggunaan anggaran Balai Besar POM di Padang	1,08	0,08	100%
TOTAL		1,03	0,03	100 %

Pada tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan, dengan rincian dari 29 indikator kinerja utama terdapat 21 IKU yang dikategorikan efisien, dan 8 IKU tidak efisien dengan perhitungan secara total tingkat efisien 100% (Efisien) dengan nilai tingkat efisiensi 0,03. Tingkat efisiensi per kegiatan diperoleh -0,11 sampai 1,80.

Kegiatan yang termasuk kategori tidak efisien adalah :

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target Indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 84, dan realisasi mencapai target yaitu 84,01 dengan persentase capaian 100,02%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 224.788.390 dari pagu sebesar Rp. 227.607.000 dengan persentase capaian anggaran 98,76%. Terlihat bahwa persentase input (anggaran) lebih kecil dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%) yaitu efisien positif, dimana target dapat dicapai menggunakan anggaran yang lebih sedikit dari perencanaan sehingga menjadi tidak efisien. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih matang sehingga anggaran yang digunakan lebih efektif.

2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

Target Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang adalah 84, sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu 74,28 dengan persentase capaian 88,43%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 443,310,315 dari pagu sebesar Rp. 444,161,000 dengan persentase capaian anggaran 99,81%. Dapat disimpulkan bahwa persentase input (anggaran) lebih besar dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu diperlukan peningkatan nilai Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu supaya selaras dengan anggaran yang digunakan, dimana anggaran yang telah dimanfaatkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Target Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 73,57, sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu 67,93 dengan persentase capaian 91,96%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 1.963,529,373 dari pagu sebesar Rp. 1.967,250,000 dengan persentase capaian anggaran 98,81%. Dengan lebih tingginya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu diperlukan peningkatan Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan supaya tingkat efisiensi penggunaan anggaran menjadi efisien dimana anggaran yang telah dimanfaatkan sebanding dengan kinerja yang diraih.

4. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
Target Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 94, sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu sebesar 92,15 dengan persentase capaian 98,03%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 1,906,005,126 dari pagu sebesar Rp. 1,909,780,000 dengan persentase capaian anggaran 99,80%. Dengan lebih tingginya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu diperlukan peningkatan Nilai Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan supaya tingkat efisiensi penggunaan anggaran menjadi efisien.

5. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100, sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu sebesar 98,18 dengan persentase capaian 98,18%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 1,595,733,754 dari pagu sebesar Rp. 1,609,760,500 dengan persentase capaian anggaran 99,13%. Dengan lebih tingginya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar harus ditingkatkan. Target menjadi 100% sesuai reviu Renstra BBOM di Padang 2020-2024, untuk mencapai target ini perlu perencanaan yang sistematis agar kegiatan pemeriksaan dan penguian sampel obat sesuai standar yang ditetapkan

6. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100, sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu sebesar 95,58 dengan persentase capaian

98,18%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 1,602,470,834 dari pagu sebesar Rp. 1,617,229,500 dengan persentase capaian anggaran 99,09%. Dengan lebih tingginya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar harus ditingkatkan. Target menjadi 100% sesuai reuiu Renstra BBOM di Padang 2020-2024, untuk mencapai target ini perlu perencanaan yang sistematis agar kegiatan pemeriksaan dan penguian sampel makanan sesuai standar yang ditetapkan.

7. Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Target Persentase Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 93 sedangkan realisasi jauh melebihi target yaitu sebesar 125 dengan persentase capaian 134,41%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 507,472,673 dari pagu sebesar Rp. 509,950,000 dengan persentase capaian anggaran 99,51%. Dengan lebih rendahnya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) yang mencapai lebih 120% sehingga mendapat kategori tidak efisien (95%). Untuk itu perlu dilakukan reuiu target tahun berikutnya, dan menganalisa kembali anggaran yang direncanakan untuk IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan ini.

8. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang adalah 92,50 sedangkan realisasi tidak mencapai target yaitu sebesar 91,51 dengan persentase capaian 98,93%. Penyerapan anggaran indikator ini adalah sebesar Rp. 22,431,619,643 dari pagu sebesar Rp. 22,541,345,500 dengan persentase capaian anggaran 99,31%. Dengan lebih tingginya persentase input (anggaran) dari output (kinerja) sehingga mendapat kategori tidak efisien (75%). Untuk itu capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Harus ditingkatkan. Nilai kinerja anggaran yang diperoleh menjadi lebih rendah pada tahun 2021 karena adanya perubahan cara penilaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) , sehingga terjadi penuunan nilai efisiensi yang berkontribusi terhadap nilai Kinerja Anggaran (NKA). Untuk itu perlu peningkatan implementasi kegiatan dan anggaran serta langkah-langkah yang tepat dalam pengisian monefey DJA.

Secara total tingkat efisiensi anggaran Balai Besar POM di Padang efisien, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) yang terbatas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, Pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output kinerja dan input dalam bentuk anggaran.

BAB IV

PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Padang.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Pada tahun 2021, BBPOM di Padang telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 berdasarkan reviu Renstra tahun 2020-2024, di mana terdapat penambahan 1 indikator baru yaitu “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat” sebagai salah satu indikator dalam sasaran kegiatan pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

Secara umum Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai 9 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria baik, 1 sasaran kegiatan dengan kriteria cukup dan 1 sasaran kegiatan tidak dapat disimpulkan.
2. Dari hasil pengukuran capaian kinerja BBPOM di Padang dengan membandingkan realisasi IKU tahun 2021 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan pada masing-masing perspektif maka diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Balai Besar POM di Padang tahun 2021 sebesar **101.67%**.
3. Realisasi anggaran pada tahun 2021 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar sebesar Rp.41.168.302.154 (empat puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau

99,32% dari total pagu anggaran sebesar Rp.41.448.152.000(empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

4. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat efisien dengan nilai efisiensi 100%

Pernyataan keberhasilan tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 103,49% dengan kriteria **baik**;
2. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 88,43% dengan kriteria **cukup**;
3. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 97,16% dengan kriteria **baik**;
4. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 104,59% dengan kriteria **baik**;
5. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 99,51% dengan kriteria **baik**.
6. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 96,88% dengan kriteria **baik**;
7. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**;
8. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Padang yang optimal dengan NPS sebesar 100,04% dengan kriteria **baik**;
9. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil mewujudkan SDM yang

berkinerja optimal dengan NPS 102,39% dengan kriteria **baik**;

10. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 104,74% dengan kriteria **baik**;
11. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Padang berhasil mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS sebesar 103,23% dengan kriteria **baik**;

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diperoleh Balai Besar POM di Padang Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut, terutama untuk realisasi yang masih rendah. Hal ini diperlukan untuk untuk rencana perbaikan kinerja Balai Besar POM di Padang triwulan berikutnya. Rencana perbaikan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan capaian sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil sampling pengujian yang tidak memenuhi syarat. Melakukan koordinasi dengan stakeholder di daerah terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap sarana produksi dan distribusi secara berkesinambungan. Meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk Tanpa Izin Edar dan produk -produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran. Melakukan peningkatan kompetensi yang berkesinambungan terhadap petugas sampling, pengawas dan pengujian
2. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi petugas secara berjenjang dan merata agar dapat menyampaikan KIE lebih menarik dan interaktif kepada masyarakat. Melakukan evaluasi kompetensi petugas melalui masukan (form penilaian petugas) dari stakeholder dan meningkatkan edukasi terkait izin edar kepada masyarakat, karena berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap izin edar masuk ke dalam kategori “tidak baik”.

3. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan bimbingan dan pembinaan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE). Meningkatkan sosialisasi bagi pelaku usaha dan masyarakat terkait peraturan dan regulasi yang terkini terkait obat dan makanan. Membentuk komitmen dengan lintas sektor untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan membuat SK Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan yang diketuai oleh Sekda Kab/Kota sesuai Permendagri No.41 tahun 2018. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan publik Meningkatkan kompetensi petugas secara berkelanjutan dalam memberikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
4. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha/ pengelola sarana dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut. Meningkatkan monitoring kegiatan oleh petugas dan pimpinan terutama terhadap evaluasi permohonan sertifikasi dan evaluasi CAPA sehingga *timeline* layanan sertifikasi dapat tercapai. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta dinas terkait dalam melakukan kegiatan bersama untuk pembinaan kepada pelaku usaha. Meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan/bimtek sehingga petugas mampu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha.
5. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu dengan melaksanakan KIE dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui media social. Membuat *whatsapp* grup untuk memudahkan pengawalan sekolah intervensi PJAS yang beranggotakan seluruh Tim Keamanan Pangan dari seluruh sekolah. Melakukan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu. Pemilihan pasar intervensi dilakukan lebih selektif sesuai persyaratan dalam petunjuk teknis dengan tetap melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji di laboratorium, substansi Pengujian secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan PUK dan timeline sampel yang diuji. Pengadaan baku pembanding secara mandiri dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan Reagensia yang dibutuhkan laboratorium setiap tahunnya, sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Reagensia Rapat Evaluasi dengan substansi pemeriksaanyang bertujuan untuk mensinkronkan jumlah sampel yang telah disampling dan realisasi sampel yang masuk ke laboratorium.
7. Peningkatan capaian sasaran Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dilakukan dengan Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan intelijen, patroli siber dan penyidikan dan meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input untuk perkara obat dan makanan.
8. Peningkatan capaian sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal dilakukan dengan Penyusunan rencana kerja prioritas pembangunan ZI yang mengakomodir seluruh area perubahan.Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang memuat kendala dan rencana tindak lanjut diperide berikutnya. Terus melakukan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik Balai Besar POM di Padang dan kebutuhan stakholder. Peningkatan nilai AKIP dilakukan dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja
9. Peningkatan capaian sasaran Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal dilakukan dengan Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial sosio kultural terutama bagi pegawai yang memiliki gap kompetensi. Mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan secara mandiri dan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja dan penerapan disiplin pegawai.

10. Peningkatan capaian sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dengan membuat Perencanaan terhadap peningkatan kompetensi petugas pengujian dalam rangka pemenuhan SKL, baik pelatihan internal dan eksternal, Peningkatan pemenuhan Alat Laboratorium sesuai standar SKL yang telah ditetapkan PPPOMN, Melakukan Monev setiap bulan untuk pemenuhan terhadap SKL. Peningkatan nilai Indeks Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan Petugas SIPT secara aktif dan tepat waktu dalam melakukan pengisian SIPT, Tim TI BBPOM di Padang aktif dalam menginformasikan, melaksanakan sosialisasi serta melakukan pemantauan kepada pimpinan dan pegawai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dibangun dalam mengelola data dan informasi. Tim TI BBPOM aktif berkoordinasi dengan pengguna aplikasi maupun dengan tim Pusdatin BPOM jika terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi ataupun teknologi lainnya, serta cepat dalam penanganan masalah terkait TIK.

11. Peningkatan capaian sasaran Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel dilakukan dengan Memperoleh capaian Rincian output yang optimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pencapaian RO di lapangan, Meningkatkan disiplin pelaporan, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan nilai IKPA. Membuat rencana penyerapan anggaran dan kegiatan oleh setiap substansi dan bagian setiap triwulan. Melaksanakan kegiatan secara maksimal untuk meningkatkan capaian output yang sebanding dengan penyerapan anggaran dan melakukan revisi anggaran untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PADANG,



FIRDAUS UMAR *Y.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
 NOMOR PR. 04.01.93.931.12.20.189 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	62
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,64
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		3. Jumlah desa pangan aman	18
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91
		2. Persentase sampel makanan	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89
8	Terwujudnya organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang efektif	1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92
		2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	85
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	77
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	94
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Efisien (93%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,


 FIRDAUS UMAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Padang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Umar, S.Si, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Padang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 08 November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Firdaus Umar, S.Si, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Padang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.87

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.35
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.00
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.2
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.8
25	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83.7
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	93

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
41,448,152,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Padang, 08 November 2021

Pihak Pertama



Firdaus Umar, S.Si, Apt



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Padang Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			85.5			85.5			85.5	85.5	85.5	85.5	227.472.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			85.5			85.5			85.5	85.5	85.5	85.5	12.985.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			84			84			84	84	84	84	227.472.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			76			76			76	76	76	76	12.985.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			95			95			95	95	95	95	30.678.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu			84			84			84	84	84	84	444.161.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan			82.7			82.7			82.7	82.7	82.7	82.7	96.126.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan			73.87			73.87			73.87	73.87	73.87	73.87	1.967.250.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			90			90			90	90	90	90	1.434.080.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			98			98			98	98	98	98	360.653.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			70			70			70	70	70	70	364.805.250, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			98			98			98	98	98	98	96.126.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			56			56			56	56	56	56	51.008.750,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			67			67			67	67	67	67	690.345.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.35	314.131.000,00
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94.00			94.00			94.00	94.00	94.00	94.00	1.885.580.000,00
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			10			40			70	70	70	40	603.883.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			10			40			75	75	75	18	360.390.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			10			40			70	70	70	6	229.590.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			25			40			75	75	75	100	1.609.760.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			25			35			70	70	70	100	1.617.229.500,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			20			30			50	50	50	93	509.950.000,00
23.	Indeks RB UPT												83.2	500.053.800,00
24.	Nilai AKIP UPT												79.8	144.956.300,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83.7	280.723.400,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												77	3.473.758.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2	2	2	2	126.860.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			45			50			60	60	60	92.5	22.541.345.500, 00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			93			93			93	93	93	93	1.233.793.500, 00
Total													41.448.152.000, 00	

Padang, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Padang

Firdaus Umar, S.Si, Apt

**PENCAPAIAN KINERJA BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2021**

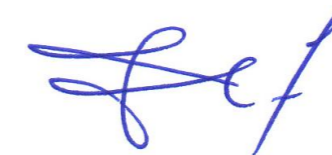
NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA	
Stakeholder Perspective											
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	85.50	1038	1222	84.94	99.35	99.35	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	85.50	515	585	88.03	102.96	102.96	Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	84.00	452	538	84.01	100.02	100.02	Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	76.00	109	126	86.51	113.83	113.83	Sangat baik
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	%	95.00	77	80	96.25	101.32	101.32	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS1:								103.49	103.49	Baik	
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Indeks	84.00	-	-	74.28	88.43	88.43	Cukup
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS2:								88.43	88.43	Cukup	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	82.70	-	-	85.40	103.26	103.26	Baik
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	73.87	-	-	67.93	91.96	91.96	Baik
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	90.00	-	-	93.13	103.48	103.48	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS3:								99.57	99.57	Baik	
Capaian Stakeholder Perspective								97.16	97.16	Baik	
Internal Process Perspective											
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	98			98.42	100.43	100.43	Baik

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA	
	Pengawas Obat dan Makanan di Padang	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	70			70.21	100.30	100.30	Baik
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	98.00	1216	1222	99.51	101.54	101.54	Baik
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	56.00	115	184	62.50	111.61	111.61	Sangat baik
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	67.00	1060	1412	75.07	112.05	112.05	Sangat baik
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.35	-	-	4.42	101.61	101.61	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS4:								104.59	104.59	Baik	
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	16	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	94.00	-	-	92.15	98.03	98.03	Baik
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	40.00			40.00	100.00	100.00	Baik
		18	Jumlah desa pangan aman	Desa	18.00			18.00	100.00	100.00	Baik
		19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	6.00			6.00	100.00	100.00	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS5:								99.51	99.51	Baik	

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA	
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100.00	-	-	98.18	98.18	98.18	Baik
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100.00	-	-	95.58	95.58	95.58	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS6:								96.88	96.88	Baik	
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	93.00			125.00	134.41	120.00	Tidak dapat disimpulkan
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS7:								134.41	120.00	Tidak dapat disimpulkan	
Capaian Internal Process Perspective								108.85	105.24	Baik	
Learning & Growth Perspective											
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	23	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	83.20	-	-	83.17	99.96	99.96	Baik
		24	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	79.80	-	-	79.90	100.13	100.13	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS8:								100.04			
SS9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Indeks	83.70	-	-	85.70	102.39	102.39	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS9:								102.39	102.39		

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	PEMBILAN G	PENYEBUT	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)	KRITERIA	
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	77.00	-	-	76.60	99.48	99.48	Baik
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	Indeks	2.00	-	-	2.20	110.00	110.00	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS10:								104.74	104.74	Baik	
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	Nilai	92.50	-	-	91.51	98.93	98.93	Baik
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	%	93.00	-	-	100.00	107.53	107.53	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) SS11:								103.23	103.23	Baik	
Learning & Growth Perspective								102.60	102.60	Baik	
NPS TOTAL								102.87	101.67		

Mengetahui
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Padang



Firdaus Umar, S.Si, Apt

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2021**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.50%	1038	1222	84.94	99.35%	Target tidak tercapai	a. Perencanaan kegiatan pengawasan sarana dan sampling di kab. kep mentawai b. Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait peningkatan kemampuan uji serta mempercepat pengadaan reagensia. c. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara during dan luring d. Mengajukan kembali usulan baku banding ke P3 OMN	Telah dilaksanakan pengawasan sarana dan sampling di kab Mentawai	Tidak ada hambatan	a. Melaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b.Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait pelaksanaan kegiaran Regionalisasi Laboratoium
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85.50%	515	585	88.03	102.96%	Target tercapai	a. Perencanaan kegiatan pengawasan sarana dan sampling di kab. kep mentawai b. Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait peningkatan kemampuan uji serta mempercepat pengadaan reagensia. c. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara during dan luring d. Mengajukan kembali usulan baku banding ke P3 OMN	Telah dilaksanakan pengawasan sarana dan sampling di kab Mentawai	Tidak ada hambatan	a. Melaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b.Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait pelaksanaan kegiaran Regioalisasi Laboratoium

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00%	452	538	84.01	100.02%	Target tercapai	a. Pelaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b. Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait peningkatan kemampuan uji serta mempercepat pengadaan reagensia. c. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara during dan luring d. Mengajukan kembali usulan baku banding ke P3 OMN	Telah dilaksanan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan	Tidak ada hambatan	a.Melaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b.Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait pelaksanaan kegiaran Regioalisasi Laboratoium
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76.00%	109	126	86.51	113.83%	Target tercapai	a. Pelaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b. Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait peningkatan kemampuan uji serta mempercepat pengadaan reagensia. c. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara during dan luring d. Mengajukan kembali usulan baku banding ke P3 OMN	Telah dilaksanan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan	Tidak ada hambatan	a. Melaksanaan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan b.Melakukankan koordinasi antara subtansi pemeriksaan dan pengujian terkait pelaksanaan kegiaran Regioalisasi Laboratoium

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95.00%	77	80	96.25	101.32%	Target tercapai	Realisasi baru di tw 4	Telah dilaksanakan sampling dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan	Tidak ada hambatan	a. Melaksanakan sampling Pangan Fortifikasi dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84.00%	-	-	74.28	88.43%	Target tidak tercapai	Realisasi baru di tw 4	Telah dilaksanakan perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan KIE namun harus lebih luash dan beragam agar cakupan KIE dapat lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat	a. Belum menyeluruhnya kegiatan KIE yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Barat b. Belum beragamnya metode KIE yang digunakan c. Adanya pembagian wilayah kerja BBPOM di Padang dengan Loka POM Payakumbuh dan Loka POM Dharmasraya	a. Membuat inovasi kegiatan KIE b. Melaksanakan KIE Tomas c. Melaksanakan KIE pada kegiatan Car Free Day d. Melaksanakan KIE Ritel e. Melaksanakan KIE media cetak/elektronik f. Melaksanakan KIE melalui medsos g. Melaksanakan KIE pada acara Pameran
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82.70%	-	-	85.4	103.26%	Target tercapai	Realisasi baru di tw 4	1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan, obat tradisional dan kosmetik agar dapat menerapkan cara produksi dan cara distribusi yang baik 2. Melakukan komunikasi dengan stakeholder dan dinas terkait agar dapat berkoordinasi dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha sehingga obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu	Tidak ada hambatan	1. Melaksanakan bimtek terkait penerapan GMP produk obat dan makanan kepada pelaku usaha secara berkelanjutan 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi obat dan makanan kepada pelaku usaha sehingga mampu menerapkan GMP produk obat dan makanan

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73.87%	-	-	67.93	91.96%	Target tidak tercapai	Realisasi baru di tw 4			1. Meningkatkan kegiatan KIE obat dan makanan 2. Meningkatkan kompetensi petugas agar dapat melakukan pengawasan obat dan makanan untuk semua sarana produksi dan distribusi 3. Meningkatkan koordinasi dengan satkeholder agar dapat melakukan pengawasan secara sinergi sehingga dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan 4. Melibatkan tokoh masyarakat/ tokoh agama dan komunitas masyarakat dalam pelaksanaan KIE 5. Menyusun materi KIE yang lebih menarik, lebih update dan mudah dipahami oleh masyarakat 6. menggunakan media KIE yang banyak diakses oleh masyarakat d. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan KIE
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.00%	-	-	93.13	103.48%	Target tercapai	Akan mengadakan kegiatan untuk mengedukasi stakeholder/ masyarakat secara daring/luring untuk penggunaan aplikasi Galamai	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada stake holder tentang penggunaan aplikasi Galamai	a. Kompetensi petugas layanan publik perlu lebih ditingkatkan lagi b. Masih ada sarana dan prasarana layanan publik yang kurang memadai	a. Meningkatkan kompetensi petugas layanan publik b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan publik di BBPOM di Padang c. Meningkatkan kualitas layanan pihak ketiga

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98.00%			98.42	100.43%	Target tercapai	Melaksanakan sosialisasi penerapan aplikasi untuk mempermudah petugas dalam pembuatan surat TL	telah dilaksanakan sosialisasi penerapan aplikasi untuk mempermudah petugas dalam pembuatan surat TL	a. Aplikasi baru bisa disosialisasikan pada bulan Desember 2021, belum bisa diterapkan pada TW IV b. Terjadinya perubahan/peningkatan target capaian kinerja pada TW 3, yang sangat tinggi, sehingga semua pembuatan surat TL harus dilaksanakan	Merencanakan penerapan aplikasi, agar bisa mempercepat petugas dalam membuat surat TL
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00%			70.21	100.30%	Target tercapai	Melakukan monitoring secara konsisten dan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor	Telah dilakukan monitoring dan telah dilakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor	Masih ada beberapa pelaku usaha yang masih tidak peduli terhadap TL hasil inspeksi, sehingga petugas terus mengingatkan pelaku usaha, sampai pelaku usaha mengirimkan respon berupa CAPA terhadap surat TL yang diterima	a. Melakukan peningkatan dalam melakukan monitoring terhadap CAPA. B. Mengoptimalkan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.00%	1216	1222	99.51	101.54%	Target tercapai	1. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran produk melalui aplikasi sertifikasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait sehubungan proses pendaftaran sertifikasi OMKABA	1. Telah melakukan pendampingan terhadap 48 sarana produksi 2. Melakukan koordinasi dengan Disperindag Provinsi Sumbar, Dinaskerin Kota Padang, Dinas Pangan dan Peternakan Kab. Pesisir Selatan terkait pendampingan UMKM	Tidak ada hambatan	Meningkatkan layanan pendampingan terhadap pelaku usaha dan stakeholder
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56.00%	115	184	62.50	111.61%	Target tercapai	Meningkatkan frekuensi pengawasan pada TW IV untuk mencapai target pengawasan sarana Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM	Telah dilaksanakan peningkatan frekuensi pengawasan pada TW IV untuk mencapai target pengawasan sarana tahun 2021 Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM	Tidak ada hambatan	a. Membuat perencanaan pengawasan sarana produksi berdasarkan kajian resiko b. Selalu bekoordinasi dengan pemerintah terkait kegiatan pelaksanaan DAK Non Fisik POM

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67.00%	1060	1412	75.07	112.05%	Target tercapai	Meningkatkan frekuensi pengawasan pada TW IV untuk mencapai target pengawasan sarana Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM	Telah dilaksanakan peningkatan frekuensi pengawasan pada TW IV untuk mencapai target pengawasan sarana tahun 2021 Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM	Tidak ada hambatan	a. Membuat perencanaan pengawasan sarana Distribusi berdasarkan kajian resiko b. Selalu bekoordinasi dengan pemerintah terkait kegiatan pelaksanaan DAK Non Fisik POM
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.35	-	-	4.42	101.61%	Target tercapai	Akan memperbanyak pembuatan spanduk, baliho buku, poster dan informasi di media sosial tentang layanan di BBPOM di Padang agar masyarakat lebih mengenal layanan publik BBPOM di Padang	Telah dibuat beberapa produk informasi tentang Layanan Publik BBPOM di Padang	a. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam memberikan Layanan Publik b. Masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait layanan publik di BBPOM di Padang karena produk informasi yang dibuat belum tersebar luas dan atau ditempatkan di tempat yang strategis seperti	a. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam memberikan Layanan Publik b. Merencanakan pembuatan produk informasi terkait Layanan Publik menarik dan diletakkan di tempat yang strategis untuk mensosialisasikan Layanan Publik BBPOM di Padang
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94%	-	-	92.15	98.03%	Target tidak tercapai	Mendampingi peserta ketika mengisi link kuisisioner Efektivitas KIE	Telah dilakukan pendampingan pada saat pengisian kuisisioner efektivitas KIE	a. Belum beragamnya metode KIE yang digunakan sehingga jangkauan KIE tidak menyeluruh di Sumatera Barat b. Masyarakat belum dapat memahami Materi yang disampaikan karena belum	a. Meningkatkan inovasi metode KIE yang digunakan sehingga lebih beragam dan dapat menjangkau masyarakat luas b. Meningkatkan kompetensi petugas dalam menyampaikan materi sehingga masyarakat lebih
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00	0.00%	0.00%	40.00	100.00%	Target tercapai	Pada kegiatan operasional mobkel dilakukan penjelasan ulang terkait pengisian form yang telah dijelaskan pada waktu kegiatan monev secara daring	a. Penilaian Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman telah selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 dan pengumuman hasil sertifikasi dilakukan pada Zoom Meeting Evaluasi dan Sertifikasi PJAS Aman. b. Replikasi PJAS yang dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan November 2021 oleh sekolah yang diintervensi tahun 2020 dan 2021 adalah sebanyak 86 sekolah.	a. Pada penilaian sertifikasi sekolah, data yang harus dilengkapi oleh sekolah harus dikawal terus menerus b. Tim Keamanan Pangan Sekolah masih banyak yang tidak memahami teknologi informasi sehingga terkendala ketika meng-input data c. OPD terkait yang belum optimal dalam mengawal kegiatan	a. Tim Keamanan Pangan Sekolah yang dipilih setidaknya mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi b. Melaksanakan Monev Linsek secara berkala untuk mengawal komitmen linsek dalam Kegiatan PJAS c. Melaksanakan kegiatan Audiensi dengan lintas sektor terkait di Kab/Kota yang telah dipilih untuk diintervensi pada tahun 2022 untuk menentukan Sekolah-sekolah yang akan menjadi Sekolah dengan PJAS aman

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		18	Jumlah desa pangan aman	18.00	0.00%	0.00%	18.00	100.00%	Target tercapai	a. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan secara tatap muka agar hasil yang didapatkan lebih optimal b. Pada TW IV akan dilaksanakan kegiatan Monev Desa Pangan Aman dan Lomba Desa Pangan Aman	Pada TW IV telah dilaksanakan kegiatan Monev Desa Pangan Aman secara luring/ tatap muka dan Lomba Desa Pangan Aman	a. Kurangnya ketelitian kader dalam pengisian form fasilitasi dengan masih ditemukannya beberapa data yang tidak lengkap sehingga Petugas harus lebih hati-hati memeriksa laporan pada kegiatan Monev b. Banyaknya data/dokumentasi fasilitasi yang tidak ada karena jarak waktu pelaksanaan antara fasilitasi dan pengumpulan laporan fasilitasi yang cukup jauh c. Kegiatan yang dilakukan secara daring/online tidak optimal karena meyeroket	a. Kader segera melaporkan kegiatan fasilitasi secara langsung lewat bit.ly sehingga tidak ada lagi data/dokumentasi yang hilang b. Merencanakan untuk melaksanakan setiap kegiatan dilakukan secara tatap muka sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal c. Melaksanakan kegiatan Audiensi dengan lintas sektor terkait di Kab/Kota yang telah dipilih untuk diintervensi pada tahun 2022 untuk menentukan Desa yang akan dibina menjadi Desa Pangan Aman d. Melaksanakan Advokasi
		19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6.00	0.00%	0.00%	6.00	100.00%	Target tercapai	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV	Pada TW IV, telah terlaksana kegiatan Lomba Pasar dan Monev Pasar II untuk Pengawasan Pasar yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya	a. Masih ditemukannya Bahan Berbahaya pada saat Monev Pengawasan Pasar Intervensi sebelumnya b. Sulitnya untuk memenuhi target jumlah sampel yang harus diuji pada pasar tipe C/D c. Karena masa pandemi ini, jadwal kegiatan pasar sering berbenturan dengan kegiatan vaksin di daerah sehingga kegiatan sering tertunda	a. Akan melaksanakan kegiatan Audiensi dengan lintas sektor terkait di Kab/Kota yang telah dipilih untuk diintervensi pada tahun 2022 untuk menentukan Pasar yang akan dibina menjadi Pasar Aman Berbasis Komunitas b. Melaksanakan kegiatan Advokasi dengan Pemda dalam rangka sosialisasi, koordinasi dan menumbuhkan komitmen dari Pemda untuk bersama-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	-	-	98.18	98.18%	Target tidak tercapai	1. Menambah anggaran untuk pengadaan reagensia, suku cadang dan baku banding dan biaya perbaikan alat lab 2. memperbaiki alat labor yang rusak dengan mendatangkan teknisi	Sudah dilakukan revisi anggaran untuk pengadaan reagensia, suku cadang dan biaya pemeliharaan laboratorium, dan sudah memperbaiki alat laboratorium yang rusak.	untuk produk Obat yang TMS membutuhkan waktu yang lebih lama untuk HULS dan pengulangan uji antar staf	Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk pemenuhan PUK dan Timeline
		21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	-	-	95.58	95.58%	Target tidak tercapai	1. Melakukan revisi penambah anggaran untuk pengadaan reagensia terutama reagensia untuk sampel pihak ketiga dan DAK, suku cadang dan baku banding dan biaya perbaikan alat lab 2. memperbaiki alat labor yang rusak dengan mendatangkan teknisi	Sudah dilakukan revisi anggaran untuk pengadaan reagensia, suku cadang dan biaya pemeliharaan laboratorium, dan sudah memperbaiki alat laboratorium yang rusak.	untuk produk Makanan yang TMS membutuhkan waktu yang lebih lama untuk HULS dan pengulangan uji antar staf, pelatihan	Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk pemenuhan PUK dan Timeline
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93%	-	-	125	134.41%	Target tercapai	Mengusulkan permintaan pembelian Handphone khusus untuk Patroli Siber	Melakukan kegiatan patroli siber dengan perangkat yang ada seperti HP pribadi dan komputer atau laptop	Sudah dibuat perencanaan namun belum tersedia anggaran untuk HP khusus karena belum diprioritaskan	Membuat rencana permintaan kembali untuk diprioritaskan

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	23 Indeks RB UPT	83.20	-	-	83.17	99.96%	Target tidak tercapai	Realisasi baru di tw 4	1. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja RB dan tindak lanjut monev sebelumnya 2. Pelaksanaan desk RB oleh menpan dan menambahkan data dukung RB sesuai hasil Desk 3. Pembuatan video WBBM, persentase dan yel-yel 4. Perbaikan ruangan Layanan publik	1. Koordinasi dalam pemenuhan implementasi rencana kerja RB oleh masing-masing zona	1. Penyusunan rencana kerja yang mengakomodir seluruh zona 2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk tindak lanjut perbaikan 3. Melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru	
		24 Nilai AKIP UPT	79.80	-	-	79.9	100.13%		Realisasi baru di tw 4	Nilai belum keluar			
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	25 Indeks Profesionalitas ASN UPT	83.70	-	-	85.7	102.39%	Target tercapai	Realisasi baru di tw 4	Mengawal pemenuhan JP pegawai melalui peningkatan kompetensi secara online melalui ideas dll	- Perhitungan IP ASN melalui sistem masih terdapat "flaws" dimana, beberapa pegawai dengan jabatan JFT penyelia senior, nilai IP pada kategori kompetensinya tidak maksimal. Hal ini dikarenakan ybs tidak mempunyai sertifikat kompetensi dan blm mengikuti Ukom, sementara nilai pemetaan kompetensi mansoskul ybs dibawah 78, sehingga IP ASN ybs menjadi tidak maksimal. Selain itu, pada aplikasi menu IP-ASN, pengelompokan kategori pengembangan kompetensi yaitu antara diklat teknis dan seminar, belum sesuai. - Masih terdapat pegawai senior dengan pendidikan SLTA yang mengalami kesulitan dalam mengikuti bangkom secara online, sehingga perlu pendampingan intens.	- Mengusulkan keikutsertaan Kepala BBPOM di Padang pada diklatpim II. - Mengawal pemenuhan JP pegawai, mengingatkan setiap pegawai agar mengikuti bangkom secara mandiri. - Menginformasikan pelaksanaan-pelaksanaan pelatihan yang dapat diikuti ke pegawai. - Mengawal implementasi rencana pelaksanaan bangkom 2022 yang telah disetujui PPSDM	

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77.00%	-	-	76.6	99.48%	Target tidak tercapai	Realisasi baru di tw 4	Substansi Pengujian akan melakukan penambahan Ruang Lingkup yang tidak dapat dilaksanakan pada TW4. Serta peningkatan kompetensi petugas pengujian	-Uji peningkatan RL dengan 2 parameter uji batal direalisasikan oleh P3OMN di tahun 2021 (Identifikasi Clobetasol dan Mamotason dalam Kosmetik secara KCKT dan Penetapan Kadar Iodopropynyl Butylcarbamate dalam Kosmetik secara GCMS) . Salah satu dari 2 PU tsb diterima tanggal 3 januari 2022 (Identifikasi Clobetasol dan Mamotason dalam Kosmetik secara KCKT) - Kesulitan dalam mencari sediaan dan generik name di pasaran/tidak beredar lagi. Untuk Ruang Lingkup	Pemenuhan Ruang lingkup yang tidak tercapai akan dilaksanakan di tahun 2022 Melakukan Koordinasi dengan P3OMN dalam hal ketersediaan baku pembanding	
		27 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.00	-	-	2.2000	110.00%	Target tercapai	a. Petugas SIPT, tim TIK BBPOM di Padang dan Pusdatin BPOM secara aktif berkoordinasi jika terjadi masalah pada aplikasi. B. Permintaan database penandaan yang sudah di entry sebelumnya ke Pusdatin, untuk mempermudah proses penginputan ulang c. Tim medsos dan pegawai BBPOM di Padang aktif menyebarluaskan link berita aktual agar bisa di lihat oleh masyarakat luas e. Tim TI BBPOM di Padang secara aktif melakukan sosialisasi mengenai email corporate ke seluruh pegawai BBPOM di Padang	a. Petugas SIPT, tim TIK BBPOM di Padang dan Pusdatin BPOM secara aktif berkoordinasi jika terjadi masalah pada aplikasi. b. Setiap bidang aktif mengirim berita kegiatan ke tim medsos untuk dimasukkan ke Berita Aktual Subsite BBPOM di Padang, serta aktif menyebarluaskan link berita aktual agar bisa di lihat oleh masyarakat luas c. Tim TI BBPOM di Padang secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan TI seperti email corporate, sharing folder ke seluruh pegawai BBPOM di Padang d. Verifikasi Spimker tepat waktu e. Pemanfaatan BOC setiap hari	a. Petugas SIPT Penandaan harus mengentri ulang kembali data penandaan dari bulan Januari-Agustus 2021, karena ada perubahan alur SIPT Penandaan, sehingga mengganggu proses pengiriman hasil pengujian di SIPT pengujian (karena harus menunggu hasil penandaan diisi)	a. SIPT diisi realtime setelah bisa di launching awal tahun b. Seluruh bidang aktif mengirim berita aktual setiap habis kegiatan & di upload ke subsite & di share ke masyarakat c. Spimker di verifikasi tepat waktu d. Aktif pemanfaatan BOC setiap hari e. Aktif dalam pemanfaatan email corporate untuk seluruh pegawai f. Aktif pemanfaatan sharing folder setiap hari	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28 Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.50	-	-	91.51	98.93%	Target tidak tercapai	1. Melakukan evaluasi secara konsisten terhadap capaian pelaksanaan output kegiatan dan realisasi anggaran 2. Melaksanakan rapat evaluasi bulanan dan triwulan 3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan anggran antara semua bagian dan substansi	1. Koordinasi dengan substansi dan loka terkait realisasi capaian output dan anggaran 2. Rapat evaluasi capaian kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran	1. Masih kurang Pemahaman terhadap defenisi operasional IKU dan Rincian output serta terjadinya perubahan defenisi pada TW 4	1. Peningkatan pemahaman defenisi IKU dan Rincian output yang terkait pada masing-masing substansi loka	

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	REALISASI 2021			Capaian	Kesimpulan	RENCANA TINDAK LANJUT PADA PERIODE SEBELUMNYA (TW III)	PERBAIKAN YG DILAKSANAKAN DI TW IV TERHADAP REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	HAMBATAN TW IV	RENCANA TINDAK LANJUT BERIKUTNYA	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	93%			100	107.53%	Target tercapai	Melakukan evaluasi dan perencanaan kegiatan terhadap sisa anggaran yang ada untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan di triwulan IV	- Melakukan revisi anggaran - Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai target Output dan pencapaian IKU	- Masih adanya kegiatan yang tidak dapat terealisasi sehingga mengurangi serapan anggaran	1. Membuat perencanaan penyerapan anggaran oleh semua substansi dan bagian 2. Penyusunan POA fisik dan POA anggaran secara akurat

Mengetahui

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Firdaus Umar, S.Si, Apt

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.5	84.94	99.35	227,472,000	224,788,390	98.82	1.01	0.01	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85.5	88.03	102.96	12,850,000	12,845,358	99.96	1.03	0.03	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84.01	100.01	227,607,000	224,788,390	98.76	1.01	1.80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	86.51	113.83	12,985,000	12,845,358	98.92	1.15	0.15	100 %
5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95	96.25	101.32	30,678,000	29,607,452	96.51	1.05	0.05	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	84	74.28	88.43	444,161,000	443,310,315	99.81	0.89	-0.11	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82.7	85.4	103.26	96,126,000	91,132,150	94.80	1.09	0.09	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.87	67.93	91.96	1,967,250,000	1,963,529,373	99.81	0.92	-0.08	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	93.13	103.48	1,434,080,500	1,407,697,415	98.16	1.05	0.05	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98.42	100.43	360,653,000	344,094,701	95.41	1.05	0.05	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70.21	100.30	364,805,250	348,143,251	95.43	1.05	0.05	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99.51	101.54	96,126,000	91,132,150	94.80	1.07	0.07	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	62.5	111.61	51,008,750	47,658,550	93.43	1.19	0.19	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	75.07	112.04	666,145,000	636,482,302	95.55	1.17	0.17	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.42	101.61	314,131,000	313,335,650	99.75	1.02	0.02	100 %
16	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	92.15	98.03	1,909,780,000	1,906,005,126	99.80	0.98	-0.02	75 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100.00	603,883,000	602,282,900	99.74	1.00	0.00	100 %
18	Jumlah desa pangan aman	18	18	100.00	360,390,000	356,260,396	98.85	1.01	0.01	100 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100.00	229,590,000	227,817,600	99.23	1.01	0.01	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98.18	98.18	1,609,760,500	1,595,733,754	99.13	0.99	-0.01	75 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	95.58	95.58	1,617,229,500	1,602,470,834	99.09	0.96	-0.04	75 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93	125	134.41	509,950,000	507,472,673	99.51	1.35	0.35	95 %
23	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83.2	83.17	99.96	500,053,800	497,863,802	99.56	1.00	0.00	100 %
24	Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang	79.8	79.9	100.13	144,956,300	144,906,654	99.97	1.00	0.00	100 %
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	83.7	85.7	102.39	280,723,400	278,056,620	99.05	1.03	0.03	100 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	76.55	99.42	3,473,758,000	3,469,000,207	99.86	1.00	0.00	75 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang optimal	2	2.2	110.00	126,860,000	126,753,000	99.92	1.10	0.10	100 %
28	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	92.5	91.47	98.89	22,541,345,500	22,431,619,643	99.51	0.99	-0.01	75 %
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang	93	100	107.53	1,233,793,500	1,228,066,586	99.54	1.08	0.08	100 %
	TOTAL			102.64	40,214,358,500	39,937,634,010	99.31	1.03	0.03	100 %

MATRIKS PERBANDINGAN UPT KLASTER 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	Samarinda			Semarang			Padang			Yogyakarta		
				Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif
PERPEKTIF STAKEHOLDER															
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	105,62	107,04	103,27	95,77	92,83	104,12	99,35	103,50	97,16	96,41	91,01	97,81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	114,75			113,7			102,96			106,43		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	98,20			83,09			100,02			90,79		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	119,55			109,42			113,83			82,7		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	97,07			62,19			101,32			78,72		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	77	99,13	99,13	103,27	116,07	116,07	104,12	88,43	88,43	97,16	106,21	106,21	97,81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	111,47	103,63	103,46	105,74	103,46	104,12	103,26	99,57	97,16	104,21	96,21	97,81
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	99,35			102,59			91,96			82,78		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,46	100,06			102,04			103,48			101,82		
PERPEKTIF INTERNAL PROCESS															
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	86,09	100,62	103,13	112,36	103,13	104,59	100,43	104,59	101,80	118,67	101,80	97,81
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	119,39			93,29			100,3			109,03		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100,74			100,79			101,54			99,24		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	97,73			105,02			111,61			85,27		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	Samarinda			Semarang			Padang			Yogyakarta		
				Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	97,73			106,88			112,05			94,71		
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	102,07			100,46			101,61			103,86		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	99,35	104,84	104,37	101,09	102,71	104,53	98,03	99,51	105,24	101,03	100,26	89,35
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	1330	120,00	109,76			100,00			100,00			100,00		
	Jumlah desa pangan aman	427	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	165	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	96,96	96,04		100	100		98,18	96,88		94,79	97,16	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	95,11	100			95,58			99,53					
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	115,98	115,98		112,28	112,28		120	120		58,17	58,17	
PERPEKTIF LEARNING AND GROWTH															
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Padang yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Padang	83	100,05	98,05		99,97	100,41		99,96	100,05		99,99	99,26	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Padang	81	96,04	100,84			100,13								
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Padang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Padang	83	100,28	100,28		95,29	95,29		102,39	102,39		98,96	98,96	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	100,44	100,22	99,79	102,75	111,38	102,70	99,48	104,74	102,60	101,77	95,39	
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Padang yang optimal	2	100,00	120			110			89					
11	Terkelolanya Keuangan Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Padang	93	95,96			97,55			98,93			97,45		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	Samarinda			Semarang			Padang			Yogyakarta		
				Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif	Per IK	Per SS	Per Perpektif
	Besar POM di Padang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Padang	92,7	105,26	100,61		109,89	103,72		107,53	103,23		79,79	88,62	
NPS Total					102,47			103,78			101,67			94,24	



BALAI BESAR POM DI PADANG



Jln. Gajah Mada Gunung Pangilun, Padang - Sumatera Barat



padang.pom.go.id



BPOM Mobile



@bbpom_padang



@bbpomdi Padang



bbpom_padang